

Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo



UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Fachrudin Zain Olilingo, S.E., M.Si.

Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo



POTENSI INVESTASI DI PROVINSI GORONTALO

Fachrudin Zain Olilingo

Proofreader : Nama
Desain Cover : Nama
Tata Letak Isi : Ika Fatria
Sumber Gambar: Sumber

Cetakan Pertama: April 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

OLILINGO, Fachrudin Zain

Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo/oleh Fachrudin Zain Olilingo.--
Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, April 2017.

xiv, 257 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Ekonomi

I. Judul

332.6

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB 1	SEKILAS TENTANG PROVINSI	
	GORONTALO	1
1.1.	Pembentukan Provinsi Gorontalo	1
1.2.	Sejarah Terbentuknya Provinsi Gorontalo	3
1.3.	Kinerja Perekonomian Provinsi Gorontalo	5
1.4.	Peran Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo	10
BAB 2	FASE PENGEMBANGAN INDUSTRI DI	
	INDONESIA	14
2.1.	Pendahuluan	14
2.2.	Periode Hingga Tahun 1960-an.....	15
2.3.	Periode Setelah Tahun 1966.....	16
2.4.	Kebijakan	18
2.5.	Issue Untuk Masa Depan	19
	2.5.1. Pengembangan Tenaga Kerja.....	19
	2.5.2. Penerimaan dari sektor luar negeri	20
	2.5.3. Pembangunan Regional	21
2.6.	Industrialisasi Di Negara Berkembang	21
2.7.	Alternatif Kebijakan Industrialisasi	22
	2.7.1. Strategi substitusi Impor	23
	2.7.2. Strategi Promosi Ekspor	25

2.7.3.	Strategi Perdagangan dan Ketenagakerjaan.....	28
2.8.	Kemungkinan Perlombaan Dalam Persaingan.....	31
2.9.	Observasi Terakhir	33
BAB 3	ANALISIS POTENSI DAN PEMANFAATAN LAHAN APL DAN HGU DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI PROVINSI GORONTALO.....	35
3.1.	PENDAHULUAN.....	35
3.2.	Tinjauan Pustaka	39
3.2.1.	Konsep Region Atau Wilayah	39
3.2.2.	Konsep Wilayah Dalam Pengembangan Ekonomi	42
3.2.3.	Peran Investasi dalam pengembangan wilayah	45
3.2.4.	Kondisi Ekonomi	46
3.2.5.	Perkembangan Investasi	46
3.3.	Kondisi Umum Wilayah	48
3.3.1.	Luas wilayah.....	48
3.3.2.	Topografi	50
3.3.3.	Geologi	52
3.3.4.	Pertumbuhan Ekonomi	55
3.4.	Kependudukan.....	56
3.4.1.	Jumlah Penduduk	56
3.4.2.	Pertumbuhan penduduk	58
3.4.3.	Tenaga kerja.....	59

3.4.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59
3.5.	Pemerintahan.....	61
3.5.1.	Administrasi Wilayah.....	61
3.5.2.	Aparat pemerintah.....	63
3.5.3.	Partai politik.....	63
3.6.	Potensi Sumberdaya Alam.....	63
3.6.1.	Potensi Pertanian.....	64
3.6.2.	Potensi Perikanan.....	70
3.6.3.	Potensi Kehutanan.....	74
3.6.4.	Potensi Pertambangan dan Energi.....	77
3.7.	Kondisi Wilayah Areal Penggunaan Lain.....	80
3.7.1.	Kemiringan Lereng	81
3.7.2.	Penutupan lahan	85
3.7.3.	Iklim	88
3.7.4.	Jenis Tanah	89
3.7.5.	Kondisi Vegetasi di APL.....	91
3.8.	Kondisi Wilayah Hak Guna Usaha (HGU).....	92
3.8.1.	Kondisi Iklim	96
3.8.2.	Kondisi penutupan lahan	100
3.8.3.	Kondisi jenis tanah.....	101
3.8.4.	Kondisi Vegetasi di HGU.....	103
3.9.	Pemanfaatan APL dan HGU untuk Perkebunan.....	105
3.9.1.	Perkebunan Kelapa Sawit.....	105
3.9.2.	Perkebunan Tebu.....	107
3.9.3.	Perkebunan kelapa dalam	108

3.9.4.	Pemanfaatan kawasan wisata.....	111
3.9.5.	Pemanfaatan sumber energi terbarukan.....	112
3.9.6.	Izin Usaha Pertambangan	113
3.9.7.	Penutup.....	116
3.9.8.	Kesimpulan.....	116
3.9.9.	Saran-saran	119
BAB 4	DATA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KABUPATEN POHUWATO	121
4.1.	Pendahuluan.....	121
4.2.	Profil Kabupaten Pohuwato	126
4.2.1.	Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Pohuwato	126
4.2.2.	Topografi, Jenis Tanah, Suhu dan Iklim	127
4.3.	Kondisi Perekonomian Kabupaten Pohuwato...	129
4.3.1.	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	129
4.3.2.	Tingkat Kemandirian Kabupaten Pohuwato	131
4.3.3.	Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Pohuwato	134
4.3.4.	Perkembangan Investasi Kabupaten Pohuwato	138
4.4.	Kependudukan (Demografi)	140
4.4.1.	Jumlah Penduduk	140
4.4.2.	Struktur Penduduk.....	144

4.4.3.	Klasifikasi Struktur Umur.....	145
4.4.4.	Ketenagakerjaan(<i>Employment</i>)	147
4.4.5.	Keterangan yang dikumpulkan	148
4.5.	Aspek layanan Pendidikan	152
4.6.	Sarana dan Prasarana	153
4.6.1.	Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar.....	153
4.6.2.	Sarana Pendidikan	156
4.6.3.	Sarana Energi	158
4.6.4.	Sarana Transportasi dan Komunikasi ...	160
4.6.5.	Sarana Perdagangan	162
4.6.6.	Sarana Hotel dan Pariwisata	167
4.6.7.	Perbankan dan Investasi	169
4.7.	Pelayanan Perizinan.....	170
4.7.1.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Pohuwato	170
4.7.2.	Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP).....	171
4.8.	Ketersediaan Dan Potensi Lahan.....	172
4.8.1.	Tanaman Pangan	175
4.8.2.	Pengembangan Komoditas	180
4.8.3.	Penentuan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi	181
4.9.	Arahan Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	

melalui Pendekatan Agribisnis di Kabupaten	
Pohuwato	181
4.9.1. Komoditas Padi	181
4.9.2. Komoditas Ubi Kayu	183
4.9.3. Komoditas Kacang Kedelai	184
4.9.4. Hortikultura	185
4.9.5. Sayur-Sayuran	186
4.9.6. Buah-Buahan	188
4.10. Peluang Investasi	189
4.11. Sumber Daya Perkebunan	190
4.11.1. Potensi Kelapa	191
4.11.2. Potensi Kakao	192
4.12. Sumber Daya Peternakan	195
4.13. Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	198
4.13.1. Dukungan Sarana Dan Prasarana	202
4.13.2. Potensi dan Peluang Budidaya Ikan Bandeng	203
4.13.3. Potensi Dan Peluang Investasi Garam Baku	203
4.13.4. Garam Baku	206
4.14. Sumber Daya Kehutanan	207
4.14.1. Aspek Sumberdaya Hutan	211
4.14.2. Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK)	212
4.14.3. Pemantapan Tata Kelola Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	213

4.15. Pariwisata.....	215
4.15.1. Tujuan Pembangunan Pariwisata	216
4.15.2. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian	217
4.15.3. Refleksi terhadap Pariwisata Gorontalo.....	222
LAMPIRAN.....	226
BAB 5 STUDI PERSEPESSI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO	228
5.1. Pendahuluan.....	228
5.2. Tinjauan Pustaka	230
5.2.1. Beberapa Kajian Pustaka Yang Penting Dan Terkait Dengan Objek Penelitian	230
5.2.2. Peran Sektor Industri Bagi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	233
5.2.3. Kebijakan Pengembangan Sektor Industri.....	237
5.2.4. Peran Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo	240
5.3. Deskripsi Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara	242
5.3.1. Geografis, Administrasi, dan Kondisi Fisik.....	242
5.4. Persepsi masyarakat tentang Kawasan Industri.....	246

5.4.1.	Landasan Penetapan Kawasan Industri	246
5.4.2.	Pemahaman Tentang Rencana Pengembangan Kawasan Industri	248
5.4.3.	Kesiapan Masyarakat tentang pengembangan kawasan industri.....	251
5.4.4.	Kesiapan Masyarakat Untuk Di relokasi Ke Tempat Lain	253
5.5.	Kesimpulan dan Saran	254
5.5.1.	Kesimpulam.....	254
5.5.2.	Saran-Saran.....	256



SEKILAS TENTANG PROVINSI GORONTALO

1.1. Pembentukan Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo terbentuk tanggal 22 Desember 2000 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Terbentuknya Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara berkat perjuangan yang gigih dari putra-putri Gorontalo dengan sasaran ingin mempercepat denyut nadi pembangunan daerah ini sehingga masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan segera terwujud. Jiwa patriotisme masyarakat Gorontalo sudah tertempa semenjak masa kerajaan dimana masyarakatnya yang selalu bahu membahu ingin mempertahankan eksistensinya dari rongrongan para penjajah. Sebagaimana diketahui Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang

disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a, yaitu:

1. Pohala'a Gorontalo;
2. Pohala'a Limboto;
3. Pohala'a Suwawa;
4. Pohala'a Boalemo; dan
5. Pohala'a Atinggola

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah "Adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah". Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bapak H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis

tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya dibawah pimpinan Bapak H. Nani Wartabone berjuang untuk tetap menyatu dengan negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja" sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

1.2. Sejarah Terbentuknya Provinsi Gorontalo

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd. ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sulawesi Utara. Setahun kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Thursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik.

Wilayah Provinsi Gorontalo berada diantara 0,19' – 1,15' Lintang Utara dan 121,23' –123,43' Bujur Timur. Posisi provinsi ini berada di bagian utara Pulau Sulawesi. Yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di

sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat. Sedangkan di sebelah Utara-nya berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dengan Teluk Tomini.

Wilayah Gorontalo juga sangat strategis bila dipandang secara ekonomis, karena berada pada poros tengah wilayah pertumbuhan ekonomi, yaitu antara 2 (dua) Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui Provinsi Sulawesi Tengah dan Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Letaknya yang strategis ini dapat dijadikan sebagai daerah transit seluruh komoditi dari dan menuju kedua KAPET tersebut. Akibat kegiatan arus barang antara kedua KAPET tadi, maka berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan bahkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Selain itu, Gorontalo juga beradapada “mulut” Lautan Pasifik yang menghadap pada negara Korea, Jepang dan Amerika Latin. Sudah barang tentu “kelebihan posisi” ini dapat memberikan peluang yang baik dalam pengembangan perdagangan.

Secara keseluruhan, Provinsi Gorontalo tercatat memiliki wilayah seluas 12.215,44 km². Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa/km². Jika dibandingkan terhadap wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,64 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Luas masing-masing kabupaten/kota adalah :

1. Kabupaten Boalemo seluas : 2.248,24 Km² (18,4%)
2. Kabupaten Gorontalo seluas : 3.426,98 Km² (28,05%)
3. Kabupaten Pohuwato seluas : 4.491,03 Km² (36,77%)

4. Kabupaten Bone Bolango seluas : 1.984,40 Km² (16,25%)
5. Kabupaten Gorontalo Utara seluas : 1.230,07 Km² (10,07%)
6. Kota Gorontalo seluas : 64,79 Km² (0,53%).

Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo (sering disebut juga Kota Hulontalo) yang terkenal dengan julukan "Kota Serambi Madinah". Pada tahun 2013, Provinsi Gorontalo secara keseluruhan memiliki 77 kecamatan serta 735 Desa/Kelurahan. Data ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Gorontalo yang diprediksikan selesai pada tahun 2020 mendatang. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah hasil pemekaran yang terbilang sukses. Seperti halnya daerah lain, Provinsi Gorontalo pun memiliki berbagai julukan, diantaranya:

1. Provinsi Agropolitan;
2. Bumi Maleo;
3. Provinsi Minapolitan;
4. Bumi Para Sastrawan; dan
5. The Hidden Paradise

1.3. Kinerja Perekonomian Provinsi Gorontalo

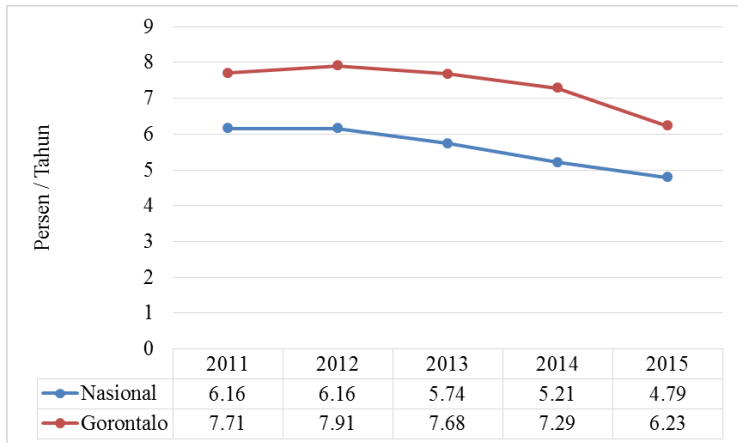
Setelah Provinsi Gorontalo terbentuk nampak telah terjadi percepatan pembangunan dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, perhubungan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Di bidang perhubungan telah terbangun jalan dan jembatan serta pelabuhan baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Jalan yang terbangun tidak saja membuka jaringan komunikasi antar satu

daerah dengan daerah lainnya, tetapi juga telah membuka akses produksi sehingga memudahkan dalam mobilitas input produksi dan pengangkutan hasil produksi ke pasar. Hal ini telah berdampak pada peningkatan produksi pertanian secara signifikan seperti produksi jagung, padi, ubi-ubian, dan sayuran.

Namun Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2014. Hasil penghitungan PDRB yang telah dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2016 lalu, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2015 tercatat sebesar 6,23 persen, melambat dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 7,29 persen. Dari sisi produksi, perlambatan ekonomi Gorontalo terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Kedua lapangan usaha ini memiliki sumbangan cukup besar terhadap total pertumbuhan PDRB Gorontalo.

Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis dalam mendukung peran Sulawesi di tingkat nasional sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan nikel khususnya simpul perkebunan kakao dan simpul perikanan. Kinerja perekonomian Provinsi Gorontalo tahun 2011 – 2015 cenderung mengalami penurunan (Gambar 1). Pada tahun 2011 – 2015 pertumbuhan ekonomi menurun dari 7,71 persen pada tahun 2011 menjadi 7,29 persen pada tahun 2014, kemudian menurun lagi menjadi 6,23 pada tahun 2015. Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan rata-rata Gorontalo sebesar 7,65 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,9 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi

Provinsi Gorontalo turut didukung oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011-2015
(Sumber: BPS, 2014)

Peran ekonomi Provinsi Gorontalo perlu diantisipasi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan. Menurut Chennery dalam Tambunan, 2011 bahwa sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian adalah sektor industry. Sektor industri dijadikan leading sektor sebab sektor ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sektor pertanian. Kelebihannya diantara lain memiliki nilai tambah yang besar, produksinya efisien, memiliki nilai tukar yang besar dan skala ekonominya juga tinggi. Walaupun sektor

industry menjadi prioritas dan penghela ekonomi, namun karena Indonesia adalah negara agraris, maka pengembangan sektor pertanian tetap juga menjadi penggerak ekonomi secara keseluruhan. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 1). Harus ada keseimbangan kebijakan pengembangan sektor pertanian dan industry 2). Pengembangan sektor industri sebaiknya berbasis pertanian. Terhadap dua kebijakan tersebut secara nasional sudah menjadi komitmen pemerintah seperti yang ditunjukkan baik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dimana sasaran utama pembangunan jangka panjang negara ini adalah pencapaian struktur ekonomi yang seimbang yaitu terdapatnya kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh. Hal ini berarti bahwa antara sektor pertanian (dan kehutanan) dan sektor industri diperlukan adanya keterkaitan yang kuat baik keterkaitan kedepan maupun keterkaitan ke belakang dalam mencapai tujuan masing-masing sektor tersebut. Adanya keterkaitan ini terlihat dengan adanya perkembangan pengolahan hasil pertanian dan industri agro (agroindustry). Agroindustri adalah suatu kegiatan lintas disiplin yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian) untuk industri.

Transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agrarisnya. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi empiris Bank Dunia menunjukkan, bahwa sukses pengembangan sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta

menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa.

Keputusan Indonesia untuk membuat pertanian menjadi landasan perencanaan pembangunan negara memang tidak sejalan dengan kebijaksanaan konvensional. Pada akhir dekade enam puluhan, ketika pemerintah Orde baru meluncurkan rencana pembangunan ekonominya, sebagian besar literatur dalam bidang ekonomi mengidentikkan pembangunan dengan industrialisasi. Hal ini terlihat lebih nyata lagi misalnya dalam penamaan negara yang sudah mencapai standar hidup yang tinggi bagi penduduknya sebagai negara industri. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang mendahulukan pertanian, tim ekonomi negara tetap punya komitmen besar terhadap industrialisasi sebagai sebuah pilar bagi strategi pembangunan ekonomi negara. Mereka juga sadar bahwa program yang keliru untuk mencapai industrialisasi secara terburu-buru bisa menjadi boomerang yang menyebabkan dislokasi ekonomi, investasi terbuang percuma, dan penghamburan kekayaan negara yang langka.

Bukti statistik dari zaman Sukarno terlalu sedikit dan masih kacau sehingga sukar untuk memperkirakan keadaan industrialisasi Indonesia pada masa tersebut. Namun demikian, bukti yang tersedia mengisyaratkan bahwa pada masa permulaan Orde baru, Indonesia termasuk negara yang paling rendah tingkat industrilisasinya diantara negara-negara sedang berkembang yang besar.

Memandang ke belakang, akhir dekade Sembilan puluhan, saat Indonesia mulai menjadi negara industri baru (NIC, *Newly Industrialized Country*), orang bisa dengan

mudah berpikir bahwa kita telah berhasil. Namun, dalam prosesnya, kita kadang-kadang membuat kesalahan yang membawa kepada jalan buntu. Ada banyak pengalaman berharga yang kita peroleh terutama pada tahun-tahun awal. Pengalaman-pengalaman ini bisa disarikan sebagai berikut :

- Proteksionisme, sukses kebijakan industry tak lepas dari terpeliharanya nilai tukar mata uang yang realistis
- Strategi ekonomi harus bersifat fleksibel dan realistis, sehingga dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, dan bila perlu dihentikan kalau sudah kadaluwarsa.

1.4. Peran Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Struktur perekonomian Gorontalo didominasi oleh sektor pertanian, diikuti jasa jasa, dan perdagangan. Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih rendah. Industri pengolahan sendiri hanya berkontribusi sebesar 5 persen, sementara dukungan sektor utilitas untuk industri berkontribusi sangat kecil. Sektor jasa-jasa sebagai sektor tersier mulai mendominasi perekonomian Gorontalo sejak tahun 2008 dan terus meningkat hingga tahun 2013. Hal ini menjadi indikator perkembangan wilayah sebagai pusat pelayanan. Sektor pertanian yang mendapatkan prioritas pengembangan di wilayah ini adalah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki pasar luas, sedangkan pola kegiatan pertanian banyak dilakukan di perdesaan dengan keterbatasan modal, penyediaan bibit unggul, pupuk, kualitas SDM yang rendah, serta kualitas produksi dan pemasaran yang rendah. Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Gorontalo, namun

laju pertumbuhan sektor ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Produktivitas pertanian padi di Provinsi Gorontalo juga tinggi namun tingkat produksinya juga rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Tentang sumbangan sector-sector ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

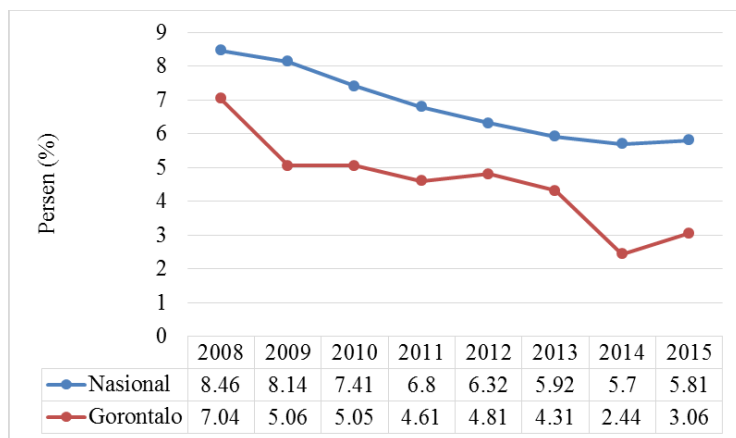
Tabel 1. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)
1	Pertanian	27,17
2	Pertambangan	1,08
3	Industri Pengolahan	8,06
4	Listrik, Gas, Air Minum	0,58
5	Konstruksi	9,33
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	15,64
7	Angkutan, Telekomunikasi	10,97
8	Keuangan	9,10
9	Jasa-jasa	18,06
JUMLAH		100,00

Sumber: BPS, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa industri pengolahan hanya mempunyai kontribusi 5.11% penyebabnya kurangnya ketersediaan bahan baku yang menjadi kendala dalam faktor produksi, sehingga berdampak pada perusahaan belum dapat memenuhi kebutuhan pembeli secara kontinyu. Selanjutnya upaya diversifikasi produk dan adanya permintaan dari luar negeri memberikan peluang untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspor di tahun 2014. Pengurangan Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo tahun 2008-2015 berkurang sebesar 3,98 persen, dan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. (Gambar 3). Menurunnya TPT di Gorontalo selain karena kontribusi sektor pertanian yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat juga tumbuhnya sektor jasa di beberapa kota dan kabupaten di wilayah ini. Namun rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita yang rendah di Gorontalo mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Sumber: BPS 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Basri dkk (2013). *Mengukuhkan jati Diri , Dinamika Pembentukan Provinsi Gorontalo*. Penerbit: Ombak, Yogyakarta.
- Habibie Sudirman dkk (2004). *23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
- Pedju, Ary Muchtar dkk (1982). *Perjuangan Rakyat Di Daerah Gorontalo, Menentang Kolonialisme dan Mempertahankan Negara Proklamasi, Latar Belakang Sejarah Gerakan Patriotik 23 Januari 1942 dan Kaitannya dalam Mencapai/Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI*. Yayasan 23 Januari 1942 bekerjasama dengan IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo.



FASE PENGEMBANGAN INDUSTRI DI INDONESIA

2.1. Pendahuluan

Peran sektor industri sangat memegang peranan penting dalam perekonomian terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah. Dalam beberapa dekade periode pembangunan harapan pemerintah dan masyarakat selalu ditujukan pada peran sektor industry berhubung Indonesia memiliki potensi berlebihan untuk diolah menjadi produk industri walaupun pada kenyataannya banyak hambatanya sehingga apa yang diidamkan selalu mendapat kendala, apalagi dengan persaingan yang semakin kencang saat ini. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah jenis industri apa yang saat ini kita kembangkan dan apa saja kebijakan yang diambil dalam mendukung strategi dan kebijakan dimaksud.

Setelah periode tahun 1970 an kebijakan pengembangan sektor industri di Indonesia yang dikenal

dengan program pengembangan industri bayi (infant industries), maka kebijakan selanjutnya adalah penguatan struktur industri yang mengarah pada pendewasaan industri dengan titik berat pada mulainya era pengembangan industri manufaktur. Kajian ini hendak memfokuskan pada fase pengembangan sektor industri di Indonesia semenjak tahun 1960 an, kemudian periode tahun 1970 an dan periode selanjutnya hingga kita memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2000 an.

2.2. Periode Hingga Tahun 1960-an

Dalam era pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan masa Orde lama hingga penghujung tahun 1966, pengembangan sektor industri lebih berorientasi pada pengembangan industri secara ke dalam (inward looking) yang lebih populer pada waktu itu dengan sebutan berdiri di kaki sendiri. Pemerintah menutup diri terhadap bantuan negara lain sehingga baik permodalan, teknolog dalam proses produksi maupun pasar mengandalkan kemampuan dalam negeri. Bahkan slogan politik yang sering mengemuka pada waktu itu adalah Go To Hell With Your Aid (ke neraka dengan bantuan anda), sehingga banar-benar kita mengutamakan sumberdaya kita dalam membangun bangsa. Menurut Huib Poot (1992) selama periode tahun 1950 an dan awal tahun 1960-an titik berat pengembangan industri adalah memberdayakan perusahaan negara terutama dalam pengembangan industri manufaktur, sehingga terjadi nasionalisasi terhadap beberapa perusahaan asing.

Perusahaan negara mendapat perlindungan dari pemerintah seperti mendapat subsidi, kemudahan dalam mengakses kredit dan memperoleh valuta asing. Dalam

transaksi internasional cadangan devisa mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah termasuk dalam transaksi internasional yang menyebabkan beberapa industri kekurangan bahan baku dan suku cadang. Secara umum periode ini merupakan periode ketidakstabilan politik, anggaran pemerintah mengalami deficit terus menerus, inflasi yang terus merangkak naik dan kontrol pemerintah yang berlebihan menyebabkan kondisi industri mengalami kemunduran. Akibatnya sektor produksi perusahaan mengalami kemunduran hingga mencapai 30% (Mc Cawley dalam Huib Poot, 1992).

2.3. Periode Setelah Tahun 1966

Awal Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi reformasi ekonomi secara besar-besaran. Era ini ditandai dengan dimulainya paham liberalisme ekonomi sebagai landasan operasional kebijakan ekonomi antara lain dengan membuka keran lalu lintas moneter menjadi lebih terbuka sehingga kegiatan ekspor dan impor tidak lagi dibatasi akibatnya pergerakan bahan baku industri serta suku cadang menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur. Selanjutnya dikeluarkan paket kebijakan untuk memudahkan investasi masuk dalam negeri antara lain dengan menghilangkan paket subsidi bagi perusahaan pemerintah serta menghilangkan kekhawatiran terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan dimulailah paket perencanaan pembangunan secara bertahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tahapan rencana pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita) I periode tahun 1969/70 hingga 1973/74 yang diikuti dengan

formulasi industri kecil dan menengah. Dalam Repelita I pengembangan industri fokus pada industri yang mendukung sektor pertanian yaitu industri yang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi dengan tekanan pada penggunaan tenaga kerja lebih banyak (labor intensif) dan industri yang mendukung pengembangan daerah-daerah pertanian. Selain daripada itu secara khusus dalam repelita I mulai dikembangkan industry dasar seperti industri pupuk, semen, kimia, kertas dan tekstil. Repelita II periode (1974/75-1978/79) prioritas memperkuat basis industry yang mendukung sektor pertanian serta infrastruktur.

Penguatan peran pribumi atas non pribumi dalam dunia usaha mendapat perhatian, demikian pula berbagai pengaturan terhadap produk impor untuk memperkuat industri lokal mendapat perhatian serta regulasi terhadap masuknya investasi asing. Repelita III periode (1979/80-1983/84) sasaran pembangunan semakin diperluas. Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas menjadi bagian dari strategi dalam mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan memberikan perlindungan terhadap pengusaha lemah dan mempromosikan industri barang ekspor yang padat tenaga kerja. Repelita IV periode (1984/85-1988/89) adalah meletakkan dasar menuju keseimbangan antara peran sektor pertanian dan industry dalam struktur perekonomian.

Sasaran utama dalam kebijakan pembangunan adalah untuk peningkatan sumber daya manusia, promosi ekspor, substitusi impor, pembangunan regional dan memproses potensi sumber daya alam. Prioritas pembangunan diarahkan untuk memproduksi mesin-mesin industri dengan teknologi tinggi, peningkatan peran industri kecil dan menengah,

peningkatan peran sektor swasta dan peran penanaman modal asing. Repelita V periode (1989/90-1993/94) adalah periode akhir dari pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) dimana dalam periode ini terjadinya keseimbangan dalam peran sektor pertanian dan industri dan dimulainya era tinggal landas.

2.4. Kebijakan

Kebijakan strategis pengembangan industri di Indonesia yaitu dengan memberikan kemudahan perizinan melalui peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mempersingkat waktu pelayanan perizinan melalui peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lembaga ini mengkoordinasikan semua perizinan yang terkait dalam satu system sehingga pemohon dapat menghemat waktu secara prosedural. Misalnya fungsi pelayanan sektoral seperti perdagangan, perindustrian, lingkungan hidup, tenaga kerja dan lain-lain dapat dilayani di PTSP dengan menempatkan staf dari departemen atau dinas terkait tersebut di PTSP.

Kebijakan lain adalah dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap lalu lintas barang ekspor dan impor. Melalui mekanisme ini pemerintah dapat mengontrol berbagai jenis barang ekspor sehingga ketahuan jenis barang yang dilarang atau tidak untuk diekspor karena menyangkut kepentingan strategis negara. Untuk mekanisme kontrol barang impor dilakukan melalui pengenaan tariff impor, izin impor maupun pengaturan kredit impor. Selain daripada system kurs devisa digunakan untuk mengontrol kinerja ekspor sehingga dalam rangka mendorong ekspor pemerintah melakukan beberapa kali devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika yaitu tahun 1971, 1978, 1983 dan 1986.

Ada beberapa kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembangan industri di Indonesia di bawah kontrol Kementerian Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

1. Membuka akses kredit kepada para pengusaha misalnya program Kredit Investasi Kecil (KIK) atau Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Akan tetapi kredit kepada Usaha Mikro dan kecil khususnya kaum pribumi dilaporkan banyak permasalahan;
2. Membangun kawasan pengembangan industri yang dilengkapi dengan pusat pelatihan teknis dan tenaga kerja;
3. Memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dan Kecil dengan sistem Sub Contracting;
4. Menyediakan pusat inkubasi bisnis yang melayani kebutuhan khususnya UMKM. Upaya-upaya tersebut disertai pula oleh Kontrol yang kuat oleh pemerintah terhadap pergerakan impor barang yang menjadi pesaing industri khususnya industri dalam negeri melalui kebijakan yang proteksionis, walaupun kebijakan ini dinilai cenderung memanjakan industri dalam negeri sehingga kurang memiliki daya saing di pasaran internasional.

2.5. Issue Untuk Masa Depan

Ada beberapa issue penting perlu perhatian dalam pembangunan ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan industri di Indonesia yaitu pengembangan tenaga kerja, kurs valuta asing, dan pembangunan regional.

2.5.1. Pengembangan Tenaga Kerja

Karena Indonesia adalah negara agraris dengan potens pertanian yang begitu besar, maka tenaga kerja di

sektor pertanian harus didorong untuk meningkatkan produktifitas di sektor pertanian. Peningkatan tenaga kerja tersebut harus seiring dengan pengembangan sektor industri termasuk yang berbasis sektor pertanian. Hasil pengamatan di lapangan bahwa pemberdayaan tenaga kerja di sektor industri masih di bawah dari yang ditargetkan. Untuk kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pengembangan industri yang berbasis tenaga kerja (labor intensive) daripada berbasis modal (capital intensive). Demikian pilihan penggunaan teknologi memegang peranan penting menjadi daya dukung kebijakan pemerintah termasuk perannya dalam menciptakan pendistribusian pendapatan kepada masyarakat.

2.5.2. Penerimaan dari sektor luar negeri

Setelah berkurang pendapatan luar negeri dari sektor minyak dan gas, maka perlu ada upaya lanjutan untuk mendongkrak pendapatan dari sektor lainnya yang bertalian dengan pendapatan dari sektor luar negeri. Kebijakan pengembangan industri yang berorientasi ekspor serta industri pengganti barang yang selama ini diimpor (impor substitution) perlu terus digelorakan. Dalam kebijakan pengembangan barang ekspor harus berbasis pada potensi dalam negeri dan berbasis tenaga kerja lokal. Pencapaian pendapatan dari sektor luar negeri juga menuntut perubahan dalam strategi pengembangan industri dalam negeri yang lebih berorientasi pada pemakaian bahan baku lokal. Untuk itu pilihan sistem kurs yang diterapkan adalah sistem yang memperkuat stabilisasi pemasukan devisa sehingga perlu ada pengendalian kurs yang cenderung gunjang=ganjing.

2.5.3. Pembangunan Regional

Strategi pengembangan industri perlu memikirkan potensi pengembangan wilayah terutama daerah-daerah yang menghasilkan produk bahan baku. Selama ini industri dibangun di Jawa sedangkan luar Jawa kurang tersentuh oleh pengembangan industri oleh karena itu untuk memperkuat basis pengembangan industri, maka tekanan perhatian ke luar Jawa perlu mendapat porsi yang lebih besar.

2.6. Industrialisasi Di Negara Berkembang

Industrialisasi telah menjadi kata kunci dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara dalam beberapa dekade. Tahun 2000-an beberapa negara berkembang telah sukses mengembangkan industri sehingga tergolong dalam kelompok negara industri baru (Newly Industrialised Countries (NIC's) seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan lain-lain, sementara negara-negara lainnya juga paling kurang juga telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam pengembangan industri ke depan termasuk Indonesia. Industrialisasi merupakan wahana dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah yang cukup besar, dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga banyak negara berlomba-lomba mengembangkan industrialisasi di negaranya masing-masing termasuk di Indonesia. Kebijakan pengembangan industri pada suatu negara akan diikuti oleh pengembangan industri pada daerah sebagai penyanggah kebijakan industri nasional sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berikut ini akan diuraikan beberapa alternative kebijakan industrialisasi yang pernah diterapkan di Indonesia.

2.7. Alternatif Kebijakan Industrialisasi

Menurut Huib Poot dkk. (1992: 14) karakteristik strategi pengembangan industri biasanya didasarkan pada orientasi pengembangan perdagangan dari hasil produk industri. Dalam tahap awal biasanya strategi tersebut dibagi atas produk yang berorientasi substitusi impor dan promosi ekspor. Strategi substitusi impor berorientasi pada pasar dalam negeri yaitu produk barang industri yang merupakan pengganti barang-barang yang selama ini diimpor diusahakan diproduksi dalam negeri.

Strategi ini dikenal dengan kebijakan Inward Looking yaitu kebijakan yang berorientasi pada dukungan produksi dalam negeri dengan memberikan berbagai kemudahan agar tercipta daya saing produksi dalam negeri. Dalam kebijakan ini biasanya disertai dengan pemberian proteksi terhadap barang impor baik dengan pengenaan kebijakan tariff impor barang maupun non tariff seperti quota, subsidi atau pelarangan impor barang tertentu. Strategi promosi ekspor adalah strategi pengembangan industry dengan tujuan memproduksi barang untuk pasar keluar negeri. Pengenaan strategi ini membutuhkan tingkat efisiensi yang tinggi dengan memproduksi barang yang memiliki kualitas ekspor dan memiliki daya saing tinggi.

Jenis lain dari strategi pengembangan industri adalah strategi dengan memberikan prioritas tinggi kepada industri dasar yang memproduksi bahan setengah jadi yang pada dasarnya secara luas investasinya didukung sepenuhnya oleh pemerintah karena menjadi tonggak pengembangan industri secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan dasar pengembangan industri dalam strategi ini fokus pada pengembangan industrimassa untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi akhir. Agar dapat menciptakan pekerjaan yang lebih banyak, maka strategi ini dititikberatkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang padat karya.

Dari kedua strategi di atas, strategi substitusi impor dan promosi ekspor memiliki kaitan yang sangat luas dengan perekonomian global karena terkait langsung dengan hubungan perdagangan antar negara. Perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan sektoral dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan industri strategis yang memiliki daya saing.

2.7.1. Strategi substitusi Impor

Kebanyakan negara berkembang memulai proses industrialisasinya dengan strategi substitusi impor. Demikian pula dengan negara-negara yang sudah maju industrinya memulai dengan strategi yang sama seperti Amerika Latin, Korea Utara dan Selatan serta beberapa negara Asean lainnya.

Fase pertama dari strategi ini adalah dengan memulai memproduksi barang-barang konsumsi, sedangkan barang modal dan produk antara masih tetap diimpor. Pada tahap berikutnya mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi pada barang yang terkait ke depan. Secara umum, fase pertama bisa dilalui, namun fase selanjutnya kebanyakan negara mulai menemui kesulitan dalam pengembangan industrinya terutama dalam menciptakan efisiensi produk serta bersaing di pasaran lokal, regional dan bahkan internasional.

Jenis komoditi yang diproduksi pada tahap ke dua seperti barang setengah jadi dan barang konsumsi tahan lama memiliki karakteristik yang lebih kompleks daripada jenis barang yang diproduksi pada fase pertama. Barang setengah

jadi dan barang konsumsi tahan lama lebih banyak menggunakan tenaga mesin (*capital intensive*) daripada tenaga manusia dan lebih efisien atau memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya industri tersebut sangat sensitif terhadap pengelolaan administrasi dan teknik yang tidak efisien yang akan berkontribusi terhadap ekonomi biaya tinggi. Apalagi cadangan devisa semakin menipis sebagai akibat dari kebutuhan impor material dan mesin semakin meningkat sehingga juga berkontribusi terhadap ekonomi biaya tinggi.

Ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan dalam menjaga jalannya kebijakan subsidi impor seperti pengenaan proteksi yaitu tarif, pembatasan impor, pelarangan impor, subsidi untuk melindungi daya saing produk dalam negeri. Proteksi ini pengenaannya sangat ketat terhadap produk barang konsumsi sedangkan terhadap produk barang setengah jadi dan barang modal agak diperlonggar. Subsidi impor juga diperhadapkan dengan perubahan kurs yang cenderung meningkat sehingga menyebabkan harga-harga dalam negeri semakin meningkat dibandingkan dengan harga internasional. Sehingga dengan demikian regim subsidi impor membutuhkan insentif dan kemudahan untuk para investor dimana beberapa negara lebih mengandalkan pada investasi pemerintah seperti Pakistan, India dan Indonesia.

Berikut beberapa bukti bahwa strategi subsidi impor tidak mencapai sukses yang gemilang. Pada awalnya kebijakan proteksi yang berlebihan telah berdampak pada peningkatan produksi di dalam negeri, namun dalam jangka panjang proteksi yang berlebihan menjadi bumerang karena justru memajukan industri dalam negeri dan kehilangan daya saing sehingga tidak bisa mandiri. Industri tersebut umumnya

beroperasi di bawah kapasitas sehingga memiliki skala ekonomi yang rendah, sehingga harapan industri tersebut bisa menampung tenaga kerja yang banyak tidak menjadi kenyataan. Lebih lanjut, strategi substitusi impor juga telah berkontribusi pada semakin tingginya ketimpangan pendapatan terutama pada sektor perkotaan. Di kebanyakan negara strategi ini telah memberatkan posisi neraca pembayaran yang diakibatkan oleh nilai kurs yang terlalu tinggi sebagai akibat dari proteksi yang berlebihan. Mempertahankan kurs yang terlalu tinggi mengakibatkan jumlah impor naik dan ekspor barang industri menurun sehingga penerimaan devisa negara menurun.

2.7.2. Strategi Promosi Ekspor

Alternatif strategi promosi ekspor merupakan rekomendasi para ahli ekonomi setelah adanya kegagalan yang dialami strategi substitusi impor yang pada dasarnya strategi ini mulai melirik kemampuan di pasar internasional dengan memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Dalam strategi ini proteksi dikurangi, kurs valuta asing lebih realistis dan insentif untuk eksportir mulai diberikan untuk merangsang ekspor. Paling tidak dengan strategi ini para pengusaha memiliki peluang yang sama dalam meraih pasar dalam dan luar negeri.

Bukti sukses dari strategi ini seperti yang dialami oleh negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura dan negara-negara industri baru seperti Argentina, Brazil dan Mexico. Selama dua dekade yaitu tahun 1960 hingga 1980 strategi promosi ekspor negara-negara Asia Timur menikmati pertumbuhan perkapita pendapatan nasional sebesar 8 sampai 10 persen per tahun,

dimana sebelumnya pada awal penerapan strategi promosi ekspor naik sebesar 20 sampai dengan 40 persen.

Studi lain tentang strategi promosi ekspor khususnya pada negara-negara berkembang yaitu melihat manfaat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara-negara berkembang, seperti penelitian Ram dalam Huib Poot (1992) yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Umumnya negara-negara yang menerapkan strategi promosi ekspor telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian penelitian Marshal dalam Hub Poot (1992) menunjukkan bahwa tidak semua negara di negara-negara berkembang sukses dalam menerapkan strategi promosi ekspor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masa transisi dari strategi substitusi impor ke promosi ekspor diikuti oleh beberapa perubahan kebijakan. Pada awalnya beberapa negara melakukan devaluasi untuk merangsang ekspor produk, juga melakukan penyesuaian terhadap sistem kurs yang berlaku ke arah kurs mengambang dan mengambang terkendali. Stabilisasi kurs dilakukan dalam level ekonomi makro kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi, mengurangi distorsi di pasar modal dan meningkatkan tabungan. Hasilnya kelihatan pada meningkatnya ekspor seiring dengan perbaikan dalam struktur perdagangan seperti pengurangan proteksi yang diikuti dengan kebijakan pemberian subsidi terhadap barang ekspor. Selain daripada itu hal yang penting adalah menjaga stabilisasi kurs sehingga di pasar uang kurs tidak dinilai berlebihan.

Ada beberapa kritik terhadap strategi promosi ekspor antara lain, perkembangan industri yang terjadi nampaknya

tidak stabil dengan sedikit sekali jaringan, dan hanya memanfaatkan dukungan pemerintah dan tenaga kerja yang relative murah. Lebih lanjut manfaat yang diperoleh dari transfer teknologi serta pelatihan-pelatihan sangat kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah menyangkut hubungan antara penetapan harga yang pantas dengan peningkatan ekspor. Pada umumnya proforma ekspor pada negara-negara industri baru didorong oleh situasi pasar pada tahun 1960 hingga 1980 yang telah mendorong meningkatnya ekspor.

Faktor penting lainnya adalah adanya lokalisasi perusahaan multi nasional sebagai akibat kebijakan upah murah dan berbagai insentif yang diberikan negara-negara yang ditempati perusahaan multinasional. Di beberapa negara menunjukkan bahwa penanaman modal langsung telah memberikan peran penting khususnya dalam mensuplai kebutuhan mesin dan listrik. Dengan kata lain untuk perusahaan industri tradisional seperti industri tekstil, pakaian, sandal/sepatu peran perusahaan asing tidak terlalu penting. Oleh karena itu suatu penelitian yang diadakan di negara-negara Asia timur bahwa industri kendaraan roda empat agak sukar dihilangkan dari peran perusahaan luar negeri pada negara-negara berkembang. Studi yang sama dilakukan di negara-negara industri baru Amerika latin yang menunjukkan peran perusahaan multi nasional sangat dibutuhkan. Secara umum kepercayaan terhadap pinjaman luar negeri yang dapat mengakses langsung dollar lebih tinggi daripada penanaman modal langsung.

Suatu contoh sukses dari kesuksesan strategi promosi ekspor di Korea dan Taiwan karena peran yang begitu besar dari pemerintah daripada pasar bebas. Di Korea misalnya pemerintah memberikan insentif yang begitu besar dalam

mendorong ekspor juga melakukan seleksi yang begitu ketat terhadap subsidi impor dalam pengalokasian kredit (Dhatta-Chaudhuri dalam Huib Poot, 1992).

Halangan utama dalam pemberlakuan strategi promosi ekspor adalah dari mereka yang telah lama menerima manfaat dari kebijakan subsidi impor seperti para industriawan, asosiasi perdagangan, dan para pengambil kebijakan. Oleh karena itu peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam implementasi strategi promosi ekspor.

Pendekatan alternative dari strategi promosi ekspor juga strategi subsidi impor adalah strategi inward looking yaitu melakukan perubahan struktur politik dan ekonomi dalam negeri yaitu dengan penetapan sasaran politik, ekonomi dan sosial konsisten dengan kondisi sosial ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki. Pelaksanaan strategi ini disesuaikan dengan kemampuan teknologi, kebutuhan dasar masyarakat dan mengutamakan distribusi pendapatan masyarakat.

2.7.3. Strategi Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Kekurangan kesempatan kerja serta produktifitas di bawah rata-rata merupakan permasalahan umum yang terjadi di kebanyakan negara-negara berkembang. Di dalam perencanaan pembangunan sektor manufaktur diharapkan menjadi katup pengaman dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan terutama pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dari sektor manufaktur akan dirasakan oleh masyarakat dengan kesempatan kerja yang semakin terbuka. Namun pada kenyataannya sasaran penyelesaian ketenagakerjaan melalui sektor ini selalu mengecewakan,

bahkan harapan pada efek menetes ke bawah (trickle down effect) sangat diragukan seiring terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaannya strategi apa yang efektif yang harus dilakukan agar strategi industrialisasi dapat merangsang kesempatan kerja yang lebih banyak. Beberapa studi telah dilakukan antara lain studi NBER pada 10 negara berkembang (Krueger dalam Hub Poot, 1992), yang mengaitkan dampak (kebijakan strategi subsidi impor dan promosi ekspor).

Studi dimaksud dikaitkan dengan perbedaan struktur produksi dan perdagangan. Untuk tujuan tersebut sektor diklasifikasi menjadi beberapa kategori yang berbeda. Pertama-tama dibedakan antara barang perdagangan dan bukan barang perdagangan. Barang yang diperdagangkan dapat dibedakan menjadi berbasis sumberdaya lokal dan versi Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) dimana lokasi tidak menjadi pertimbangan dalam mengakses bahan baku. Barang-barang HOS dapat dibagi lagi menjadi barang ekspor dan barang impor, dimana barang impor dibagi lagi menjadi yang dapat bersaing dan tidak bisa bersaing. Untuk mengidentifikasi perbedaan dari barang HOS, maka perlu menggunakan data.

Tahapan selanjutnya adalah penentuan koefisien tenaga pada masing-masing sektor. Koefisien tersebut diestimasi dengan nilai tambah tenaga kerja per unit. Tidak saja tenaga kerja langsung yang diestimasi tapi juga tenaga kerja yang memiliki hubungan dengan barang yang tidak diperdagangkan. Berdasarkan pengamatan hasil koefisien menyimpulkan bahwa HOS barang yang bisa diperdagangkan cenderung lebih banyak menggunakan tenaga kerja daripada barang-barang yang diimpor. Dengan kata lain, barang-barang

yang diproduksi dengan tidak menggunakan barang impor cenderung lebih murah di dalam negeri. Jadi, pola ekspor dan impor dalam kaitannya dengan koefisien tenaga kerja berhubungan erat dengan sumberdaya lokal.

Bagian lain dari hasil studi berisi analisa tentang regim perdagangan, dampak dari komposisi produk, teknik produk, dan kebutuhan tenaga kerja. Faktor-faktor yang diperhitungkan dalam analisis adalah besarnya penyimpangan pasar dalam rezim perdagangan, pengaturan kredit, pajak dan tingkat upah. Memperhatikan faktor penyimpangan pasar umumnya kesimpulan menyatakan bahwa nilai kurs valuta asing di atas dari yang berlaku, pengenaan pajak impor yang kecil melebihi insentif untuk impor barang modal. Tambahan pula, Kemampuan kredit dibawah dari tingkat insentif yang diberikan pada intensitas penggunaan modal. Dengan kata lain, penyimpangan penggunaan tenaga kerja lebih kecil dari yang diperkirakan. Umumnya, penyimpangan pasar lebih rendah pada promosi ekspor daripada substitusi impor.

Dampak dari strategi perdagangan dan penyimpangan penggunaan tenaga kerja dalam negeri menjadi pokok permasalahan penelitian NBER. Pertama, ingin dilihat yang mana yang lebih memungkinkan lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan menggunakan strategi di atas. Sebenarnya beberapa negara yang mengenakan proteksi yang lebih kecil memiliki tingkat penggunaan tenaga kerja lebih besar daripada sektor yang menggunakan proteksi lebih besar. Dengan kata lain pengenaan strategi substitusi impor dengan proteksi yang kecil lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dengan substitusi antara modal dan tenaga kerja diharapkan insentif pasar dalam barang manufaktur menyebabkan peningkatan lebih besar penyerapan tenaga kerja pada setiap

peningkatan investasi. Manfaat tenaga kerja akan lebih besar, jika insentif diberikan pada pasar dalam negeri dan barang dagang.

2.8. Kemungkinan Perlombaan Dalam Persaingan

Dapat disimpulkan bahwa kesuksesan negara-negara industri baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan oleh karena itu dapat dilihat perbandingannya antar negara. Umumnya kendala yang dihadapi adalah perubahan kondisi ekonomi dunia, dengan tingkat pertumbuhan perdagangan dunia yang relative rendah dan meningkatnya tingkat proteksionisme antar negara, diskiriminasi atas produk dari negara-negara berkembang. Lebih dari itu, teknologi baru dalam mikro elektronik cenderung mendasari keunggulan komparatif pada produksi negara-negara berkembang.

Beberapa studi menunjukkan bahwa dampak dari proteksi baru pada perdagangan dunia dan ekspor negara-negara berkembang sangat signifikan. Stagnasi dari ekspor negara-negara berkembang awal tahun 1980-an ditandai oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi daripada pengurangan proteksi. Hughes dan Krueger (1982) menyimpulkan bahwa tahun 1970-an penanganan proteksi tidak terlalu mendapat perhatian di negara-negara berkembang untuk peningkatan share perdagangan di negara-negara berkembang secara substantif.

Dapat disimpulkan bahwa peluang peningkatan ekspor pada negara-negara berkembang cukup besar dan akan terus berkembang (Hughes, 1981), dimana peningkatan sumbangan ekspor mengarah ke selatan daripada ke utara (Ranis, 1985). Penelitian ini juga menggambarkan permintaan impor barang dari negara-negara berkembang

sangat elastik yang mengisyaratkan bahwa permintaan terhadap barang-barang tersebut secara proporsional berpengaruh pada peningkatan pendapatan (Donges dan Riedel, 1977). Tambahan pula, transisi negara-negara berkembang lebih padat modal dan penggunaan tenaga kerja yang lebih terampil terbuka lebar. Konsekwensinya, kesenjangan di pasar dari produk barang padat karya akan diisi oleh negara-negara berkembang.

Keberadaan kemungkinan peningkatan ekspor dibuktikan dengan munculnya negara-negara industri baru seperti Malaysia, Thailand dan Philipina yang sangat kompetitif dengan produk padat karya. Hal ini tidak berarti proteksi baru tidak diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Meningkatnya proteksi telah berdampak pada penurunan nilai ekspor dan tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi kebanyakan negara-negara berkembang dan juga telah berdampak pada penurunan pertumbuhan perdagangan dibandingkan dengan pertumbuhan output dunia.

Sejauh masih terjadi kepekaan ekspor terhadap faktor eksternal, maka negara yang menerapkan strategi di atas masih bisa mempertahankan pertumbuhan dan kinerja eksportnya baik sebelum atau sesudah era menaiknya harga minyak dunia yang diikuti oleh menurunnya volume perdagangan dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dimana sepanjang tahun 1970-an strategi promosi ekspor berespon positif terhadap gejolak ekonomi dunia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Balasa, 1978).

Berkaitan dengan prospek jangka panjang dari strategi promosi ekspor, maka pengalaman negara-negara industri baru dapat menjadi rujukan. Pada negara-negara tersebut periode produk padat karya dari barang ekspor

bertahan selama 10 sd 15 tahun hingga akhir tahun 1970 an. Periode selanjutnya tahun 1980 an hanya ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi antara 8 sd 10 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.9. Observasi Terakhir

Membicarakan alternatif strategi industrialisasi fokus pembahasan dititikberatkan pada orientasi perdagangan dari berbagai strategi dimaksud. Disatu sisi kriteria yang digunakan adalah besarnya alokasi sumberdaya alam seperti kriteria perolehan pendapatan. Strategi efisiensi produk dapat digunakan secara bersama antara promosi ekspor dan subsidi impor. Kriteria efisiensi dapat dilihat pada dampak terjadinya distribusi pendapatan dari tenaga kerja.

Dapat disimpulkan dari diskusi di atas dengan menggunakan harga yang tepat merupakan persyaratan yang penting dalam menciptakan efisiensi dan industry padat karya, sedang faktor lainnya adalah peran pemerintah, kondisi politik, dan prospek pasar. Jika faktor-faktor tersebut dikombinasikan bersamaan, maka capaian peningkatan ekspor dapat diraih.

DAFTAR PUSTAKA

- Poot Huib dkk., 1992. *Industrialization and Trade in Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Balassa, B., 1978. *Exports and Economic Growth; Further Evidence*". *Journal of Development Economics*, Vol. 5, No 2, June pp. 181-189
- Chennery, H.B., and M. Syrquin., 1975. *Patterns of Development, 1960-1970*. Oxford University Press, London.

- Thee Kian Wie., 1996. *Industrialisasi di Indonesia*. Beberapa Kajian, PT. Pustaka LP3ES. Indonesia.
- Tambunan Tulus, 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.



ANALISIS POTENSI DAN PEMANFAATAN LAHAN APL DAN HGU DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DI PROVINSI GORONTALO

3.1. Pendahuluan

Investasi merupakan instrument penting dalam perekonomian sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, terbentuknya Produk Domestik Bruto (PDB) selain dipengaruhi oleh sektor konsumsi, ekspor dan impor, juga tak kalah pentingnya dipengaruhi oleh investasi sebagai komponen penting dalam keseimbangan ekonomi. Peran investasi tersebut bila dikaitkan dengan kemampuan mengolah sumber daya alam, maka akan diperhadapkan dengan sintesa kebutuhan modal dan teknologi yang cenderung kurang dimiliki oleh negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti Indonesia. Dalam menghadapi fenomena ini, maka thesis yang selalu

dikeluarkan adalah seperangkat kebijakan yang selalu bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi ke dalam negeri. Tentunya di tengah kondisi perekonomian yang semakin terbuka dan penuh persaingan, maka berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan senantiasa akan berhadapan dengan ragam kebijakan yang dikeluarkan juga oleh negara-negara lain yang juga bertujuan membuka kran investasi di negaranya misalnya kebijakan keringanan pajak, dukungan keamanan, percepatan dan kepastian perizinan, tenaga kerja yang murah, dukungan pemerintah dan masyarakat, tersedianya informasi penyediaan lahan yang akurat dan *feasible*.

Dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang masih positif Indonesia menikmati arus investasi seperti yang dirilis oleh United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa dari aspek akumulasi investasi Indonesia menempati peringkat ke-25 dari 238 negara pada tahun 2011. Porsi investasi asing di Indonesia tercatat sebesar 0,84% terhadap total investasi dunia, meski masih di bawah Singapura (2,54%), di kawasan ASEAN Indonesia sudah mengungguli negara-negara tetangga lain seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Secara umum, negara-negara berkembang mengalami peningkatan *share* akumulasi investasi. Pada saat yang sama negara-negara maju mengalami penurunan. Amerika Serikat misalnya yang pada akhir dekade tahun 1990-an sempat mencatat *share* investasi asing hampir 40%, pada tahun 2011 jumlah tersebut turun menjadi hampir 17,17%. Dengan kondisi prospek ekonomi beberapa Negara di Eropa yang

masih belum menentu, tren arus investasi seperti di atas kemungkinan masih akan berlanjut.

Semenjak Provinsi Gorontalo terbentuk 16 Februari 2001, telah terjadi perkembangan investasi yang cukup signifikan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana sampai dengan tahun 2013 jumlah PMA sebanyak 10 perusahaan dengan total investasi 1.63 triliun rupiah dan PMDN sebanyak 3 perusahaan dengan total investasi 664.3 milyar rupiah. Keberadaan investasi di daerah ini sangat dirasakan berdampak pada akselerasi kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih cukup menjanjikan di berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perindustrian dan pertambangan. Untuk itu upaya untuk mempromosikan potensi yang dimiliki terus dilakukan dengan menyediakan pelayanan prima kepada calon investor seperti dukungan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu, pembentukan *Tim Task Force* yang akan membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi perusahaan, menyediakan informasi data potensi investasi di Provinsi Gorontalo.

Salah satu yang dikeluhkan para investor apabila berkunjung ke daerah Gorontalo adalah belum tersedianya informasi lahan yang akurat dan *feasible* untuk kegiatan investasi. Di lapangan sering dijumpai adanya tanah terlantar walaupun sudah dikeluarkan izin pemanfaatannya atau ada izin pemakaian lahan yang tumpang tindih, atau informasi lahan tidak sesuai peruntukannya untuk investasi, dan lain-lain.

Untuk itu perlu dilakukan studi potensi sumber daya lahan untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk dikembangkan pada suatu bentang lahan. Selain itu untuk mengantisipasi persaingan yang kurang sehat dalam merebut pasar dan menghindari terjadinya *over product* suatu komoditi tertentu, maka sangat perlu dilakukan analisis pemanfaatan lahan sebagai salah satu bentuk informasi kepada para investor, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Analisis ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukenali kawasan yang potensial dan prospektif serta pemanfaatannya, serta upaya-upaya pembangunan yang dapat mendukung pengembangannya, agar pemerintah daerah lebih mudah mengambil kebijakan pembangunan strategis. Lebih jauh lagi kegiatan ini adalah upaya terprogram sebagai strategi dalam pembangunan daerah dengan pendekatan wilayah, guna memacu kegiatan ekonomi yang berbasis kemampuan lokal agar menjadi potensi sumber daya alam nasional dan internasional.

Pengelolaan potensi sumber daya alam daerah harus mampu meningkatkan peluang daerah untuk dijadikan target dan tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum menggambarkan kondisi geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Ketersediaan data dan informasi tentang potensi daerah dan keberadaannya menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan investasi di daerah.

Analisis pemanfaatan lahan juga diharapkan dapat membantu para calon investor menilai arah kebijakan

pemerintah sehingga memberikan kesan tentang kepastian hukum dan berusaha di Provinsi Gorontalo sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan investasinya, memilih dan memutuskan minat investasinya, kajian potensi investasi daerah serta analisa pemanfaatan lahan dilakukan dengan menampung aspirasi dan permintaan pemerintah daerah terkait dengan potensi investasi serta memperhatikan arahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dari setiap sektor atau kementerian yang terkait dengan investasi daerah.

Kajian ini diarahkan pada pengkajian pemanfaatan lahan khususnya lahan HGU dan APL yang cukup luas terbentang di Provinsi Gorontalo dan seringkali menjadi isu yang cukup kontroversial di masyarakat terutama pada pemanfaatannya untuk menggenjot investasi.

3.2. Tinjauan Pustaka

3.2.1. Konsep Region Atau Wilayah

Pendefinisian suatu wilayah bukanlah suatu hal yang mudah bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Apakah pendefinisian suatu wilayah akan dilakukan berdasarkan kesatuan daerah ekonomi, daerah administratif, maupun berdasarkan kesatuan yang bersifat historis, sampai saat ini belum dapat dianggap sebagai kriteria yang memuaskan.

Pengertian region yang digunakan dalam ekonomi regional adalah sangat luas, sepanjang di dalamnya terkandung unsur tempat atau "*space*". Itulah sebabnya Teori Ekonomi Regional sering pula dinamakan "*Spatial Economic Theory*" atau "*Space Economics*". Region dalam hal ini dapat berarti Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, maupun suatu kelompok negara seperti ASEAN. Disamping itu region dapat

pula berarti sekelompok daerah atau Provinsi yang mempunyai ciri-ciri dan keadaan yang sama yang dapat pula berarti sekelompok daerah atau provinsi yang mempunyai ciri-ciri dan keadaan yang sama yang dianalisa dan dibandingkan dengan sekelompok daerah lain yang berbeda. Sebagai contoh di Indonesia yang membagi daerahnya atas dua wilayah yaitu: Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau Wilayah Jawa dan Luar Jawa. Pada analisis yang bersifat mikro, region dapat diartikan sebagai interaksi antara sumber bahan dengan pasar (*Weberian Analysis*) atau suatu daerah pemasaran dimana permintaan terkumpul (*Loshian Approach*). Bahkan interaksi antara pinggiran kota (*Sub Urban*) dengan pusat kota (*Business District*) yang tercakup dalam analisa regional.

Dalam hal yang dimaksud dengan pembangunan wilayah (*Regional Development*) pada hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu regional yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial region tersebut serta menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku (andy, 1982). Oleh karena itu istilah region ini merupakan hal yang penting untuk didefinisikan secara tegas, terutama dalam menganalisis kegiatan ekonomi di dalam region tersebut.

Menurut Ferrox (1950), wilayah adalah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi kriteria-kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara uniternal. Selanjutnya ia membedakan wilayah atas wilayah homogeny (*Homogeneous Region*), Wilayah Nodal (Nodal atau *Polorized Region*), Wilayah Perencanaan dan Wilayah Administratif (*Planning Region*). Konsep wilayah ini lazim digunakan dalam analisis Ekonomi Regional.

- a. Konsep *Homogeneous Region* yang didefinisikan Homogeneous Region yang didefinisikan atas kesamaan karakteristik beberapa daerah. Karakteristik yang dimaksudkan disini dapat berupa pendapatan per kapita, jenis produksi utama, problem sosial, tingkat industrialisasi, dan lain-lain.
- b. Konsep *Nodal (Polorized) Region* yang lebih banyak diterapkan dengan memperhatikan tingkat keterkaitan antar masing-masing daerah. Tingkat keterkaitan tersebut biasanya diukur berdasarkan atas arus lalu lintas barang, penduduk maupun modal.
- c. Konsep *Planning Region* dimana pengelompokan lebih banyak didasarkan atas kesatuan politik atau kesatuan administrasi. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota yang bersifat otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Walaupun secara teoritis ketiga pengelompokan wilayah tersebut dapat dilakukan, namun dalam praktek, kompromi atau penggabungan sering pula dilakukan. Kebijakan tersebut penting artinya untuk menjamin penerapan konsep wilayah dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya dengan konsep wilayah yang diterapkan pada Departemen PU dan Deperindag yang pada dasarnya menganut konsep nodal region, yaitu ditentukan berdasarkan jaringan transportasi dan keterkaitan antar industri, dalam beberapa hal masih tetap melakukan kompromi guna dapat terus menjaga kesatuan daerah

administrasi seperti Provinsi. Dari uraian ini terlihat bahwa penerapan konsep wilayah secara murni jarang dapat dilakukan dalam praktek.

3.2.2. Konsep Wilayah Dalam Pengembangan Ekonomi

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 1970-an telah mengintroduksi konsep pembangunan wilayah melalui strategi perwilayahan pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan. Konsep tersebut bertujuan selain mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat yang dapat mendorong terjadinya efek penyebaran (*spread effects*) pembangunan dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah penyangga (*hinterland*). Konsep pusat pertumbuhan atau pusat pengembangan (*growth poles*) dapat melakukan penggabungan antara prinsip-prinsip “konsentrasi” dengan “desentralisasi” secara sekaligus (Alonso, 1968). Dengan demikian teori ini diharapkan sebagai salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Menurut Perroux, konsep *poles de croissance* lebih banyak menyangkut dengan konsep *economic region* daripada *geographic region*. Karena itu suatu pusat pengembangan seringkali didefinisikan sebagai suatu pusat konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang kesemuanya saling melalui hubungan input dan output dengan industri utama (*propulsive industry*).

Konsentrasi dan saling keterkaitan merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui factor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk

agglomeration economies yang dapat menunjang pertumbuhan industri-industri tersebut melalui penurunan ongkos produksi.

Secara lebih jelas, Darwent (1975) mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai perusahaan-perusahaan atau industri-industri dimana pertumbuhan atau perubahan akan dimulai dari kelompok perusahaan tersebut, sedangkan hubungan-hubungan diantara kutub-kutub tersebut dalam hal masukan dan hasil merupakan media perpindahan kekuatan-kekuatan yang dihasilkan oleh kutub-kutub pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hirchman (1958) yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi di berbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila di suatu wilayah terjadi pembangunan, maka akan terjadi daya tarik yang kuat, yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar wilayah dimana pembangunan tersebut bermula. Selanjutnya North (1970) menyatakan bahwa "Pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah terjadi karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*) dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan ke luar wilayah. Besarnya kekuatan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, ditunjukkan oleh koefisien pengganda yang dihasilkannya. Menurut teori ini sektor ekspor penting sekali peranannya dalam pembangunan daerah karena a) Secara langsung menciptakan kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi daerah; b) Menciptakan permintaan akan produksi lokal. Kegiatan ekspor memungkinkan suatu daerah untuk mengimpor barang-barang modal yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan ekonomi, memperluas pasar, meningkatkan produksi, mendorong

peningkatan investasi dan lain sebagainya. Sejuahmana upaya pusat pertumbuhan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan industry ditentukan oleh sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Richardson (1978), bila kegiatan ekonomi (industri) yang saling berkaitan dikonsentrasikan pada suatu tempat tertentu, maka pertumbuhan ekonomi dari daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan lebih cepat bila dibandingkan kalau industri tersebut dan terpecah ke seluruh pelosok daerah. Sejalan dengan itu, Marsudi Djoyodipuro (1992) menyatakan bila sasarannya untuk mencapai peningkatan produksi domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi yang optimum, maka konsentrasi investasi di beberapa lokasi yang terpilih jadi pusat pertumbuhan akan lebih efektif daripada investasi yang merata, karena lokasi-lokasi tersebut lebih baik daripada merata. Di samping itu penghematan ekstern (*external economies*) akan lebih mudah terjadi pada investasi yang terkonsentrasi pada suatu tempat daripada yang tersebar. Penentuan lokasi investasi yang dapat diharapkan akan berperan sebagai pusat pertumbuhan dalam suatu daerah mencakup penemuan tempat dimana industri tertentu yang searah dengan keuntungan komparatif daerah yang bersangkutan dapat beroperasi secara menguntungkan, yang pada gilirannya dapat memacu daerah sekitarnya secara optimal.

Selanjutnya *export base models* yang dipelopori oleh Douglas C. North (1955) dan kemudian dikembangkan oleh Tiebout (1956) mendasarkan pandangannya dari sudut teori lokasi. Kelompok ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu *region* akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh

daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap wilayah dan hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat. Ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah, strategi pembangunan harus disesuaikan dengan lokasi dimana investasi akan dikembangkan.

3.2.3. Peran Investasi dalam pengembangan wilayah

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari sedikit daerah pemekaran dengan trend kinerja ekonomi yang makin baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 10 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional. Dengan pertumbuhan rata-rata diatas 6% dan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di region Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yaitu mencapai 7,63% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 hanya sebesar 7,54%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sebagian besar disumbangkan oleh peran pemerintah sementara kontribusi investasi dan ekspor masih relative rendah. Kontribusi investasi hanya sebesar 16% dari PDRB sementara investasi pemerintah pada APBN dan APBD sebesar Rp. 4.268,2 milyar pada tahun 2010. Sedangkan realisasi investasi diperkirakan mencapai tidak lebih dari Rp. 1.000 milyar.

Provinsi Gorontalo sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik. Pelayanan masyarakat pun menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Provinsi ini baru terbentuk dan mempunyai potensi investasi baik di bidang pertanian, perikanan, pertambangan maupun

bidang industri. Untuk itu, pemerintah juga berupaya membuka daerah baru dengan mengundang investor datang dan berinvestasi di Provinsi Gorontalo.

3.2.4. Kondisi Ekonomi

Membaiknya perekonomian Gorontalo sangat dipengaruhi oleh peningkatan kinerja sektor yang membentuk struktur PDRB. Dari sisi sektoral, pada tahun 2010, PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 8.056 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK) adalah sebesar 2.917 milyar Rupiah. Struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi sektor pertanian dengan *share* mencapai 31,32% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 30,51% disusul sektor jasa sebesar 26,57% pada tahun 2009. Realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 adalah sebesar 592.932 milyar rupiah. Sementara itu, realisasi anggaran belanja Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 adalah sebanyak 567.220 milyar rupiah (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2012).

3.2.5. Perkembangan Investasi

Sejak tahun 2006-2011 realisasi investasi di Provinsi Gorontalo baik PMA maupun PMDN mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 realisasi investasi PMA sebesar US\$ 62,990,740 dengan jumlah proyek sebanyak 7 proyek, pada tahun 2007 sebesar US\$ 62,793,383; Tahun 2008 sebesar US \$ 60,030,000; tahun 2009 sebesar US \$ 54,793,062; dan pada tahun 2010 menurun menjadi US \$ 24,659,241, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi US \$ 26,483,846. Fluktuasi realisasi investasi ini disebabkan ada beberapa perusahaan

yang tidak memberikan LKPM nya sehingga tidak diperoleh data yang akurat disamping itu ada beberapa perusahaan yang mengalami pailit karena masalah internal perusahaan (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012)

Investasi Asing (PMA)

Secara kumulatif sejak tahun 2006-2011, persetujuan investasi asing di Provinsi Gorontalo mencapai 26 proyek dengan total nilai investasi mencapai US\$110,884,000,000. Jumlah persetujuan penanaman asing menurut sektor meliputi proyek di sektor primer (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) dengan jumlah persetujuan 22 proyek dengan nilai total investasi US\$ 110,882,000,000 (99.94%); 4 proyek sektor sekunder (industri makanan, tekstil, kulit, barang-barang dari kulit, dan sepatu, kayu, kertas, barang-barang dari kertas dan pencetakan, kimia dasar, barang-barang kimia dan farmasi, barang-barang dari karet dan plastik, mineral non logam, logam dasar, barang-barang dari logam, peralatan medis, optik, alat-alat pengukuran, alat-alat transportasi, dan industri lainnya) dengan total nilai investasi sebesar US\$ 63,700,000 (0,06%); sementara belum ada proyek yang bergerak di sektor tersier (0%). Sedangkan realisasi investasi PMA menurut sektor untuk tahun 2011 meliputi sebanyak 9 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US\$ 26,483,846; yang meliputi proyek di sektor primer (8 proyek; US\$ 17,825,872), sector sekunder (1 proyek; US\$ 8,657,974). (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012)

Investasi Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2006-2011 tercatat sebanyak 5 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp. 378.699.000.000,-. Jumlah persetujuan penanaman modal dalam negeri menurut sektor meliputi proyek di sektor sekunder (industri makanan, tekstil, kulit, barang-barang dari kulit, dan sepatu, kayu, kertas, barang-barang dari kertas dan pencetakan, kimia dasar, barang-barang kimia dan farmasi, barang-barang dari karet dan plastik, mineral non logam, logam dasar, barang-barang dari logam, peralatan medis, optik, alat-alat pengukuran, alat-alat transportasi, dan industri lainnya) dengan jumlah persetujuan 1 proyek dengan nilai total investasi US\$ 46,944,000,000 (8,2%); 4 proyek Sector Tersier dengan total nilai investasi sebesar US\$ 572,199,000,000 (91,8%); sementara belum ada proyek yang bergerak di sektor primer(0%). Sedangkan realisasi investasi PMDN menurut sektor untuk tahun 2011 sebanyak 2 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 56,841,088,211; yang meliputi proyek di sector tersier (2 proyek; Rp. 56,841,088,211). (BAPPEDA Provinsi Gorontalo, 2012).

3.3. Kondisi Umum Wilayah

3.3.1. Luas wilayah

Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Sebelumnya Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.215,44 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038.585 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km². Pejabat Gubernur Gorontalo yang pertama adalah Drs. Thursandi Alwi yang dilantik pada peresmian Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001. Tanggal ini selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo hingga sekarang.

Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (Enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.735,93 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.291,81 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.777,03 km².

Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kabupaten Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0.55% dari total luas wilayah Gorontalo. Di dalam pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2007 direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota.

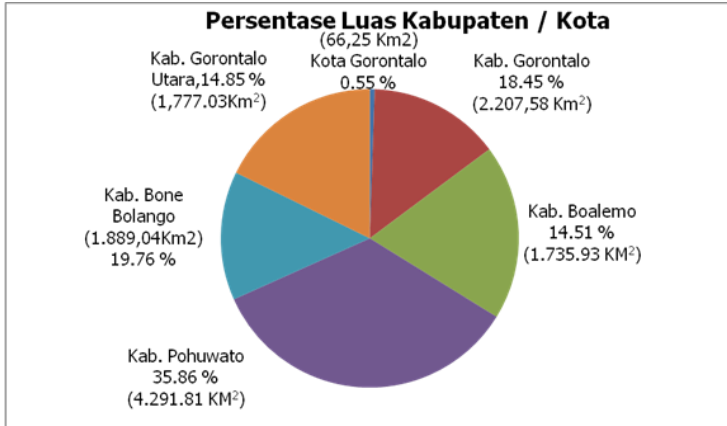
Sampai dengan September 2011, wilayah administrasi Provinsi Gorontalo mencakup 5 Kabupaten (Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato), 1 Kota (Kota Gorontalo), 75 Kecamatan, 532 Desa, dan 69 Kelurahan. Data ini terus mengalami perubahan

seiring dengan adanya proses pemekaran Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, atau Kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo.

3.3.2. Topografi

Wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).



Gambar 3. Persentase Luas Kabupaten / Kota (Sumber: Gorontalo Dalam Angka 2011)

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut. Provinsi Gorontalo juga dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan aliran 99,3 km. sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2. Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
A	0-2	123.596	10,3
B	2 – 8	69.156	5,8
C	8 – 15	61.572	5,1
D	15-40	109.041	9
E	>40	833.399	69,7
Jumlah		1.196.764	100

(Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2007)

3.3.3. Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk., 1993) menyatakan, daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batunya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut :

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari : batu pasir wake, batulanau, batu lumpur, konglomerat, tuf lapili,

aglomerat, breksi gungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokapa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.

- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokapa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari : aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas – Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batugamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, klasirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plitosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah – Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plitosen Atas – Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di gunung Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat mengangan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik).

Kegiatan tektonik di daerah ini diduga telah berlangsung sejak Eosen hingga Oligosen yang diawali dengan kegiatan magmatik yang menghasilkan satuan gabro. Masih pada Eosen terjadi pemekaran dasar samudera yang berlangsung hingga Miosen Awal dan ini menghasilkan lava bantal yang cukup luas. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh terjadinya retas – retas yang umumnya bersusun basa dan banyak menerobos Formasi Tinombo.

Pada Miosen selain terjadi pengendapan Formasi Randangan dan Formasi Dolokapa terjadi juga kegiatan magma yang menghasilkan Diorit Bone. Diduga pada waktu itu terjadi juga penunjaman dari arah utara ke arah selatan di laut Sulawesi, yang disebut sebagai Jalur Tunjaman Sulawesi Utara (Simanjuntak, 1986). Kegiatan magnetik Diorit Bone yang berlangsung sampai Miosen Tengah dilanjutkan oleh kegiatan magmatik Diorit Bolihutuo yang berlangsung hingga Miosen Akhir. Bersamaan dengan kegiatan magmatik tersebut terjadilah pengangkatan pada akhir Miosen Akhir.

Pada akhir kegiatan magmatik Diorit Bolihutuo terjadilah kegiatan gunungapi yang menghasilkan batuan Gunungapi Pani dan Breksi Wobudu. Pada waktu itu Jalur Tunjaman Sulawesi Utara diduga masih aktif dan menghasilkan sejumlah sesar geser di bagian barat daerah penyelidikan. Pada Kala Pliosen terjadi juga kegiatan magmatik yang menghasilkan batuan terobosan Granodiorit Bumbulan yang kemudian diikuti oleh kegiatan gunungapi. Kegiatan gunungapi ini berlangsung hingga Plistosen. Sementara itu retas-retas yang bersusunan basal, andesit dan dasit masih terbentuk.

Pada akhir Pliosen hingga Plistosen di daerah ini terdapat pengendapan yang membentuk satuan Batugamping

Klastik pada laut dangkal. Sedangkan pada Pliosten Awal terbentuk endapan danau dan endapan sungai tua. Ketiga satuan tersebut telah mengalami pengangkatan pada sekitar akhir Plistosen. Pada akhir Plistosen hingga sekarang terjadi proses pendataran serta kegiatan tektonik yang masih aktif. Proses pendataran menghasilkan endapan aluvium sedangkan kegiatan tektonik menghasilkan beberapa sesar geser dibagian timur serta mengakibatkan terangkatnya satuan Batugamping Terumbu.

3.3.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari tahun 2007-2011 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dimana tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo berada pada kisaran angka 7,51%, yang kemudian naik menjadi 7,76% tahun 2008. Selanjutnya tahun 2009 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu 7,54%, dan pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan mencapai 7,63%. Kemudian tahun 2011 meningkat 0.05% atau mencapai 7,68%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir ini terutama dipicu oleh bertambahnya infrastruktur dasar dari pemerintah, daya beli masyarakat mulai meningkat yang diperlihatkan dengan kenaikan PDRB baik ADHK maupun ADHB serta pendapatan perkapita yang diikuti dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan, demikian pula infrastruktur perdagangan dari sektor swasta juga mulai tumbuh. Bertambahnya infrastruktur tersebut tadi setidaknya merupakan dampak dari pemerataan wilayah administrasi pemerintah dan terselenggaranya even-even internasional seperti seminar jagung internasional 2013, Pospenas 2013 dan

Hari Pangan Sedunia (HPS) di Provinsi Gorontalo tahun 2011.

Pertumbuhan infrastruktur dasar, daya beli masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan infrastruktur perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pengembangan ekonomi Provinsi Gorontalo lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi Provinsi Gorontalo di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi yang baru, yaitu pembangunan infrastruktur di tiap Kabupaten/Kota yang lebih mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai.

3.4. Kependudukan

3.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2010 sebanyak 1.040.164 jiwa. Dari tabel di bawah ini bisa dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2010 penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 34.22% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2006-2010

No	Wilayah Administrasi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kabupaten Gorontalo	431.440	338.381	339.620	340.730	355.988
2	Kabupaten Boalemo	118.947	123.243	127.639	128.540	129.253
3	Kabupaten Pohuwato	110.481	112.532	114.572	116.203	128.748
4	Kabupaten Bone Bolango	127.977	129.025	130.025	131.781	141.915
5	Kab. Gorontalo Utara	-	94.829	95.177	96.489	104.133
6	Kota Gorontalo	159.455	162.325	165.175	170.209	180.127
Provinsi Gorontalo		948.3	960.335	972.208	983.952	1.040.164

(Sumber: Gorontalo Dalam Angka 2011)

Jika dibandingkan dengan luas wilayah. Kota Gorontalo hanya punya wilayah seluas 66.25 Km² namun memiliki penduduk cukup besar. Hal ini menunjukkan, Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Gorontalo	178.088	177.900	355.988	100,10
2	Boalemo	65.867	63.386	129.253	103,91
3	Pohuwato	65.561	63.187	128.748	103,76
4	Bone Bolango	71.145	70.770	141.915	100,53
5	Gorontalo Utara	52.970	51.163	104.133	103,53
6	Kota Gorontalo	88.283	91.844	180.127	96,12
Provinsi Gorontalo		521.914	518.250	1.040.164	100,71

Sumber : Gorontalo dalam angka 2011

Tabel diatas menunjukkan penduduk Provinsi Gorontalo lebih banyak laki-laknya dengan sex rasion 100.74 artinya laki-laki di Gorontalo lebih banyak 0,71% dibanding jumlah perempuan. Sedangkan untuk kabupaten/kota bisa dilihat bahwa Kabupaten Boalemo yang memiliki sex ratio sebesar 104 yang menunjukkan jumlah laki-laki di Kabupaten Boalemo lebih 4% dibanding perempuan.

3.4.2. Pertumbuhan penduduk

Pada tabel di bawah ini laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo di tahun 2010 sebesar 2,28% dengan pertumbuhan terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo sebesar 3.62% dan urutan di bawahnya adalah Kabupaten Pohuwato sebesar 3,25%. Hal ini disebabkan di kedua Kabupaten tersebut menjadi wilayah transmigran di Provinsi Gorontalo. Sementara Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang sedikit berkontribusi terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu hanya sebesar 1,40%.

Kondisi ini dikarenakan makin terbatasnya lahan garapan yang ada. Sedangkan Kota Gorontalo mempunyai luas wilayah yang kecil dan paling padat penduduknya di antara semua wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2,93%.

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan
		2000	2010	2000-2010
1	Gorontalo	309.663	355.988	1,40
2	Boalemo	90.538	129.253	3,62
3	Pohuwato	93.505	128.748	3,25
4	Bone Bolango	114.766	141.915	2,15

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan
		2000	2010	2000-2010
5	Gorontalo Utara	86.781	104.133	1,84
6	Kota Gorontalo	134.931	180.127	2,93
	Provinsi Gorontalo	830.184	1.040.164	2,28

(Sumber: Gorontalo Dalam Angka 2011)

3.4.3. Tenaga kerja

Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo tahun 2011 menunjukkan, dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebesar 725.243 yang merupakan angkatan kerja sebesar 465.027 atau sebesar 64,12%. Dari jumlah tersebut yang sedang bekerja sebesar 445.210 atau 95,74 persen dan yang menganggur sebesar 19.817 atau 4,26%. Sementara yang bukan merupakan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga, bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah) sebanyak 260.216 atau 35,58% dengan jumlah terbanyak pada yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 171.805 atau 66,02% dan bersekolah sebanyak 33.142 atau 12,74 persen dan lain-lain (yang bukan mengurus rumah tangga dan bersekolah) sebanyak 55.270 atau 21,24%.

3.4.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebesar 64,12%. Posisi angkatan tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 64,42%. sementara itu jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang. Atau 4,26% dari jumlah angkatan kerjanya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3.756 orang dari Agustus tahun 2010. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi

Gorontalo selama tiga tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu di tahun 2009 sebesar 5,89%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,16% di Tahun 2010 pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,26%.

Tabel 6. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama		2008	2009	2010	2011
I	Angkatan Kerja	429.384	447.313	456.499	465.027
	1. Bekerja	405.126	420.962	432.926	445.210
	2. Menganggur	24.258	26.351	23.573	19.817
II	Bukan Angkatan Kerja	258.697	254.182	252.182	260.216
	1. Sekolah	58.748	62.316	57.980	33.142
	2. Mengurus rumah Tangga	165.379	161.296	159.541	171.804
	3. Lainnya	34.570	30.570	34.661	55.270
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		62,40	63,77	64,42	64,12
Tingkat Pengangguran		5,65	5,89	5,16	4,26

(Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2012)

Dari tabel sebelumnya ini dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja berjumlah 405.126 dan pada tahun 2009 berubah menjadi 420.962 mengalami peningkatan sejumlah 15.836 atau sebesar 3,90%.

Sedangkan pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja berada pada angka 432.926 meningkat sebesar 11.964 atau 2,84% dari jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara sektor yang menjadi primadona dengan meraup tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang pada tahun 2010 mencapai 176.974, disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 81.322 ditempat ketiga sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar

71.243. sedangkan sektor yang paling sedikit meraup tenaga kerja pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, gas dan air minum sebesar 679 yang disusul sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewahan dan jasa perusahaan.

Sementara ditahun 2011 sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mengakomodasi jumlah tenaga kerja terbesar yaitu sejumlah 158.973, diikuti sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 91.393 dan sektor lainnya yang merupakan akumulasi dari sektor Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 84.978.

3.5. Pemerintahan

3.5.1. Administrasi Wilayah

Provinsi Gorontalo terbagi dalam lima kabupaten dan satu kota. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Provinsi Gorontalo terdiri dari 75 kecamatan dan 637 desa/kelurahan. Adapun sebaran kecamatan berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kabupaten Boalemo	7	84
2	Kabupaten Bone Bolango	17	156
3	Kabupaten Gorontalo	18	205
4	Kabupaten Gorontalo	11	60

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
	Utara		
5	Kabupaten Pohnuato	13	82
6	Kota Gorontalo	9	50
Total Provinsi Gorontalo		75	637

(Sumber: Data utama hasil olahan 2013)

Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Gorontalo. Sampai dengan tahun 2011 telah menjadi penyesuaian data wilayah administrasi sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Dasar Hukum	Luas (Km ²)	Persentase
Kabupaten Boalemo	Tilamuta	UU. No. 50 Tahun 1999	1.735,93	14,51%
Kabupaten Bone Bolango	Suwawa	UU. No.6 Tahun 2003	1.889,04	19,76%
Kabupaten Gorontalo	Limboto	UU. No.29 Tahun 1959	2.207,58	18,45%
Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang	UU. No.11 Tahun 2007	1.777,03	14,85%
Kabupaten Pohnuato	Marisa	UU.No.6 Tahun 2003	4.291,81	35,86%
Kota Gorontalo	Gorontalo	UU.No.38 Tahun 2000	66.25	0,55%

(Sumber: data utama hasil olahan 2013)

3.5.2. Aparat pemerintah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Gorontalo berjumlah 3.113 orang. Sebagian besar didominasi oleh pegawai negeri yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 38,58%, sedangkan pendidikan tertinggi yaitu S3 hanya sebesar 0.19 persen atau hanya 6 orang.

3.5.3. Partai politik

Jumlah anggota legislatif yang ada di Provinsi Gorontalo tahun 2010 berjumlah 45 orang, terdiri dari 13 orang dari Partai Golkar, 5 orang dari PPP, 5 orang dari Hanura, 4 orang dari Demokrat, dan 5 orang dari PAN. Untuk PDI-P, PBB, dan PKS masing-masing 3 orang. Sedangkan Gerindra, PPRN, PKNU dan PDK masing-masing 1 orang.

3.6. Potensi Sumberdaya Alam

Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, serta pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan.

3.6.1. Potensi Pertanian

Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 11.967,64 Km² atau 1.196.764 Ha, dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 27.520 Ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 22.015 Ha dan sawah non irigasi seluas 7.551 Ha. Juga terdapat lahan bukan sawah seluas 558.840 Ha, ladang/huma 74.466 Ha, lahan yang sementara tidak digunakan 95.871 Ha, lainnya perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/empang, dan lain-lain seluas 237.343 Ha.

Sektor pertanian menjadi leading sector pengembangan ekonomi lokal karena tenaga kerja dan kontribusi PDRB masih sangat dominan. Dari aspek sumber daya lahan, Provinsi Gorontalo memiliki potensi luas areal sawah sekitar 27.520 Ha. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 12.942 Ha (47%), kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 4.603 Ha (17%), Kabupaten Boalemo 4.537 Ha (16%), Kabupaten Pohuwato 2.681 Ha (10%), Kabupaten Bone Bolango 1.841 Ha (7%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%)

Luas lahan kering yang dapat diusahakan untuk pengembangan komoditas pangan lainnya dan hortikultura seluruhnya seluas 284.822 Ha. Dimana tingkat penggunaannya di Kabupaten Gorontalo telah mencapai 79.531 Ha (28%), Kabupaten Pohuwato 71.791 Ha (25%), Kabupaten Boalemo 61.827 Ha (22%), Kabupaten Gorontalo Utara 46.898 Ha (16%), Kabupaten Bone Bolango 22.357 Ha (8%) serta Kota Gorontalo 2.418 Ha (1%)

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo terdiri atas 7 (tujuh) komoditi yaitu Padi (padi sawah dan ladang), Jagung Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Tabel di atas menunjukkan rata – rata

peningkatan produksi padi sawah selang 2007 – 2011 pertahunnya meningkat 6.98 %. Pada periode yang sama produksi jagung meningkat 5.37%, sedangkan komoditi lainnya (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) mengalami penurunan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki luas tanam padi yang terbesar yaitu 24.388 Ha dengan produksi 117.377 ton/ha dan terkecil Kota Gorontalo dengan luas 2.024 dengan produksi 12.024 ton/ha. Selanjutnya untuk luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung, Kabupaten Pohuwato berada diperingkat tertinggi, yaitu 326.142 ton/ha, Kabupaten Boalemo yaitu 140.653 ton/ha, Kabupaten Gorontalo 96.563 ton/ha, Kabupaten Gorontalo Utara 21.698 ton/ha, Kabupaten Bone Bolango 20.420 ton/ha dan yang terakhir Kota Gorontalo dengan produksi 303 ton/ha.

Komoditas lain yang terdapat di Provinsi Gorontalo adalah kedelai akan tetapi komoditas kedelai belum berkembang karena luas arealnya relatif terbatas kecuali Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Dan luas tanam lebih terbesar ada di wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu 1.799 ha dengan produksi 1.870 ton/ha. Selain komoditas tersebut di atas Gorontalo memiliki potensi hasil perkebunan. Saat ini luas areal perkebunan 360.376 ha dan luas perkebunan yang termanfaatkan 118.063 ha. Peluang inventasi masih terbuka di perkebunan 242.313 ha. Komoditas perkebunan yang dominan adalah Kelapa dengan luas areal 68.248 ha, Kakao 12.483 ha, Cengkeh 8.280 ha dan tebu 7.818 ha.

Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Terjadinya peningkatan produksi tanam kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar 62.338 ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 ton menjadi 901 ton pada tahun 2012.

Untuk peternakan yang prioritas adalah ternak sapi, saat ini jumlah populasi sapi 192.066 ekor sementara produksi daging sapi 3.984.995 kg/th. Selain sapi, Provinsi Gorontalo memiliki jenis ternak yang dikembangkan, antara lain kambing, babi, kuda, ayam kampung (buras), ayam ras (pedaging dan petelur), itik. Untuk tahun 2011 populasi ternak ayam kampung 964.000 ekor, ternak ayam petelur 132.000 ekor, ternak ayam pedaging 240.000 ekor dan ternak itik berjumlah 56.907 ekor.

Peran penyuluh tidak bisa diabaikan dalam suksesnya program. Penyuluh pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, perikanan dan kehutanan, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan para petani-nelayan beserta keluarganya. Pekerjaan seorang penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi membimbing dan mendorong para petani, nelayan mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha tani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera.

Keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mendapat kontribusi dari tugas penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, peternak, dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di

Gorontalo saat ini berjumlah 618 orang yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, yang terdiri dari 518 orang penyuluh perikanan dan 32 orang penyuluh kehutanan.

Dilihat dari jumlah desa yang ada di Gorontalo maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu peningkatan mutu penyuluhan melalui : perbaikan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan SDM Penyuluh, pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, penguatan kelembagaan penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, peningkatan kesejahteraan penyuluh serta lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah.

Dengan memperhatikan Indeks pertanaman padi sawah masih $< 200 \pm 2.404$ ha atau 8.13 %, sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi padi sawah bilamana dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami lebih dari dua kali ($IP > 200$). Demikian halnya dengan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 1.936 ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi ladang maupun komoditi pertanian lainnya. Di samping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana program pembangunan pertanian menunjukkan

kinerja positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada prinsipnya, Nilai Tukar Petani ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (dalam persentase). Dari sisi kegunaannya NTP merupakan instrumen untuk melihat tingkat kemampuannya atau daya beli petani di pedesaan, disisi lain, NTP juga menunjukkan daya tukar (tern of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Karena itu, semakin tinggi NTP, secara relatif menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Sedangkan, kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktifitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang bisa terancam kelestariannya.

NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga output pertanian, harga input pertanian, harga output sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga input sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga – harga diatas dengan tujuan yang sangat luas. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuk nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan di sektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar.

Berdasarkan hasil analisis data, pada periode Januari 2008 – Februari 2012, NTT Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Spetember 2008 sebesar 108,43 dan NTP terendah terjadi pada bulan Februari 2008 sebesar 94,28. Melihat matriks di atas, sejak Mei 2009 NTP Provinsi Gorontalo menunjukkan grafik kenaikan. Kondisi ini harus dipertahankan, karena itu, butuh berbagai intervensi Pemerintah Daerah sehingga NTP Gorontalo bisa mencapai kembali posisi pada September 2008.

Jika diamati lebih jauh, khusus untuk sektor pertanian, terdapat 5 sub sektor yang memberi pengaruh NTP Gorontalo yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan subsektor perikanan serta hortikultura. Posisi bulan Februari 2012, 4 (empat) sub sektor pertama mengalami penurunan dibanding bulan Januari 2012, masing-masing subsektor tersebut berturut-turut sebesar 1,26 persen, 0,34 persen, 0,44 persen dan 0,21 persen sedangkan subsektor terakhir yaitu hortikultura mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen.

Tabel 9. Perbandingan NTP per sektor Januari-Februari 2012

Sub sektor	Bulan		Kenaikan/Penurunan
	Januari	Februari	
Tanaman pangan	95,29	94,09	-1,26
Hortikultura	108,05	109,12	0,99
Tanaman perkebunan	130,20	129,76	-0,34
Peternakan	92,77	92,36	-0,44
Perikanan	105,76	105,54	-0,21

(Sumber: Badan statistik, 2012)

Melihat realitas di atas, butuh upaya yang lebih keras lagi melalui berbagai intervensi khususnya di sektor pertanian. Ada 2 (dua) aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu dari sisi indeks yang diterima petani dan dari sisi indeks yang dibayarkan petani. Indeks yang diterima petani berarti produksi dan produktifitas sektor pertanian harus ditingkatkan, sedangkan aspek yang kedua intervensinya melalui jalur perdagangan barang dan jasa melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

3.6.2. Potensi Perikanan

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapannya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun.

Dari potensi tersebut, realisasi capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap, maupun produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan rata – rata per tahun sebesar 12.34 % atau mengalami kenaikan produksi dari 120.962 ton pada tahun 2007 naik menjadi 206.227 ton pada tahun 2011.

Untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo terhadap bahan pangan cukup tinggi yaitu dari 33 kg/kapita pada tahun 2007 naik menjadi 46,93 kg/kapita pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 8,39 % pertahunnya. Jika ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi ikan minimum secara

nasional atau berdasarkan sasaran nasional pada tahun 2011, maka tingkat konsumsi ikan Gorontalo melebihi dari target konsumsi ikan nasional, dimana target nasional hanya menargetkan 31,57 kg/kapita/tahun.

Tabel 10. Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011
(Kg/kapita/tahun)

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Produksi Ikan x 100% Target Daerah
2007	35,3	3	94,29
2008	37,3	7	100
2009	39,4	1	105,13
2010	40,29	44,94	111,54
2011	41,91	46,93	111,98

(Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011)

Jumlah kelompok nelayan dan pembudidayaan yang diintervensi oleh bantuan Pemerintah Provinsi, khususnya bantuan perikanan dan kelautan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2007 jumlah kelompok yang diintervensi oleh bantuan perikanan dan kelautan hanya 211 kelompok dan pada tahun 2011 naik menjadi 415 kelompok seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Jumlah Kelompok Pembudidaya dan Jumlah Nelayan Penerima Bantuan

Tahun	Jumlah kelompok pembudidaya	Jumlah kelompok nelayan	Total kelompok
2007	73	138	211
2008	60	214	274
2009	50	272	322
2010	85	285	370
2011	128	287	415

(Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011)

Seiring dengan meningkatnya intervensi bantuan sarana produksi perikanan yang telah diterima oleh kelompok perikanan baik oleh nelayan maupun pembudidaya dari tahun 2007 – 2011, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Dimana pada tahun 2007, kontribusi produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok perikanan hanya sebesar 17,58 % dan pada tahun 2011 naik menjadi 26.82 %.

Tabel 12. Produksi Perikanan di Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2011

Tahun	Jumlah Produksi Ikan kelompok pembudidaya dan nelayan (ton)	Total Jumlah Produksi Perikanan Gorontalo (tangkap dan budidaya) (ton)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan kelompok} \times 100\%}{\text{Produksi Perikanan Gorontalo}}$
2007	21.259	120.962	17,58
2008	25.686	141.721	18,12
2009	29.713	152.370	19,50
2010	40.786	165.984	24,57
2011	55.303	206.227	26,82

Sumber: Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011

Produksi perikanan di Provinsi Gorontalo, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain untuk produksi perikanan tangkap dipengaruhi selain masalah musim juga dipengaruhi oleh Kenaikan harga bahan bakar minyak, dimana sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap. Produksi perikanan tangkap juga

dipengaruhi sarana produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan / bibit rumput laut, harga pakan dan pupuk serta sarana produksi lainnya.

Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Luas perairan mencapai 50.500 km² yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km², laut Sulawesi 3.100 km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km² serta panjang garis pantai 655.8 Km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 217.7 Km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 438.1 Km. potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan.

Untuk sektor perikanan, melalui program utamanya Pengembangan Sumber daya Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Hasil Perikanan, Pengawasan SDKP serta Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapkan akan memenuhi target RPJMD 2007-2012 sebesar 70.000-100.000 ton untuk perikanan tangkap dan untuk perikanan budidaya sebesar 50.000-70.000 ton. Hal ini juga dibarengi dengan perbaikan kinerja sektor perikanan dimana pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap mencapai 72.325 ton atau naik sebesar 46,81 persen jika dibandingkan produksi tahun 2006 yang hanya mencapai 49,263 ton. Demikian halnya dengan produksi perikanan budidaya pada tahun 2010 mencapai 93.659 ton atau naik 41.24 persen jika dibandingkan tahun 2006 yang hanya sekitar 66.311 ton. Peningkatan produksi perikanan ini turut serta memperbaiki pendapatan nelayan dari Rp. 897.942 ditahun 2006 menjadi Rp. 1.759.596 di tahun 2010 atau meningkat 95,96 persen.

Potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan jika saja aktivitas illegal fishing yang terjadi baik di sekitar Teluk Tomini maupun di pantai utara provinsi ini bisa diberantas. Potensi perikanan budidaya mencakup budidaya laut, air payau dan air tawar. Produksi budidaya laut sebesar 275.280 ton per tahun dengan luas area 25.050 dan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4.738, produksi budidaya air payau produksi 59.770 ton dengan luas area 10.900 dan tingkat pemanfaatan mencapai 3.136 dan produksi budidaya air tawar sebesar 4.218 ton per tahun dengan luas area 1.000 Ha dan tingkat pemanfaatan mencapai 460 Ha.

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Gorontalo tahun 2010 adalah sebanyak 8.316 rumah tangga, atau meningkat 0,43 persen dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 8.280 rumah tangga. Menurut jenisnya, perikanan dibedakan menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Sebagian besar produksi perikanan dihasilkan oleh perikanan darat dengan cara budidaya. Produksi budidaya perikanan sebesar 93.658,52 ton atau sebesar 60,16 persen dari keseluruhan produksi ikan di tahun 2010 yaitu sebesar 155.700 ton

3.6.3. Potensi Kehutanan

Sektor kehutanan memegang peranan penting dalam akselerasi pembangunan di Propinsi Gorontalo. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Propinsi Gorontalo, luas kawasan hutan di Propinsi Gorontalo mencapai 824.668 ha. Adapun luas hutan berdasarkan wilayah administrasi dan fungsinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo

Fungsi	Luas (ribu Ha)	Prosentase (%)
HK	196.653	23,85
HL	204.604	24,81
HP	251.097	30,45
HPT	89.878	10,89
HPK	82.431,9	10,00
Total	824.668	100

(Sumber: SK 325/Menhut-II/2010)

Berdasarkan data pada tabel di atas luas fungsi hutan terbesar adalah hutan produksi tetap (HP) yakni 251.097 ha atau sekitar 30,45% dari seluruh total kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah yang memiliki luas hutan produksi terbesar yakni 41,507 ha (BPKH XV, 2012).

Meskipun memiliki potensi hutan yang cukup luas, secara fisik terdapat beberapa kawasan hutan yang sudah tidak berhutan lagi. Hasil analisa citra landsat tahun 2010 yang dilakukan oleh pihak BPKH XV luas kawasan hutan yang sudah tidak berhutan mencapai 55.674,52 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan produksi terbatas (HPT) merupakan wilayah yang kawasan hutan yang memiliki luas vegetasi yang rendah yaitu 28003,38 ha. Adapun luas kawasan hutan yang tidak berhutan diseluruh wilayah administrasi Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya

Tabel 14. Kawasan hutan yang berhutan dan tidak berhutan berdasarkan fungsinya

Fungsi	Berhutan (ha)	Tidak Berhutan (ha)
HK	51647,72	4294,76
HL	194662,75	8462,26
HP	48729,35	8431,53
HPT	168087,77	28003,38
HPK	6482,59	6482,59
Total	469610,18	55674,52

Sumber: BPKH XV (2012)

Kawasan hutan yang tidak berhutan umumnya ditumbuhi dengan alang-alang, tanaman semusim dan belukar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan degradasi lahan hutan semakin meningkat. Degradasi hutan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan lahan kritis. Berdasarkan data dari BP-DAS Bone Bolango, luas lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan hutan mencapai 63.629 ha sedangkan di luar kawasan hutan lebih besar lagi yaitu 143.205 ha. Namun demikian wilayah lahan agak kritis terbesar terdapat di dalam kawasan hutan yang mencapai 407.200 ha. Secara umum lahan kritis diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, serta pembukaan lahan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan seperti kebun-kebun masyarakat dan lain sebagainya. Situasi ini mereflesikan kebutuhan untuk pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan. Adapun luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel 15. Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

	Tingkat Kekritisan	Dalam Kawasan (Ha)	Luar Kawasan Hutan (Ha)
1	Agak Kritis	407.200	162.965
2	Kritis	63.269	143.205
3	Potensial Kritis	338.844	31.540
4	Sangat Kritis	58.414	14.944
5	Tidak kritis	6.262	8.486
	Jumlah	873.990	361.136

Sumber: BP-DAS Bone Bolango (2012)

3.6.4. Potensi Pertambangan dan Energi

Di bidang pertambangan potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas dengan potensi sebesar 218.133.132.151,07 ton. Perak dengan potensi 217.463.591,87 ton. Tembaga dengan potensi 217.976.091.224,87 ton, batu andesit dengan potensi 2.506.000,00 ton, batu granit dengan potensi 888. 500.000 ton, batu dasit dengan potensi 1.776.125.000 ton, batu basal dengan potensi 1.000.000.000 ton. Batu gamping dengan potensi 19.948.748.500, feldspar dengan potensi 2.500.000 ton. Lempung dengan potensi 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu dengan potensi 282.250.000 ton, marmer dengan potensi 18.869.96 ton, dan toseki dengan potensi 51.247.568.62 ton. Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Gorontalo. Secara geologis, potensi bahan tambang Provinsi Gorontalo terbesar di seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 16. Jenis Mineral dan Besaran Volume

No.	Jenis Mineral	Volume (ton)
1	Emas	218.133.132.151,07
2	Perak	217.463.591.225,87
3	Tembaga	217.976.091.224,87
4	Andesit	2.506.000
5	Batu granit	888.500.000
6	Batu dasit	1.776.125.000
7	Batu basal	1.000.000.000
8	Batu gamping	19.948.748.500
9	Feldspar	2.500.000
10	Lempung	750.000.000
11	Pasir/batu/sirtu	282.250.000
12	Marmer	18.869.96
13	Toseki	51.247.568.62

(Sumber: Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi)

1. Kelistrikan

Kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430.69 MW dan beban puncak 266.40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini sebesar 89.56 MW dan daya mampu 59.20 MW dan beban puncak 56.13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129.270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92.46 %. Pertumbuhan rata – rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8.6 s/d 10 %.

Ratio elektrifikasi saat ini sebesar 69.97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 10700.6 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk

sebanyak 4 buah. Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65.4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175.4 MW dan yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3.5 MW.

Sedangkan potensi panas bumi Suwawa 110 MWe telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperatur 70⁰C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperatur 50⁰C, Kecamatan Botumoito dengan temperatur 42⁰C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperatur 62⁰C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65⁰C. dengan total sumber daya diperkirakan sebesar 160⁰ (MWe).

Selain memiliki sumber daya energi, Gorontalo juga memiliki beberapa sumber daya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logal, non logam dan batuan. Bahan mineral pengikutnya serta bahan mineral non logam terdiri dari batu andesit, granit, basal, batu gamping, feldspar, lempung, pasir, batu dan sirtu, marmer, dan toseki. Saat ini jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 39 buah terdiri dari kontrak karya 2 buah dan IUP 37 buah. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral lebih dititik beratkan pada

tertib administrasi perizinan serta pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan

3.7. Kondisi Wilayah Areal Penggunaan Lain

Selain kawasan hutan, Provinsi Gorontalo memiliki kawasan untuk kepentingan budidaya, pemukiman atau pembangunan di luar sektor kehutanan. Wilayah tersebut adalah areal penggunaan lain (APL). Penggunaan dan pemanfaatan APL sangat dinamis dibandingkan dengan kawasan hutan. Dalam struktur ruang RTRW, wilayah APL diarahkan untuk membangun berbagai fasilitas publik dan menjadi pusat wilayah pertumbuhan. Di Lokasi APL bisa dibangun infrastruktur seperti pabrik, jalan, pemukiman bahkan untuk perkebunan skala besar. Berikut ini disajikan luas APL untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo

Tabel 17. Luas APL setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten	Luas (ha)
1	Kabupaten Gorontalo	111.347,51
2	Kabupaten Boalemo	78.236,68
3	Kabupaten Pohuwato	117.741,60
4	Kabupaten Bone Bolango	49.237,93
5	Kabupaten Gorontalo Utara	52.662,69
6	Kota Gorontalo	6.152,95
Jumlah		429.568,85

(Sumber: hasil analisis spatial 2013)

Berdasarkan data di atas terlihat total kawasan APL di Provinsi Gorontalo mencapai 429.568 ha atau sekitar 50% dari total kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. Luas APL terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato yang mencapai 120.379,78 dan terkecil terdapat di wilayah Kota Gorontalo yang mencapai luas 6.311,03 ha.

3.7.1. Kemiringan Lereng

Lereng adalah Kenampakan permukaan alam disebabkan adanya beda tinggi apabila beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan dengan jarak lurus mendatar sehingga akan diperoleh besarnya kelerengan (slope). Bentuk Lereng tergantung pada proses erosi juga gerakan tanah dan pelapukan. Lereng merupakan parameter topografi yang terbagi dalam dua bagian yaitu kemiringan lereng dan beda tinggi relative, dimana kedua bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap penilaian suatu lahan kritis, bila dimana suatu lahan yang dapat merusak lahan secara fisik, kimia, dan biologi ,sehingga akan membahayakan hidrologi produksi pertanian dan pemukiman. Salah satunya dengan membuat Peta Kemiringan Lereng (Peta Kelas Lereng). Dengan pendekatan rumus “Went-Worth” yaitu pada peta topografi yang menjadi dasar pembuatan peta kemiringan lereng dengan dibuat grid atau jaring-jaring berukuran 1 cm kemudian masing-masing bujur sangkarr dibuat garis horizontal. Dengan mengetahui jumlah konturnya dan perbedaan tinggi kontur yang memotong garis horizontal tersebut, dapat ditentukan kemiringan atau sudut lereng

Suatu daerah dapat diukur ketinggiannya atau dapat diklasifikasikan kemiringan lerengnya dengan melihat jumlah garis yang terpotong dalam grid-grid yang telah dibuat.

Kemudian hasilnya dihitung dan dapat di masukkan kedalam aturan hasil perhitungan kemiringan lereng. Sehingga dapat diperoleh hasil mengenai pengklasifikasian kemiringan lereng pada suatu daerah. Dalam mengukur kemiringan lereng dapat dilakukan dengan cara: Metode Blong (1972), Metode Wentworth, Metode Lingkaran dan Menggunakan kompas geologi Kelas Kemiringan Lereng antara lain:

Tabel 18. Kelas lereng

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Klasifikasi
Kelas I	< 8	Datar
Kelas II	8 – 15	Landai
Kelas III	15 – 25	Agak curam
Kelas IV	25 – 40	Curam
Kelas V	> 40	Sangat curam

(Sumber: *Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah*, 1986)

Berdasarkan hasil analisa spasial umumnya wilayah APL memiliki lereng yang datar yaitu seluas 250.028,9 ha atau 58,36% dari seluruh total APL. Sedangkan untuk lereng sangat curam mencapai luas 2.129,67 ha atau hanya sekitar 4,9% dari total kawasan APL. Wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah yang datar paling luas dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang mempunyai lereng yang curam paling luas dengan luas wilayah mencapai 1237 ha. Hal ini wajar karena hampir 70% wilayah Kabupaten Bone Bolango merupakan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Adapun tingkat ketererangan di wilayah APL dan sebarannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 19. Tingkat Kelerengan di Wilayah APL

Kabupaten/ Kota	Tingkat Kelerengan					Jumlah
	0 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Boalemo	50841,96	17288,55	8397,92	2421,35	116,96	79066,74
Bone Bolango	15540,46	10106,93	13665,13	8885,41	1237,00	49434,92
Gorontalo	71402,79	20415,09	16519,46	5561,74	28,50	113927,57
Gorontalo Utara	24734,07	14442,99	13975,7	5808,39	515,35	59476,51
Kotamadya	3776,85	753,98	1270,56	496,58		6297,97
Pohuwato	83732,8	25024,46	8642,15	2603,98	231,86	120235,26
Grand Total	250028,9	88032	62470,92	25777,46	2129,67	428438,97

(Sumber: hasil analisis spatial, 2013)

Kartasapoetra (2005). Menjelaskan Kemiringan lahan merupakan faktor yang sangat perlu untuk di perhatikan sejak dari penyiapan lahan pertanian, usaha penanamannya, pengambilan produk-produk serta pengawetan lahan tersebut. Karena lahan memiliki kemiringan lereng itu dapat dikatakan akan lebih mudah terganggu atau rusak. Lebih-lebih kalau derajat kemiringannya besar tanah yang memiliki kemiringan rentan terhadap pengaruh hujan. Akibat pengaruh hujan-hujan tersebut tanah mudah mengalami kelongsoran dan hanyutnya lapisan tanah yang subur (humus). Kartasapoetra (2006 : 37) di jelaskan mengenai tipe kemiringan lereng yang dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama hujan sebagai berikut:

a) Kemiringan Lahan 0-8%

Lahan dengan lereng 0-8% adalah lahan yang datar yang memiliki kedalaman efektif yang bisa mencapai 5 meter. Kedalaman efektif sangat penting untuk sistem perakaran tanaman. Umumnya wilayah-wilayah dengan kelerengan antara 0-8% adalah wilayah pertanian, perkebunan dan pemukiman. Wilayah ini mengalami pengikisan tanah yang rendah, aliran permukaan yang rendah dan infiltrasi yang

lambat. Produktivitas lahan pada lereng 0-8% lebih baik jika dibandingkan dengan lereng yang lebih dari 8%, karena kandungan unsur hara pada lapisan *top soil* relatif terjaga

b) Kemiringan Lahan 8-15

Tanah pada kemiringan lereng ini memiliki kedangkalan tanah serta gejala-gejala erosi dan lapisan top soilnya pernah mengalami pengikisan dan hanyut, diperlukan tindakan-tindakan praktis berupa perlindungan terhadap kelembaban tanah agar produktivitas tanah itu dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan-tindakan praktis ini berupa perlindungan kelembaban tanah, dan mengusahakan pada musim hujan tanah tidak terhanyut oleh air, pengolahan tanah menurut kontur, menggunakan sisa-sisa tanaman (pemberian mulsa) dan penambahan pupuk kandang.

c) Kemiringan Lahan 15-25%

Pada kemiringan lereng ini sudah dapat dikatakan agak curam lapisan top soil rentan terjadinya pengikisan akibat laju limpasan semakin besar, perlunya diadakan tindakan-tindakan seperti membuat terassing, membenamkan pupuk hijau, pupuk organik atau pun pupuk buatan ke dalam tanah, membuat larikan dimana tanaman itu akan ditanam dan mengusahakan agar drainasenya dapat berjalan sebaik mungkin.

d) Kemiringan Lahan 25-40 %

Tanah pada kemiringan ini jika tidak terdapat vegetasi permukaan tanah mengalami erosi hebat, rendah kandungan kelembabannya serta dipengaruhi oleh angin kencang, tetapi pada kemiringan lereng ini masih bisa ditanami tanaman produksi pertanian dengan batasan-batasan tertentu misalnya,

tanaman yang tumbuhnya rapat, tanaman tahunan dan rumput-rumputan.

e) Kemiringan Lahan lebih dari 40%

Pada kemiringan seperti ini tidak dianjurkan sebagai lahan pertanian melainkan sebagai wilayah hutan dengan di tanami pohon-pohon keras, rumput-rumputan dan semak belukar semuanya tetap dibiarkan subur dengan hal ini erosi dari atas dapat di perkecil

3.7.2. Penutupan lahan

Landuse (penggunaan lahan) dan **landcover** (penutupan lahan) sering digunakan secara bersama-sama. Kedua terminologi tersebut berbeda. Menurut Lillesand dan Kiefer pada tulisan mereka tahun 1979 kurang lebih berkata: penutupan lahan berkaitan dengan jesis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut. Townshend dan Justice pada tahun 1981 juga punya pendapat mengenai penutupan lahan, yaitu penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis, tahun 1982, mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi berupa kenampakan hasil aktivitas manusia (penggunaan lahan)

Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di APL sangat dinamis. Tutupan lahan di APL didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak dengan luasan 140.321 ha. Meskipun terletak di luar kawasan

hutan, tutupan hutan didalam wilayah APL masih bisa ditemukan. Ini mengindikasikan bahwa beberapa wilayah APL masih ditutupi oleh kawasan hutan. Tipe tutupan hutan yang mendominasi adalah hutan sekunder seluas 65.774,96 ha. Tipe tutupan hutan sekunder di APL paling luas terdapat di Kabupaten Pohuwato seluas 57.933,70 ha. Disamping hutan sekunder di wilayah APL juga bisa ditemukan tipe tutupan hutan primer meskipun luasnya sangat kecil yang hanya mencapai 1287,42. Tipe tutupan lain yang bisa ditemukan di APL adalah pemukiman. Wilayah pemukiman paling luas terdapat di Kabupaten Gorontalo yang mencapai 8.887 ha. Tipe tutupan lahan ini dapat disaksikan langsung di lapangan. Untuk lahan sawah, luas tutupan lahannya mencapai 32.775,61 ha. Luas lahan sawah di Kabupaten Boalemo adalah terbesar dimana luasnya mencapai 68.93,95 ha. Luas lahan sawah di APL jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas semak belukar. Ini mengindikasikan masih banyak wilayah-wilayah di APL belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun beberapa wilayah yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah wilayah semak belukar yang luasannya mencapai 48.386,45 ha. Wilayah ini sangat luas jika dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sawah. Wilayah semak belukar terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan luasan mencapai 14.622,26 ha. Hasil identifikasi tutupan lahan juga memperlihatkan terdapat lahan yang tidak memiliki vegetasi dan termasuk dalam kategori tanah terbuka. Tanah terbuka dimasa yang akan datang dapat menimbulkan masalah terkait dengan menurunnya produktivitas lahan akibat erosi. Sebaran tipe penutupan lahan di APL dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 20. Tipe Tutupan Lahan Hutan di APL

Tipe tutupan lahan	Kabupaten / Kota						Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Pohuwato	
Bandara/ Pelabuhan			6,48	3,28			9,77
Hutan Mangrove Primer	146,66			697,94		442,82	1287,42
Hutan Mangrove Sekunder	432,22			576,20		1875,13	2883,55
Hutan Primer		450,02		645,22		765,77	1861,01
Hutan Sekunder	1909,32	3474,62	323,84	2045,95	87,53	57933,70	65774,96
Pemukiman	3484,03	2980,72	8877,00	2717,79	2626,99	2917,18	23603,71
Perkebunan	7493,03	507,91	2951,08	261,82		13229,20	24443,04
Pertanian Lahan Kering	21117,39	8336,98	38594,59	10038,32	419,41	4183,85	82690,53
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	29257,23	17937,26	31675,26	34261,29	971,89	26218,83	140321,76
Rawa						353,89	353,89
Sawah	6893,95	2716,16	16557,06	1958,28	1063,26	3586,90	32775,61
Semak Belukar	8177,82	12986,47	14622,26	5927,18	1140,01	5532,71	48386,45
Semak Belukar Rawa	8,76		351,67	119,43	1,93	6,12	487,90
Tambak	184,84			392,43		3265,22	3842,49
Tanah Terbuka	78,25	91,90		58,64		353,13	581,92
Tubuh Air	103,54	0,00	36,01	49,62	0,0	75,31	264,48
Jumlah	79287,04	49482,03	113995,23	59753,39	6311,0	120739,77	429568,49

Sumber: Hasil analisis spatial 2013

3.7.3. Iklim

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan Februari yaitu 23,00⁰C. sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan Maret dengan suhu 33,9 ⁰C. suhu rata – rata Provinsi Gorontalo berkisar antara 24,4 – 28,0 ⁰C. Provinsi Gorontalo mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban mencapai 83,5 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Mei dengan 378 mm, tetapi jumlah hari hujan terbanyak terjadi bulan Juli sebanyak 22 hari. Rata-rata kecepatan angin tercatat di stasiun meteorologi untuk setiap bulannya yaitu berkisar antara 1,0 – 3,0 m/detik.

Tipe iklim di APL terbagi menjadi 2 yaitu iklim kering (tipe C) dan sangat kering (tipe E). Berdasarkan hasil analisis spatial iklim yang dominan di APL adalah iklim sangat kering, dimana lama bulan kering lebih panjang dari bulan basah. Cakupan wilayah yang beriklim sangat kering meliputi 177.635,79 ha, dengan wilayah administrasi yang memiliki iklim sangat kering terluas adalah Kabupaten Pohuwato yang mencapai 177.635,79 ha.

Tabel 21. Tipe Iklim d Wilayah APL

No	Kabupaten / Kota	Tipe Iklim				Jumlah
		C1	C2	E1	E2	
1	Boalemo	45,00		38550,11	40524,54	79119,65
2	Bone Bolango		6072,48	24785,26	18567,64	49425,38
3	Gorontalo	25620,80	7498,52	52759,28	28029,47	113908,06
4	Gorontalo Utara	37553,41	21767,00			59320,41
5	Kota Gorontalo			896,43	5398,36	6294,80
6	Pohuwato	551,21		60644,71	59219,47	120415,39
	Jumlah	63770,42	35337,99	177635,79	151739,49	428483,69

Sumber: hasil analisis spatial 2013

3.7.4. Jenis Tanah

Tanah merupakan bagian terluar kulit bumi, tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan bercampur dengan batuan organik. Pelapukan yang terjadi adalah pelapukan tanaman atau hewan yang telah berumur tua dan mengendap. Hasil endapan inilah yang membentuk tanah. Jenis tanah merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman karena perbedaan jenis tanah mempengaruhi sifat-sifat dari tanah tersebut. Untuk memahami hubungan antara jenis tanah, diperlukan pengetahuan yang mampu mengelompokkan tanah secara sistematis sehingga dikenal banyak sekali sistem klasifikasi yang berkembang. Untuk mempelajari hubungan antar jenis tanah maka sistem klasifikasi tanah dibagi menjadi sistem klasifikasi alami dan sistem klasifikasi teknis.

Tabel 22. Luas dan Jenis Tanah di APL

Jenis Tanah	Kabupaten / Kota						Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Pohuwato	
Aluvial Hidromorf, Gle i Humus						2231,05	2231,05
Aluvial	807,55			2423,36		27096,91	30327,82
Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning	19750,16		28487,28			17540,90	65778,34
Brown Forest Soil, Aluvial, Al uvial Hidromorf	8881,19	5832,51	8681,14		5494,31		28889,14
Danau			4414,76				4414,76
Grumusol, Mediteran Merah Kuning	9145,29		30019,42		216,04		39380,75
Latosol, mediteranian merah kuning				4702,67			4702,67
Latosol, litosol	21499,59		1410,23	156,73		10046,86	33113,42
Litosol	18,57						18,57
Mediteran Merah Kuning, Latosol		12638,07	11155,28	4295,90			28089,25
Mediteran Merah Kuning,	15357,31	30395,68	17968,46	33181,13	442,54		97345,13
Podsolik Merah Kuning		371,74					371,74
Podsolik Kelabu Coklat						16406,97	16406,97
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	2777,14		3908,56	7089,57		41889,59	55664,86
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning,						2529,77	2529,77

Jenis Tanah	Kabupaten / Kota						Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Pohuwato	
Litosol							
Rendzina, Mediteran Merah Kuning			7738,87				7738,87
Jumlah	78236,81	49238,00	113784,01	51849,36	6152,89	117742,05	417003,12

Berdasarkan peta jenis tanah di APL terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Jenis tanah yang dominan di APL adalah dari jenis tanah mediterania merah kuning yang meliputi luas 97.345,13 ha, dengan luas wilayah terbesar terdapat pada wilayah Kabupaten Bone Bolango yang mencapai luasan 30.395,68. Jenis tanah lain yang bisa ditemukan di APL adalah tanah aluvial. Beberapa pakar mengemukakan, tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus.

3.7.5. Kondisi Vegetasi di APL

a) Vegetasi alami

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, penyebaran vegetasi alam di wilayah APL vegetasi dataran rendah (*lowland*). Didataran rendah yang memiliki ketinggian < 1000 mdpl, vegetasi alami masih bisa ditemukan terutama

pada wilayah berhutan yang berada di dalam APL. Meskipun luasnya sangat kecil tapi keberadaan vegetasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan kategori tutupan lahan, wilayah yang masih memiliki vegetasi alami tersebut merupakan wilayah hutan sekunder atau wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas Wilayah-wilayah yang masih berhutan dapat ditemukan di wilayah Kecamatan Taluditi, Kecamatan Popayato dan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Disamping ditemukan pada wilayah-wilayah perbatasan antara APL dan HPT, wilayah yang bervegetasi alami juga ditemukan pada wilayah-wilayah perbukitan dan pegunungan yang terjal. Namun demikian sebagian besar vegetasi alami di APL telah mengalami gangguan karena sebagian besar telah berubah fungsi menjadi lahan-lahan pertanian tanaman semusim dan perkebunan. Karena itu, tumbuhan yang terdapat pada wilayah-wilayah seperti ini adalah merupakan tanaman budidaya. Walaupun demikian, beberapa jenis tumbuhan menggambarkan vegetasi alami. Komunitas vegetasi alami yang terdapat wilayah APL berupa semak belukar, rumput, alang-alang dan beberapa jenis pohon yang mempunyai diameter < 20 cm. Adapun vegetasi yang dominan dan paling sering ditemukan pada wilayah yang bervegetasi alami dapat dilihat pada tabel berikut

3.8. Kondisi Wilayah Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokokpokok agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25

atau 35 tahun , yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha. Subyek Hak Guna Usaha sesuai Pasal 30 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah : 1) Warga negara Indonesia, 2) Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang Hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama (Pasal 28 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan Penetapan Pemerintah dan Konversi. Terjadinya Hak Guna Usaha karena Penetapan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 dan Pasal 37 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yakni berasal dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diberikan Pemerintah sebagai Hak Guna Usaha kepada yang memerlukannya atas permohonan yang telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan terjadinya Hak Guna Usaha karena Konversi sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Konversi dalam Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) antara lain ditentukan :

- 1) Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA), menjadi Hak Guna Usaha untuk sisa waktunya,selama-lamanya 20 tahun ;

- 2) Hak-hak atas tanah seperti: Hak Agrarisch Eigendom, Hak Milik Adat, Hak Grant Sultan, Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikulir dan hak-hak lainnya, apabila yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik, sejak mulai berlakunya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi Hak Guna Usaha bila tanahnya merupakan tanah pertanian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur lebih lanjut pada Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Pemberian Hak Guna Usaha tersebut wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan.
- 3) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftarkan oleh Kantor Pertanahan dalam Buku tanah sesuai dengan ketentuan 22 Peraturan Perundang-undangan (Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak Guna Usaha yang telah diberikan (tersebut).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Penetapan terhadap hak guna usaha bisa dihapuskan jika

- 1) Jangka waktunya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian atau Perpanjangannya;

- 2) Dihentikan/dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, misalnya : tidak terpenuhinya dan/atau dilanggarnya kewajiban-kewajiban pemegang hak; adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 3) Dilepaskan oleh pemegang haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir
- 4) Dicabut untuk kepentingan umum ;
- 5) Tanah diterlantarkan
- 6) Tanahnya musnah ;
- 7) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki hak tersebut. Diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sebagaimana lahirnya Hak Guna Usaha dicatat dalam Buku tanah, maka hapusnya Hak Guna Usaha juga harus dicatat menurut ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Dibandingkan dengan wilayah APL, maka penggunaan lahan di didalam HGU lebih statis karena peruntukkan untuk HGU umumnya untuk kepentingan perkebunan dan pertanian yang cenderung monokultur misalnya HGU perkebunan sawit, HGU kelapa dalam dan HGU perkebunan tebu. Pemanfaatan HGU biasanya dilakukan dengan melihat kondisi yang terdapat dalam HGU tersebut. Berdasarkan hasil analisis spatial luas HGU di Provinsi Gorontalo mencapai 240.913,88 ha atau 43,96% dari luas total APL. Wilayah administrasi yang mempunyai HGU

terluas adalah Kabupaten Pohuwato dengan luas 104.886,68 ha

Tabel 23. Luas dan Sebaran HGU di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten	Luas
1	Kabupaten Gorontalo	64.522,44
2	Kabupaten Boalemo	29.861,97
3	Kabupaten Pohuwato	104.886,68
4	Kabupaten Bone Bolango	26,04
5	Kabupaten Gorontalo Utara	41.616,55
6	Kota Gorontalo	-
Total		240.913,88

Sumber: Hasil Analisis Spatial 2013

Adapun kondisi dan situasi di dalam HGU yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut

3.8.1. Kondisi Iklim

Kondisi iklim merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan arahan pemanfaatan kawasan/wilayah termasuk dalam pemanfaatan wilayah HGU. Dalam menentukan iklim, para ahli telah menetapkan beberapa klasifikasi iklim yang telah disepakati bersama. Klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi. Akibat perbedaan latitudo (posisi relatif terhadap khatulistiwa, garis lintang), letak geografi, dan kondisi topografi, suatu tempat memiliki kekhasan iklim. Klasifikasi iklim biasanya terkait dengan bioma atau provinsi floristik

karena iklim mempengaruhi vegetasi asli yang tumbuh di suatu kawasan.

Klasifikasi iklim yang paling umum dikenal adalah klasifikasi Koeppen dan Geiger. Klasifikasi ini berlaku untuk seluruh dunia sehingga sering dirujuk untuk kajian-kajian geologis dan ekologi. Beberapa negara mengembangkan klasifikasi iklim sendiri untuk mengatasi variasi iklim tempatan yang beragam. Indonesia, misalnya, lebih sering menggunakan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson (SF), yang ternyata disukai untuk kajian-kajian kehutanan dan pertanian. Sistem SF didasarkan pada klasifikasi yang terlebih dahulu disusun oleh Mohr, namun diperhalus kriterianya.

Klasifikasi ini sangat populer di Indonesia dan beberapa negara tetangga yang memiliki musim kering-musim hujan. Menyadari bahwa variasi iklim Indonesia sangat beragam, pemerintah Indonesia meminta kedua ahli tersebut untuk membuat suatu sistem klasifikasi yang cocok bagi keadaan Indonesia.

Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering (BK) ke bulan basah (BB), yang disimbolkan sebagai Q (dalam persen). Bulan kering adalah bulan dengan presipitasi total di bawah 60 mm dan bulan basah adalah bulan dengan presipitasi total di atas 100 mm. Delapan kelompok iklim menurut Schmidt dan Ferguson adalah

- Iklim A, $Q < 14,3$, daerah sangat basah, hutan hujan tropis;
- Iklim B, $14,3 \leq Q < 33,3$, daerah basah, hutan hujan tropis;
- Iklim C, $33,3 \leq Q < 60,0$, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau);

- Iklim D, $60,0 \leq Q < 100,0$, daerah sedang, hutan peluruh;
- Iklim E, $100,0 \leq Q < 167,0$, daerah agak kering, padang sabana;
- Iklim F, $167,0 \leq Q < 300,0$, daerah kering, padang sabana;
- Iklim G, $300,0 \leq Q < 700,0$, daerah sangat kering, padang ilalang;
- Iklim H, $Q \geq 700,0$, daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman, secara umum iklim di HGU di Provinsi adalah Iklim E atau iklim agak kering dimana bulan kering lebih lama dibandingkan dengan bulan basah. Wilayah yang agak kering terletak pada wilayah sebelah selatan sampai dengan wilayah pesisir Teluk Tomini, sedangkan wilayah yang agak basah terletak pada bagian utara yang umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi. Wilayah bagian utara merupakan kawasan hutan tropis dataran rendah yang umumnya mempunyai curah hujan lebih tinggi.

Tabel 24. Klasifikasi iklim HGU di Provinsi Gorontalo

Nama Kabupaten	Luasan Tipe Iklim (Ha)				Jumlah
	C1	C2	E1	E2	
Boalemo	0,37	465,07	20972,55	8423,97	29861,97
Bone Bolango		26,04			26,04
Gorontalo	18214,37	46,37	32986,98	13274,70	64522,43
Gorontalo Utara	25937,32	14722,91	826,16		41486,38
Pohuwato	551,21	438,97	59106,14	44760,69	104857,02
Total	44703,28	15699,36	113891,84	66459,36	240753,84
Persentase	18,57	6,52	47,31	27,60	100,00

Sumber: hasil analisis data spatial, 2013

1. Kelas lereng

Informasi kemiringan dan bentuk lereng dalam setiap wilayah termasuk wilayah HGU sangat penting bagi perencanaan pemanfaatan lahan. Kemiringan lapangan yang semakin besar akan memperbesar terjadinya erosi karena tanah sangat mudah diangkut, yaitu mudah terbawa dalam bentuk suspensi hampir sempurna. Fenomena ini menyebabkan produktivitas lahan menurun. Lahan-lahan yang miring juga berpengaruh besar terhadap limpasan permukaan.

Berdasarkan hasil analisis spasial tingkat keterengan di HGU sangat bervariasi mulai dari datar sampai dengan sangat curam. Wilayah datar di HGU meliputi luasan 150.546,82 ha atau 62,51% dari total seluruh kelas lereng. Wilayah administrasi yang memiliki luas wilayah yang datar terbesar adalah Kabupaten Pohuwato yaitu seluas 70.862,90 ha. Beberapa wilayah yang sangat curam juga terdapat di HGU meskipun luasannya tidak signifikan yaitu hanya 467,31 ha atau 0,19 %.

Tabel 25. Kelas Lereng HGU setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo

Nama Kabupaten	Luas Kelas Lereng (Ha)					Jumlah
	0 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Boalemo	21729,37	5955,49	2053,94	122,68		29861,48
Bone Bolango	26,04					26,04
Gorontalo	46133,51	11485,52	6094,20	809,21	46,37	64522,44
Gorontalo Utara	11795,00	11652,27	12743,64	5185,14	189,07	41376,04
Pohuwato	70862,90	23218,56	7981,91	2531,71	231,86	104595,07
Total	150546,82	52311,84	28873,69	8648,73	467,31	240381,08
Prosentase	62,51	21,72	11,99	3,59	0,19	100

(Sumber: Hasil pengukuran spasial dan checking lapangan 2013)

3.8.2. Kondisi penutupan lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan dipermukaan bumi yang terdiri dari beberapa ragam pemanfaatan lahan. Identifikasi, pemantauan, dan evaluasi tutupan lahan perlu selalu dilakukan pada setiap periode tertentu, karena ia dapat menjadi dasar untuk mengetahui perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian, identifikasi tutupan lahan menjadi bagian yang

penting dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan terhadap lahan HGU bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Dalam hubungannya dengan optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan penggunaan lahan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tindakan yang sistematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan, serta tepat pada waktunya, untuk peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana usaha atau campur tangan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Data penggunaan/tutupan lahan ini dapat disadap dari foto udara/citra satelit. Teknik interpretasi citra satelit termasuk di dalam sistem penginderaan jauh. Berdasarkan hasil analisis spasial kondisi tutupan lahan di HGU didominasi oleh tipe tutupan lahan pertanian lahan kering dengan luas 237.834,77 ha atau 98,72%. Adapun luasan dan sebaran tutupan lahan HGU di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 26. Luas Tutupan Lahan HGU Setiap Kabupaten di Provinsi Gorontalo

Tipe Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan Setiap Kabupaten (Ha)					Jumlah	%
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato		
Hutan Mangrove Primer	0,61					0,61	0,0003
Hutan Mangrove Sekunder	7,40			17,07		24,47	0,0102
Hutan Sekunder	5,06					5,06	0,0021
Pemukiman	25,02	0,51	7,50	145,37	84,54	262,94	0,1091
Perkebunan	3,78			81,79	633,11	718,69	0,2983
Pertanian Lahan Kering	29433,82	25,40	64476,07	40255,81	103643,68	237834,77	98,7219
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	251,76	0,11	38,87	910,98	452,66	1654,38	0,6867
Rawa					19,00	19,00	0,0079
Sawah		0,02		158,74		158,76	0,0659
Semak Belukar	130,94			46,80	53,89	231,62	0,0961
Tambak	3,58					3,58	0,0015
Total	29861,97	26,04	64522,44	41616,55	104886,87	240913,87	100

(Sumber: Hasil perhitungan data spasial dan checking lapangan 2013)

3.8.3. Kondisi jenis tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan

menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan.

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dibantu oleh organisme membentuk tekstur unik yang menutupi permukaan bumi. proses pembentukan tanah ini akan membentuk lapisan-lapisan yang menutupi seluruh permukaan bumi. lapisan-lapisan yang terbentuk memiliki tekstur yang berbeda dan setiap lapisan juga akan mencerminkan proses-proses fisika, kimia dan biologi yang telah terjadi selama proses pembentukannya. Hans Jenny (1899-1992), seorang pakar tanah asal Swiss yang bekerja di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi/pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme (termasuk manusia), dan relief permukaan bumi (topografi) seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut terbentuklah berbagai jenis tanah dan dapat dilakukan klasifikasi tanah. Berdasarkan hasil analisis spatial di wilayah HGU terdapat beberapa jenis tanah. Pembentukan jenis tanah di HGU juga sangat dipengaruhi oleh iklim, bahan induk Jenis tanah yang dominan adalah jenis tanah Aluvial

hidromorf dengan luas penyebaran mencapai 233446,02 ha atau 98,53. Jenis tanah ini paling banyak dijumpai di Kabupaten Pohuwato dengan luas 102.180,33 ha. Adapun penyebaran jenis tanah di seluruh wilayah HGU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Jenis Tanah setiap Kabupaten di HGU Provinsi Gorontalo

Jenis Tanah	Luas Jenis Tanah Setiap Kabupaten (Ha)					Jumlah	%
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato		
Aluvial Hidromorf, Gleis Humus	29396,90		64476,07	37392,73	10218 0,33	23344 6,02	98,5 3
Aluvial, Aluvial, Aluvial					287,1 0	287,1 0	0,12
Brown Forest Soil, Aluvial, Aluvial Hidromorf					320,0 8	320,0 8	0,14
Latosol, Latosol				461,63		461,6 3	0,19
Latosol, Latosol, Latosol	434,38				46,58	480,9 6	0,20
Mediteran Merah Kuning, Latosol		1,22		556,82		558,0 4	0,24
Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning			46,37	664,50		710,8 7	0,30
Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	30,69				638,5 1	669,1 9	0,28
Grand Total	29861,97	1,22	64522,44	39075,67	10347 2,60	23693 3,89	100

Sumber: Hasil analisis spasial 2013

3.8.4. Kondisi Vegetasi di HGU

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terlihat, tipe vegetasi di HGU lebih didominasi oleh tipe vegetasi

budidaya. Hal ini disebabkan karena umumnya HGU yang dikuasai oleh masyarakat telah berubah menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat mengusahakan lahan-lahan pertanian dalam skala kecil yaitu dengan luasan 0,5 – 2 ha. Beberapa lahan HGU yang dikuasai oleh masyarakat bahkan ditelantarkan dan ditumbuhi oleh alang-alang/semak. Beberapa tumbuhan berkayu yang tumbuh dilahan-lahan masyarakat juga ditemukan di HGU. Tanaman berkayu ini sengaja ditanam oleh masyarakat, disamping sebagai tanaman peneduh juga dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber pangan. Adapun beberapa jenis tanaman yang sering diusahakan oleh masyarakat di wilayah HGU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Komposisi Vegetasi budidaya di lokasi HGU

No.	Nama Indonesia	Nama lokal	Nama Ilmiah
1	Alpukat	Alpukat	<i>Persea gratissima</i>
2	Daun bawang	Daun bawang	<i>Allium fistulosum</i>
3	Bayam merah	Bayam	<i>Alternanthera amoena</i>
4	Damar	Damahu	<i>Agathis</i>
5	Kacang hijau	Kacang ijo	<i>Phaseolus radiatus</i>
6	Kacang tanah	Kaca	<i>Arachis hypogea</i>
7	Kangkung	Kanto	<i>Ipomea aquatica</i>
8	Ubi Kayu	Kasubi	<i>Ipomea batatas</i>
9	Padi lading	Padi	<i>Oriza sativa</i>
10	Rambutan	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>
11	Terong	Poki-Poki	<i>Solanum melongena</i>
12	Asam	Asam jawa	<i>Tamarindus indica</i>
13	Bambu	Talilo	<i>Bambusa spp</i>
14	Belimbing	Lembetu'e	<i>Averhoa bilimbi</i>
15	Cabe	Malita	<i>Capsicum anuum</i>
16	Coklat	Sakulati	<i>Theobroma cacao</i>
17	Durian	Durian	<i>Durio zibetinus</i>

No.	Nama Indonesia	Nama lokal	Nama Ilmiah
18	Enau	Waolo	<i>Arenga pinnata</i>
19	Jagung	Binthe	<i>Zea mays</i>
20	Jambu biji	Dambu	<i>Psidium guajava</i>
21	Jambu air	Upo huala	<i>Syzygium malacense</i>
22	Jeruk	Limu	<i>Citrus maxima merr</i>
23	Jati	Jati	<i>Tectona grandis</i>
24	Kapok	Duyungo	<i>Ceiba petandra</i>
25	Kelapa	Bongo	<i>Cocos nucifera</i>
26	Mangga	Oile	<i>Mangifera indica</i>
27	Mente	Buah yakis	<i>Anacardium heterophyllum</i>
28	Nangka	Langge	<i>Artocarpus heterophyllum</i>
29	Nenas	Nanati	<i>Ananas cosmosusu</i>
30	Pepaya	Pepaya	<i>Carica papaya</i>
31	Pisang	Lambi	<i>Musa Paradisiaca</i>
32	Serei	Timbuale	<i>Cymbopogon nardus</i>
33	Tomat	Tamate	<i>Solanum melongena</i>

Sumber: Hasil survey lapangan, 2014

3.9. Pemanfaatan APL dan HGU untuk Perkebunan

3.9.1. Perkebunan Kelapa Sawit

Hadirnya perkebunan kelapa sawit di puluhan kecamatan di Provinsi Gorontalo diharapkan memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitarnya. Kecamatan-kecamatan yang dulunya sepi, akan berkembang setelah hadirnya perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan juga akan mengalami pergerakan sangat positif. Kegiatan di sektor perkebunan yang perkembangannya cukup pesat saat ini merupakan salah satu bidang agroindustri yang mengembangkan komoditi perkebunan untuk menunjang sektor industri, dan salah satu

yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2010, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 6,7 juta ha meliputi perkebunan besar dan rakyat, dengan produksi 10,4 juta ton minyak kelapa sawit (*crude oil palm*) dan pada tahun 2011 mencapai 12,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan dalam negeri.

Tabel 29. Nama-nama perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Gorontalo

Nama Perusahaan	Wilayah Administrasi				
	Boalemo	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	Total
PT. Agro Artha Surya	20184,99	9,29			20194,27
PT. Agro Palma Katulistiwa		20870,80			20870,80
PT. Banyan Tumbuh Lestari				15917,53	15917,53
PT. Heksa Jaya Abadi		22773,08			22773,08
PT. Inti Global Laksana				11990,27	11990,27
PT. Sawindo Cemerlang				18857,42	18857,42
PT. Sawit Tiara Nusa				9255,16	9255,16
PT. Sino Taro Indah		0,08	15393,15		15393,23
PT. Tri Palma Nusantara	17,54	20530,38			20547,92
PT. Umekah Makmur		0,46	25392,36		25392,83
PT. Wira Mas Permai				40530,03	40530,03
PT. Wira Sawit Mandiri				7897,50	7897,50
Grand Total	20202,53	64184,08	40785,52	104447,92	229620,05

Sumber: Hasil analisis data utama, 2013

Berdasarkan data diatas perusahaan kelapa sawit yang akan beroperasi maupun yang telah melakukan kegiatan menguasai lahan dengan total 229.620,05 ha yang tersebar di empat kabupaten. Luasan perkebunan sawit terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato mencapai 104.447,92 ha. Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Pohuwato yang akan beroperasi maupun sedang melakukan kegiatan adalah PT Banyan Tumbuh Lestari seluas 15917,53 ha, PT Inti Global Laksana seluas 11.990,27, PT Sawindo Cemerlang seluas 18.857,42 ha, PT. Sawit Tiara Nusa seluas 9255,16 ha, PT Wira Mas Permai seluas 40.530,03, PT Wira Sawit Mandiri. Sebaran perkebunan sawit dapat dilihat pada lampiran akhir dokumen ini

3.9.2. Perkebunan Tebu

Tebu merupakan tanaman sumber pemanis alami. Tanaman ini berasal dari wilayah sub tropis, dapat tumbuh pada semua jenis tanah dengan ketinggian mulai dari 0 – 1400 mdpl. Di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo tanaman tebu memiliki fungsi ganda yakni bernilai ekonomi tinggi sekaligus pelestari lingkungan, karena tanaman tebu bisa digunakan sebagai pengendali erosi yang disebabkan oleh air. Kebutuhan gula di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun dan belum mampu dipenuhi hingga saat ini. Luas areal tanaman tebu di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 436.500 ha dengan produksi gula nasional sebesar 2.668.427 ton. Tebu tidak saja menghasilkan gula putih tetapi juga menghasilkan limbah yang bermanfaat untuk bahan bakar nabati. Pada tahun 2010 dari limbah tebu yang dihasilkan energi listrik sebesar 1,97 juta Kwh dan diperkirakan akan meningkat 2,75 juta Kwh ditahun 2025. Terkait dengan pelestarian lingkungan

tebu bisa menyerap CO₂ sebesar 9,56 juta ton pada tahun 2010 dan akan meningkat sebesar 13,9 juta ton.

Saat ini di Provinsi Gorontalo terdapat perkebunan tebu yang dimiliki oleh PG Rajawali yang sebelumnya bernama PT. Naga Manis Plantation. Total luas perkebunan tebu adalah 16.194,7 ha yang tersebar di dua wilayah yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 30. Luas perkebunan tebu

No.	Nama Kabupaten	Luas (ha)
1	Kabupaten Boalemo	10083,88
2	Kabupaten Gorontalo	6110,82
Total		16194,7

Sumber: hasil pengukuran dan analisis spasial 2013

Berdasarkan data diatas luas perkebunan terbesar berada di Kabupaten Boalemo dimana luasannya mencapai 10.083,88 ha. Di Kabupaten Boalemo luas perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Paguyaman yang mencapai 5.274,87 ha sedangkan di wilayah Kabupaten Gorontalo, luas perkebunan terbesar terdapat di Kecamatan Tolangohula dimana luasannya mencapai 3107,41 ha. Perkebunan tebu di Provinsi Gorontalo telah dimulai sejak tahun 1980-an dan setiap tahun luas perkebunan PG Rajawali terus bertambah. Sebaran perkebunan tebu milik PT. PG Rajawali dapat dilihat di bawah ini

3.9.3. Perkebunan kelapa dalam

Data Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2012 menunjukkan, luas areal perkebunan di Provinsi Gorontalo ± 360.376 ha yang sudah dimanfaatkan 247.195,49 ha

sedangkan yang belum dimanfaatkan mencapai 113.180,51 ha. Pemanfaatan yang terbesar adalah untuk izin perkebunan kelapa sawit, sedangkan perkebunan tebu dan perkebunan kelapa dalam menduduki peringkat ke-2 dan ke-3. Meskipun perkebunan kelapa dalam memiliki luas yang lebih kecil, tapi masyarakat telah lebih dulu mengenal kelapa dalam dibandingkan dengan sawit dan tebu. Sejak puluhan tahun yang lalu, Gorontalo merupakan penghasil kopra terbesar di Sulawesi Utara. Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi luas tanam maupun produksi. Antara tahun 2007 sampai dengan 2012 produksi tanaman kelapa mencapai 62.338 ton. Meningkatnya produktivitas kelapa salah satunya ditunjang oleh lahan-lahan HGU perkebunan kelapa yang tersebar hampir diseluruh Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, total luas lahan HGU untuk perkebunan kelapa mencapai 1380,70 ha. Adapun luas HGU perkebunan kelapa di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 31. Pemilik HGU individu di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Nama Pemilik HGU	Wilayah Administrasi			
		Anggrek	Kwandang	Sumalata	Jumlah
1	Hi. Saleh Abd Alamri			185,09	185,09
2	Husein Alamri			109,08	109,08
3	I. Salindehe	51,10			51,10

No.	Nama Pemilik HGU	Wilayah Administrasi			
		Anggrek	Kwandang	Sumalata	Jumlah
4	Joytje Nento		38,51		38,51
Total		51,10	38,51	294,17	383,78

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 32. Pemilik HGU di Kabupaten Bone Bolango

No.	Pemilik HGU	Kecamatan	Luas (Ha)
1	PT. Miwon/Keluarga Habibie	Tilongkabila	26,04

Tabel 33. Pemilik HGU individu di Kabupaten Pohuwato

No.	Nama Pemilik HGU	Marisa	Paguat	Popayato	Jumlah
1	Drs.Erwin Giasi			260,44	260,44
2	Fitri I.D. Albahar		72,86		72,86
3	Ny. Helly Waworuntu			113,66	113,66
4	Tui Gesai	86,74			86,74
Total		86,74	72,86	374,10	533,7

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

Tabel 34. Pemilik HGU individu di Kabupaten Boalemo

No.	Nama Pemilik HGU	Paguyaman	Tilamuta	Jumlah
1	Pemda Kab Gorontalo	142,67		142,67
2	Sintje Ranty S.H.		26,65	26,66
Total		142,67	26,65	169,32

Sumber: Dinas perkebunan Provinsi Gorontalo, 2013

3.9.4. Pemanfaatan kawasan wisata

Dalam kebijakan pembangunan nasional dijelaskan bahwa pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk menggalakkan perekonomian Nasional dan Daerah. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun lalu, terutama sebelum krisis moneter melanda perekonomian Indonesia, kegiatan kepariwisataan memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian Nasional yang salah satu pendorongnya ialah globalisasi diberbagai sektor.

Hal ini memberikan arti bahwa penggalakan kegiatan kepariwisataan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Peran serta pihak swasta dan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam iklim kompetisi yang sehat dan didasari dengan komitmen saling menguntungkan serta saling menghidupi.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar yang tersebar di enam kabupaten/kota. Kekuatan pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo terletak pada atraksi yang di tawarkan yang meliputi: wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah. Berdasarkan hasil survey terdapat kurang lebih 85 potensi wisata yang memiliki atraksi menarik. Namun demikian belum semua potensi tersebut dikembangkan. Salah satu kendala utama pengembangan pariwisata adalah kurangnya infrastruktur yang menunjang kegiatan wisata. Beberapa potensi pariwisata yang cukup dikenal antara lain: wisata bahari seperti: wisata pantai Dunu, Wisata Pantai Botutonuo, Wisata Pantai Minanga, Wisata Pantai Bolihutuo, sedangkan

wisata alam antara pemandian air panas Lombongo. Untuk wisata sejarah seperti benteng otanaha dan benteng orange.

3.9.5. Pemanfaatan sumber energi terbarukan

Pemanfaatan energi terbarukan menjadi semakin penting mengingat semakin terbatasnya sumber energi fosil atau non-terbarukan. Melalui Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah telah berupaya untuk menyusun strategi pengelolaan energi nasional 2006-2025, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam pasokan energi nasional harus dipenuhi 17% energi terbarukan. Selain itu melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Indonesia berkeinginan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan kapasitas iptek dengan prinsip-prinsip green economy development. Ini menyatakan dengan jelas bagaimana peran energi terbarukan di masa yang akan datang

Berdasarkan penjelasan tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan penataan dan pengembangan kawasan strategis serta pengembangan infrastruktur melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo – Paguyaman – Kawandang atau KEK Gopandang sebagai upaya mendukung optimalisasi MP3EI. “Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan energi yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah diantaranya yaitu finalisasi pembangunan PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek, pengembangan potensi energi terbarukan untuk mendukung industrialisasi, meliputi pengembangan geothermal, *biomassa energy* dan pembangunan Waduk Dumbaya Bulan. Untuk

kapasitas yang lebih kecil pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah membangun beberapa PLTMH seperti PLTMH Ayumolingo di Kabupaten Boalemo, PLTMH Dulamayo di Kabupaten Gorontalo dan PLTMH Bulontio di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan total potensi energi sumberdaya air untuk memenuhi pasokan listrik adalah 65.4 MW (Mega Watt) dan potensi panas bumi 110 MW. Total Potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175.4 MW dan yang baru dimanfaatkan sebesar 3.5 MW. Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamogabu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430.69 MW dan perkiraan beban puncak 266.40 MW.

Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini 86.56 MW dan daya mampu 59.20 MW dengan beban puncak 56.13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129.270 pelanggan dengan tingkat pelanggaran terbesar sektor rumah tangga sebesar 92.46 %. Pertumbuhan rata – rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8.6 s/d 10%. Ratio elektrifikasi saat ini sebesar 69.97%. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah.

3.9.6. Izin Usaha Pertambangan

Potensi pertambangan di Provinsi Gorontalo cukup beragam dan tersebar di beberapa wilayah. Salah satu bahan

tambang yang menonjol adalah emas disamping terdapat pula beberapa bahan galian yang juga bernilai di antaranya Granit, batu gamping dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelusuran IUP, terdapat 22 perusahaan pertambangan yang mempunyai izin konsesi. Saat ini belum satu pun dari 22 perusahaan pertambangan tersebut yang melakukan aktivitas eksploitasi. Semuanya masih dalam taraf izin eksplorasi bahkan beberapa perusahaan baru akan mengurus izin lokasi. Terdapat dua perusahaan pertambangan memegang izin kontrak karya dan sisanya memegang IUP. Kontrak karya adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan izin usaha pertambangan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Adapun perusahaan pemegang kontrak karya tersebut adalah PT Gorontalo Sejahtera Mining di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo, PT Gorontalo Minerals di Kabupaten Bone Bolango. Total luasan hak konsesi pertambangan di Provinsi Gorontalo mencapai 301833,87 ha, dimana Kabupaten Gorontalo mempunyai luas hak konsesi paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Luas konsesi pertambangan di Kabupaten Gorontalo adalah 84769,13 ha.

Tabel 35. Nama perusahaan pemegang IUP dan Kontrak Karya di Provinsi Gorontalo

Nama Pemegang IUP	Wilayah Administrasi					Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	
CV. Damai				6179,44		6179,44
KUD Dharma Tani					94,65	94,65
PT. Alam Jaya Energi			5537,22			5537,22

Nama Pemegang IUP	Wilayah Administrasi					Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	
PT. Berati Bina Mineral			999,15			999,15
PT. Cahaya Ranca Mas					16993,21	17090,23
PT. Cemerlang Gemilang Terbilang					14272,86	14272,86
PT. Eksplorasi Indonesia Jaya		12082,00	9414,49	55,60		21552,09
PT. Gorontalo Mineral's		37607,50				43810,69
PT. Gorontalo Sejahtera Mining	43,69		5408,08		7326,14	12777,92
PT. Indonesia Bina Mineral	5008,50		14322,11			19353,54
PT. Lion Power Energi					11409,96	11409,96
PT. Liquindo Persada		4136,36				4136,36
PT. Makale Toraja Mining			2,35	20895,89		21832,77
PT. Pertambangan Bumi Indonesia			38006,31	15104,84		54502,63
PT. Rasmanik Tonala Mineral	1012,62					1012,62
PT.					21898,06	21898,06

Nama Pemegang IUP	Wilayah Administrasi					Jumlah
	Boalemo	Bone Bolango	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pohuwato	
Rimbunan Nusantara Abadi						6
PT. Suma Heksa Luban Abadi		251,47		5294,73		5546,20
PT. Suma Heksa Sinergi	0,05			9561,27	8232,56	17793,88
PT. Sumagud Sapta Sinar				4458,03		4969,64
PT. Tansri Masjid Energi			5148,41	546,88		5695,29
PT. Tilongkabila Nusantara Indo		5094,03				5094,03
PT. Totopo Jaya Mineral			5931,02			6274,64

Sumber: hasil analisis data utama

3.9.7. Penutup

3.9.8. Kesimpulan

Dari hasil deskripsi penelitian di atas dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo masih memiliki areal perkebunan seluas 360.376 ha, yang sudah dimanfaatkan seluas 118.063 ha sehingga masih terbuka peluang inventasi di sektor perkebunan seluas 242.313 ha. Namun kendala di lapangan tanah tersebut tidak merupakan suatu hamparan dengan struktur tanah umumnya yang agak berbukit. Komoditas perkebunan yang dominan

adalah Kelapa dengan luas areal 68.248 ha, Kakao 12.483 ha, Cengkeh 8.280 ha dan tebu 7.818 ha. Potensi perkebunan tersebut berpotensi pengembangannya dapat diintegrasikan dengan pengembangan peternakan khususnya peternakan sapi.

2. Di bidang perikanan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi tangkapan yang didasarkan atas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun. Potensi tersebut belum maksimal termanfaatkan (baru sekitar 15 %), dan untuk itu masih terbuka investasi baik dalam penangkapan maupun budidaya.
3. Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi untuk pengembangan kelistrikan yang bersumber dari energy terbarukan yaitu potensi geothermal (panas bumi) daerah Suwawa sebesar 110 MW dan Pentadio Resort sebesar 20 MW. Selain daripada itu potensi geothermal lainnya relative kecil yang tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperatur 50⁰C, Kecamatan Botumoito dengan temperatur 42⁰C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperatur 62⁰C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65⁰C. dengan total sumber daya diperkirakan sebesar 160⁰ (MW). Selain potensi

geothermal Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi kelistrikan berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan sumber potensi Sungai yang besar dan kecil di Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara. Sumber potensi listrik lainnya adalah Listrik Biomass yang bersumber dari pemanfaatan tongkol jagung, sekam padi, sampah dan tanaman lamtoro gung yang tersebar di Provinsi Gorontalo.

4. Kawasan Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Gorontalo seluas 429.568 ha dimana sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian lahan kering campur semak dengan luasan 140.321 ha, Untuk lahan sawah, luas tutupan lahannya mencapai 32.775,61 ha, pertanian lahan kering seluas 82.690,53 ha, persawahan 32775,61 ha, semak belukar 48.386,45. Dari data tersebut masih terdapat lahan APL yang masih bisa digunakan untuk investasi khususnya lahan APL yang tidak dimanfaatkan tapi ditutupi oleh semak belukar.
5. Luas HGU di Provinsi Gorontalo mencapai 240.913,88 ha atau 43,96% dari luas total APL. Wilayah administrasi yang mempunyai HGU terluas adalah Kabupaten Pohuwato dengan luas 104.886,68 ha. Adapun pemanfaatan HGU sesuai izin yang sudah diproses untuk perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada 12 perusahaan seluas 229.620 ha, perkebunan tebu 16.194,7 dan perkebunan kelapa dalam seluas 1.113.2 ha.

3.9.9. Saran-saran

Dari hasil yang dikemukakan di atas, maka disarankan:

1. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) dapat lebih gencar mempromosikan peluang investasi baik Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambahan dan Kehutanan dengan melakukan koordinasi lebih intensif dan Kabupaten/Kota.
2. Perlu diciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengefisienkan perizinan usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan perizinan baik yang sudah jalan apakah sesuai dengan izin yang sudah diberikan maupun izin yang sudah keluar tapi tidak dimanfaatkan disarankan untuk segera dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, Sugeng., 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori, Model Perencanaan, dan Penerapannya.*
- Tambunan, Tulus.,1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia.* PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad., 2002. *Analisis Spasial dan Regional. Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia.* UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Murad Rusmadi., 2013. *Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek.* Penerbit Mandar Maju, Bandung.

- Olilingo, Fachrudin Zain., 2002. *Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Wilayah Dan Dampaknya terhadap Distribusi Pemakaian Input dan Ketimpangan Antar Sektor Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Syafrizal., 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Bank Indonesia, 2013. *Laporan Perkembangan Ekonomi Gorontalo, BI Gorontalo*.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2013. *Hak-Hak Atas Tanah*. Penerbit: Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Kepres No. 34 Tahun, 1992. *Pemanfaatan Tanah Hak Guna Tanah dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Ragka Penanaman Modal Asing*.
- Laporan BPS Provinsi Gorontalo, 2013.
- Peraturan Pemerintah no. 40 (1996). *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.



DATA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KABUPATEN POHUWATO

4.1. Pendahuluan

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun internasional. Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh ganda (*multiplier effect*), sehingga

ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berbagai implikasinya positif dari investasi antara lain adalah meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung (*direct investment*) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Pohuwato berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan pematapan pertumbuhan ekonomi. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses

perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 pemerintah telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025.

RUPM ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Perpres tersebut, diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku ekonomi dan pembangunan baik lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten perbatasan, atau provinsi perbatasan) dalam penetapan rencana penanaman modal berdasarkan potensi yang dimiliki.

Potensi ekonomi Kabupaten Pohuwato pada umumnya, dan potensi investasi khususnya, yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan,

industri, pengangkutan, jasa-jasa, dan pertanian, di samping harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah kabupaten, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud.

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana menuju keadaan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik daripada kondisi yang lalu. Dalam mempercepat pembangunan nasional di segala bidang agar terlaksananya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, pemerintah memerlukan modal yang cukup besar. Akan tetapi kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal untuk keperluan mempercepat pembangunan sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai salah satu aspek dalam kebijakan pemerintah perlu melakukan usaha-usaha agar memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan.

Dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, daerah harus mampu menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuknya investasi menjadi kurang signifikan. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan potensi dan peluang investasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Potensi ekonomi daerah akan menjadi salah satu peluang investasi yang akan merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat dan juga untuk penyerapan tenaga kerja. Potensi daerah menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Semakin besar potensi wilayah akan semakin besar arus pendapatan ke dalam wilayah sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dari beberapa potensi yang ada maka meningkatkan volume investasi didaerah tersebut. Potensi daerah mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan pelaku ekonominya. Sehingga dapat mendorong terciptanya keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing) terhadap potensi disuatu wilayah. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat memberikan keuntungan yang positif.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Pohuwato, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Perpres Nomor 16/2012, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Pohuwato merasa perlu menyiapkan data potensi dan peluang investasi agrobisnis yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Pohuwato.

4.2. Profil Kabupaten Pohuwato

4.2.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Pohuwato

Wilayah Kabupaten Pohuwato pada mulanya masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo, namun sejak dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003 maka terbentuklah Kabupaten Pohuwato (bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango) yang mandiri. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut luas wilayah Kabupaten Pohuwato sebesar 4.244,31 Km² atau dengan kata lain yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. Waktu itu Kabupaten Pohuwato hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan; Popayato, Lemito, Marisa, Randangan, dan Paguat.

Semenjak “berpisah” dari Boalemo, Pohuwato berkembang sangat pesat. Saat ini wilayah Pohuwato terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan. Pertumbuhan ekonominya pun dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan beberapa kali melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional. Secara geografis, Kabupaten Pohuwato terletak pada jalur yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pohuwato terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo dengan letak geografis antara 0,27°-1,01° Lintang Utara dan 121,23°-122,44° Bujur Timur dengan iklim 24,4°C - 33,2°C. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Daerah ini memiliki luas wilayah 4.244,31 Km² atau 36,77% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan wilayah administrasi pemerintah mencakup 13 kecamatan, 101 desa, dan 3 Kelurahan.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

(Sumber: RTRW Kabupaten Pohuwato, 2012-2032)

4.2.2. Topografi, Jenis Tanah, Suhu dan Iklim

Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0 200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan. Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian 200 500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500 1.000 m dpl

dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000 1.500 m dpl terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong.

Untuk jenis tanah di Kabupaten Pohnuato didominasi oleh jenis tanah, yakni andosol, laterit, grumusol, dan podsolik yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio dan Buntulia. Sementara untuk jenis tanah regosol, litosol, organosol dan renzina dominan tersebar di wilayah Papayato Barat dan Dengilo. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, dan Paguat lebih didominasi oleh jenis tanah alluvial, glei planosol, hidromorf kelabu laterit air tanah, seperti yang terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Iklim Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo.

(Sumber: RTRW Kabupaten Pohnuato, 2012-2032)

Berdasarkan peta iklim menurut klasifikasi Oldeman dan Darmiyati, Kabupaten Pohuwato secara rata-rata beriklim relatif kering. Wilayah terkering (iklim E2 dengan rata-rata kurang dari 3 bulan per tahun bercurah hujan lebih 200 mm) meliputi seluruh wilayah selatan Kabupaten Pohuwato. Sementara wilayah yang relatif lebih basah (iklim C1, dengan 5 sampai 6 bulan basah pertahun) ditemukan di sepanjang wilayah utara Kabupaten Pohuwato.

4.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pohuwato

4.3.1. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pohuwato (rupiah), 2013–2015.

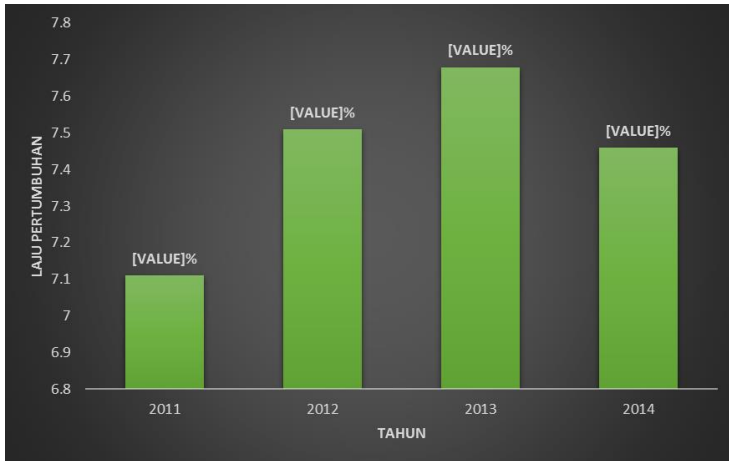
No.	Lapangan Usaha	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.826.732,3	1.952.931,8	2.055.068,8
2	Pertambangan dan Penggalian	39.050,8	39.265,4	39.184,9
3	Industri Pengolahan	138.971,0	148.177,2	154.268,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.896,0	2.130,5	2.202,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	778,1	833,1	886,9
6	Konstruksi	207.952,7	216.129,1	234.218,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	280.725,9	313.258,3	340.332,9
8	Transportasi dan Pergudangan	94.465,1	108.570,0	120.149,8
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	35.551,3	37.761,7	39.986,9
10	Informasi dan Komunikasi	44.640,0	48.762,0	53.052,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	58.660,2	61.344,9	67.740,4
12	Real Estate	27.900,8	30.180,6	32.662,3
13	Jasa Perusahaan	3.056,0	3.177,1	3.351,9
14	Administrasi Pemerintahan,	195.014,3	204.497,4	213.050,0

No.	Lapangan Usaha	2013	2014*	2015**
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
15	Jasa Pendidikan	71.737,4	79.519,8	85.198,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.158,9	82.022,2	89.439,3
17	Jasa Lainnya	39.998,6	43.124,8	45.234,5
T O T A L		3.143.289,4	3.371.686,0	3.576.029,0

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2016)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu kabupaten dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/kabupaten tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan PDRB didominasi oleh sektor pertanian lalu disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data PDRB berdasarkan harga konstan memberikan gambaran keadaan Produk Domestik Bruto daerah Kabupaten Pohuwato.



Gambar 3. Grafik laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pohuwato berdasarkan harga konstantahun 2011-2014.
(Sumber: *Pohuwato Dalam Angka 2015*)

Sesuai dengan Gambar 3 di atas, didapati bahwa laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pohuwato berdasarkan harga konstan tahun 2015 selang waktu tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun sempat mengalami penurunan dari 7,68 persen pada tahun 2013 turun menjadi 7,46 persen di tahun 2014.

4.3.2. Tingkat Kemandirian Kabupaten Pohuwato

Kemandirian ekonomi semestinya didefinisikan secara fleksibel dan bersifat dinamis. Kemandirian lebih dilihat dari kemampuan suatu daerah mengembangkan perekonomiannya dengan sebesar mungkin mempergunakan daya sendiri, terutama dalam bentuk daya saing yang tinggi untuk kemakmuran rakyatnya. Kemandirian tidak

dilihat dari keterisolasian terhadap perekonomian negara lain atau perekonomian dunia, tetapi bagaimana dalam perekonomian yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian global, daya saing dan kemakmuran rakyat dapat terus ditingkatkan (Juoro, 1990).

Perekonomian yang terintegrasi dapat memungkinkan suatu negara membentuk aliansi ekonomi seperti akhir-akhir ini yang ramai dibicarakan yaitu masuknya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Perdebatan terpusat pada untung dan ruginya kalau Indonesia masuk sistem perdagangan yang semakin terbuka dan terintegrasi. Dari semua pandangan pada dasarnya orang akan memaklumi suatu fenomena integrasi ekonomi seperti MEA hanya saja kita perlu secara taktis mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari persekutuan tersebut.

Sebagian analisis juga menyoroti fundamen ekonomi apabila kita mengundang penanaman modal asing untuk memproses sumberdaya alam yang kita miliki. Perkembangan modal asing menurut Juoro tidaklah sebesar modal asing yang masuk ke negara Asia lainnya, seperti China, Singapura, dan bahkan Malaysia dan Thailand. Baru pada tahun 2010 modal asing yang masuk ke Indonesia tergolong besar sekitar 12 milyar dollar AS, sebelum itu modal masuk adalah berkisar 3-5 milyar dollar AS per tahunnya. Bandingkan dengan China yang mencapai sekitar 50 triliun dollar AS. Karena itu sebenarnya perekonomian Indonesia belum dapat dikatakan sebagai dikuasai modal asing, karena masih relatif rendahnya modal asing yang masuk ke Indonesia.

Keberadaan modal asing pada dasarnya dibutuhkan menjadi penggerak bagi perekonomian daerah sehingga memiliki kapasitas dalam pengembangan ekonominya dengan

mempertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun fenomena yang terjadi banyak daerah yang tidak bisa mengembangkan kemandiriannya apabila dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber yang bisa menghasilkan PAD.

Salah satu penyebabnya adalah masih kurang berkembang sektor investasi baik PMA maupun PMDN yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan sumber PAD. Jumlah perolehan PAD Kabupaten Pohuwato dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini. Data menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Pohuwato tahun 2014 sebesar 38,8 milyar rupiah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 41,4 milyar rupiah.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), tahun 2014–2015.

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2014	2015
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.888.554.935	41.445.587.961
2	Pajak Daerah	7.475.343.870	7.234.782.027
3	Retribusi Daerah	6.862.163.273	8.519.130.000
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.249.887.850	2.336.862.797
5	Lain-lain PAD yang Sah	22.301.159.942	23.354.855.137
6	Dana Perimbangan	529.327.939.773	582.321.490.789
7	Bagi Hasil Pajak	18.529.718.773	15.097.874.000
8	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	4.825.346.789

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2014	2015
9	Dana Alokasi Umum	438.955.271.000	456.663.680.000
10	Dana Alokasi Khusus	71.842.950.000	105.734.590.000
11	Lain-lain Pendapatan yang Sah	58.045.370.858	109.100.285.000
12	Pendapatan Hibah	-	4.250.000.000
13	Dana Darurat	-	-
14	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13,802,995,458	13.575.000.000
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	39.453.683.000	87.909.285.000
16	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.788.692.400	3.366.000.000
17	Lainnya	-	-
Jumlah		626.261.865.566	732.867.363.750

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato, 2016)

4.3.3. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Pohuwato

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2002). Dalam konteks politik, Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial.

Ellis dalam Suharto (2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut

aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki di bawah terget atau patokan yang telah ditentukan.

Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003:1) kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu :

1) Kemiskinan Absolut

Adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2) Kemiskinan relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat disekitarnya.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pohuwato masih tergolong tinggi. Total jumlah penduduk kabupaten pohuwato sekitar 30,08 persen masih tergolong sebagai masyarakat pra-sejahtera (miskin). Tingkat kemiskinan tertinggi berada di kecamatan Randangan dengan total penduduk miskin sebesar 1.636 keluarga setelah itu disusul oleh Kecamatan Marisa sebesar 1.545 keluarga. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Pohuwato, tahun 2013

No.	Kecamatan	Keluarga Pra-Sejahtera	Keluarga Sejahtera			
1	Popayato	218	290	1.045	559	195
2	Popayato Barat	1.027	148	499	45	97
3	Popayato Timur	995	1.020	499	198	34
4	Lemito	724	594	901	791	59
5	Wanggarasi	559	344	266	60	49
6	Marisa	1.545	1.596	941	512	92
7	Patilanggio	958	853	490	235	27
8	Buntulia	779	901	738	394	90
9	Duhiadaa	953	1.068	639	289	43

No.	Kecamatan	Keluarga Pra-Sejahtera	Keluarga Sejahtera			
			1.062	1.142	496	70
10	Randangan	1.636	1.062	1.142	496	70
11	Taluditi	600	757	695	106	41
12	Paguat	799	1.442	1.343	727	192
13	Dengilo	743	438	321	107	35
Total		11.536	10.513	9.519	4.519	1.024

(Sumber: BPPAKAB, 2014)

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Saat ini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas.

Kondisi seperti ini menimbulkan adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan bawah dan di atasnya. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Adapun jumlah angka kemiskinan di Kabupaten

Pohuwato dari tahun 2006-2014 tersaji pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Angka Kemiskinan di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2006 - 2014

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
			Jumlah Total	Persentase (%)
1	2006	137.017	35.10	32,06
2	2007	147.750	31.30	29,74
3	2008	158.393	24.50	23,28
4	2009	183.215	22.49	21,15
5	2010	194.335	24.20	18,73
6	2011	210.033	28.51	21,58
7	2012	211.204	27.68	20,18
8	2013	212.629	30.19	21,47
9	2014	214.146	29.85	20,69

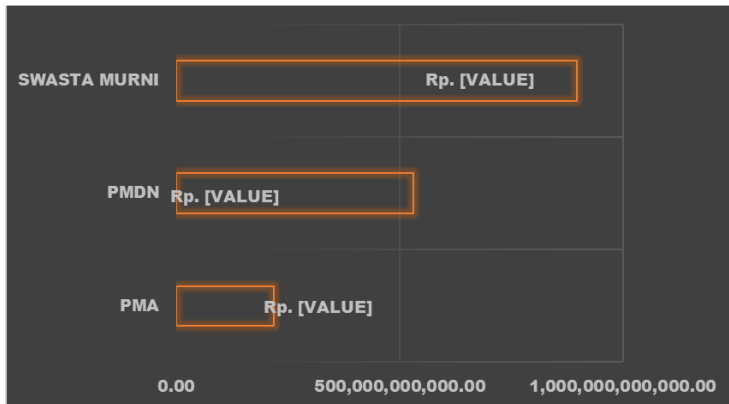
(Sumber: BPS Pohuwato, 2015)

Pada tahun 2014, angka kemiskinan Kabupaten Pohuwato menurun sebanyak 0,78 persen menjadi 20,69 dari 21,47 pada tahun 2013. Angka kemiskinan Kabupaten Pohuwato sendiri selama tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi yang tidak cukup signifikan berkisar di angka 20 sampai 21 persen.

4.3.4. Perkembangan Investasi Kabupaten Pohuwato

Investasi memiliki peranan yang penting menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dalam menggerakkan perekonomian. Investasi sangat dibutuhkan terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi berlimpah namun kekurangan modal sebagai penggerak investasi. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perkembangan investasi

yang menggembarakan dengan adanya perhatian pemerintah Kabupaten Pohuwato yang memberikan layanan yang baik terhadap calon investor. Berdasarkan data profil investasi di Kabupaten Pohuwato, maka struktur penanaman modal Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:



Gambar 4. Struktur Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tahun 2015 (Sumber: Laporan Triwulan LKPM Tahun 2016).

Berdasarkan data investasi di Kabupaten Pohuwato, investasi terbesar yaitu pada swasta murni (non-fasilitasi) sebesar Rp. 896.538.800,00, yang didominasi oleh bidang usaha perdagangan. Sedangkan investasi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 531.521.855.360,00 berasal dari sektor perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit yang tersebar di daerah Popayato, Popayato Timur, dan Taluditi. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 218.399.119.287,00 berasal dari bidang usaha budidaya mutiara, Industri minyak kasar

dan kemasan plastik, industri pengeringan jagung dan pakan ternak, serta pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Lemito, Paguat, Taluditi, dan Buntulia.

4.4. Kependudukan (Demografi)

4.4.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang tertuang dalam buku “Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2014”, rumah tangga yang mendiami Provinsi Gorontalo ini sampai tahun 2014 berjumlah 260.722 dengan total penduduk 1.115.633 jiwa yang terdiri dari 558.862 jiwa penduduk laki-laki dan 556.771 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan rata-rata sekitar 92 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Gorontalo meningkat dari 1.097.990 jiwa di tahun 2013 menjadi 1.115.633 jiwa pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2014 sebesar 1.67% per tahun.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2016, jumlah penduduk Pohuwato adalah 128.771 jiwa, yang terdiri atas 65.612 laki-laki dan 63.159 perempuan. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa penyebaran penduduk Pohuwato terbanyak di Kecamatan Marisa yakni 13,72%, Randangan 11,65% dan paling sedikit di Wanggarasi yakni 3,55%. Kecamatan Marisa adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 17.760 jiwa, sedangkan Wanggarasi memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 4.567 jiwa.

Dengan luas wilayah Pohuwato yang sekitar 36,77 persen dari total wilayah Provinsi Gorontalo dan didiami oleh 128.771 jiwa maka rata-rata kepadatan penduduk Pohuwato adalah 30 jiwa per km². Kecamatan terpadat penduduknya

adalah Kecamatan Duhiadaa yakni 270 jiwa per km². Adapun jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Dan Distribusi Penduduk Kabupaten Pohuwato tahun 2015

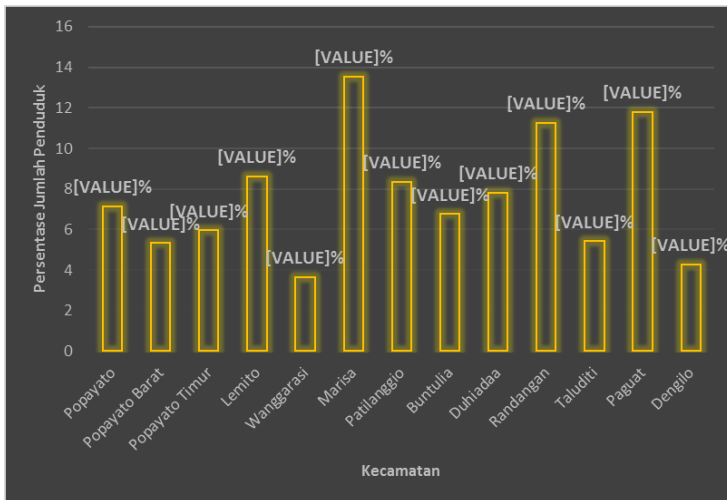
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Penduduk / Km ²
1	Popayato	9.188	7,14	100,92
2	Popayato Barat	6.651	5,16	11,49
3	Popayato Timur	7.781	6,04	10,76
4	Lemito	10.492	8,15	23,29
5	Wanggarasi	4.567	3,55	24,28
6	Marisa	17.670	13,72	206,28
7	Patilanggio	8.700	6,76	29,11
8	Buntulia	10.500	8,15	27,95
9	Duhiadaa	10.667	8,28	269,85
10	Randangan	14.999	11,65	93,76
11	Taluditi	7.252	5,63	16,12
12	Paguat	14.894	11,57	26,55
13	Dengilo	5.410	4,20	22,32
T O T A L		128.771	100,00	30,34

(Sumber: Pohuwato Dalam Angka, 2016)

Penduduk adalah objek utama dari perencanaan pembangunan suatu daerah. Kondisi kependudukan merupakan dasar untuk melakukan perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. Efektivitas besaran penduduk dalam setiap unit distrik atau kecamatansangat mempengaruhi perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu,

penduduk merupakan salah satu *point* yang tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan pembangunan.

Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seorang perencana tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosio-ekonomi, kultur yang dianut, atau jenis kelamin saja, melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, perkembangan kelahiran, kematian, proyeksi penduduk, dan sebagainya. Untuk mempermudah dalam melihat besaran jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato tahun 2015, maka jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato secara rinci dipersentasikan dalam diagram chart pada Gambar 6 di bawah ini:



Gambar 5. Grafik persentase jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato tahun 2015 (*Sumber: Pohuwato Dalam Angka, 2016*)

Gambar 6 menunjukkan bahwa luas wilayah terbesar yakni di Kecamatan Popayato Timur dengan luas wilayah 733,74 km² dengan persentase 17,05 persen dan yang terendah di Kecamatan Marisa dengan luas wilayah 34,65 km² dengan persentase 0,82 persen selanjutnya untuk jumlah penduduk terbesar yakni di Kecamatan Marisa dengan jumlah 18.510 jiwa dengan persentase 13,55 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wanggarasi dengan jumlah 5011 jiwa dengan persentase 3,67 persen dan selanjutnya untuk kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Marisa dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 534 per km². Jumlah penduduk di Kecamatan Pati langgio sebesar 11.422 jiwa yang terbagi atas 6 desa yaitu Desa Iloheluma, Dudepo, Balayo, Manawa, dan SukaMakmur.



Gambar 6. Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pohuwato tahun 2012-2032(Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2016)

4.4.2. Struktur Penduduk

Komposisi penduduk adalah dimana suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas dan memiliki banyak penduduk didalam satu negara tersebut, dari banyaknya penduduk tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya dalam pengelompokan itu kriteria yang diambil kebanyakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tempat tinggal. Semua itu dikelompokkan agar tidak terjadi masalah-masalah sepele yang timbul.

Penggambaran penduduk menurut struktur umur berguna untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan penduduk non produktif, hal ini akan berpengaruh pada angkatan kerja disuatu wilayah serta tingkat ketergantungan penduduk non produktif kepada penduduk produktif. Selain itu, penggambaran penduduk menurut struktur umur juga diperlukan untuk perhitungan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi.

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, tahun 2015.

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Popayato	4.757	4.808	9.565	0,99
2	Popayato Barat	3.506	3.329	6.835	1,05
3	Popayato Timur	3.961	3.837	7.798	1,03
4	Lemito	5.570	5.402	10.972	1,03
5	Wanggarasi	2.440	2.308	4.748	1,06
6	Marisa	10.106	10.006	20.112	1,01
7	Patilanggio	4.917	4.600	9.517	1,07
8	Buntulia	5.457	5.529	10.986	0,99
9	Duhiadaa	5.823	5.695	11.518	1,02

10	Randangan	8.552	7.960	16.512	1,07
11	Taluditi	4.184	3.645	7.829	1,15
12	Paguat	7.950	7.798	15.748	1,02
13	Dengilo	2.890	2.801	5.691	1,03
J U M L A H		70.113	67.718	137.831	1,04

(Sumber: BPS Pohuwato, 2015)

4.4.3. Klasifikasi Struktur Umur

Klasifikasi struktur umur dilakukan sesuai dengan tujuan penyusunan indikator dan analisis lanjutan. Ada beberapa jenis klasifikasi umur yaitu:

1. Umur Tunggal

Klasifikasi umur tunggal diperlukan untuk tujuan-tujuan spesifik penyusunan indikator seperti angka kematian bayi, perkiraan jumlah pemilih pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) dan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah terkait penyediaan fasilitas pelayanan dan dunia bisnis untuk ekspektasi pasar.

2. Pengelompokan Umur Lima Tahunan

Data penduduk kelompok umur lima tahunan (0-4, 5-9, 10-14, dan seterusnya) diperlukan untuk penyusunan berbagai indikator kependudukan dan ketenagakerjaan, seperti angka *dependency ratio*, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut kelompok umur, tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur, rasio anak ibu dan berbagai indikator fertilitas lainnya.

3. Pengelompokan Umur Untuk Analisis Pendidikan

Untuk analisis pendidikan, pengelompokan umur mengikuti usia jenjang pendidikan yaitu: SD (7-12 Tahun), SMP (13-15 Tahun), SMA (16-18 Tahun) dan Universitas (19-24 Tahun). Dari klasifikasi kelompok umur ini, selanjutnya dapat dihitung berbagai indikator pendidikan

seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Drop menurut jenjang pendidikan.

4. Pengelompokan Umur untuk Analisis Kesehatan

Beberapa indikator kesehatan seperti fertilitas dan mortalitas diturunkan dari kelompok umur tertentu. Sebagai contoh Indikator rasio ibu anak memerlukan input data penduduk umur 0-4 tahun dan wanita umur 15-49 tahun, indikator kematian bayi memerlukan informasi yang teliti tentang usia bayi pada saat meninggal.

Adapun data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pohuwato tahun 2015

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	2.893	2.689	5.582
2	5-9	6.601	6.085	12.686
3	10-14	7.834	7.591	15.425
4	15-19	7.080	7.067	14.147
5	20-24	6.738	6.670	13.408
6	25-29	5.586	5.548	11.134
7	30-34	6.089	5.990	12.079
8	35-39	5.901	5.885	11.786
9	40-44	5.668	5.450	11.118
10	45-49	4.783	4.348	9.131
11	50-54	3.707	3.448	7.155
12	55-59	2.653	2.429	5.082
13	60-64	1.873	1.805	3.678
14	65+	2.707	2.713	5.420
Jumlah		70.113	67.718	137.831

(Sumber: BPS POHUWATO tahun 2015)

4.4.4. Ketenagakerjaan(*Employment*)

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

SAKERNAS pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, baru sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan bulan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), bulan Mei (Triwulan II), bulan Agustus (Triwulan III), dan bulan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara SAKERNAS Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar

200.000 rumah tangga, dimana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.

4.4.5. Keterangan yang dikumpulkan

Keterangan pokok berkaitan dengan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui SAKERNAS adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Informasi tersebut meliputi:

1. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti: bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).
2. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
3. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan; alasan utama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan, lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu).

Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2015 mencapai 534.012 orang, bertambah 33.956 orang dari keadaan bulan Agustus 2014 sebesar 500.056 orang, atau bertambah 13.369 orang dari keadaan bulan Februari 2014 sebesar 520.643 orang.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2015 mencapai 66,37 persen, mengalami peningkatan baik dibandingkan TPAK bulan Agustus 2014 sebesar 62,84 persen atau TPAK bulan Februari 2014 sebesar 66,25 persen;
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2015 sebesar 517.687 orang, bertambah 38.550 orang dari keadaan bulan Agustus 2014 sebesar 479.137 orang, dan bertambah 9.748 orang dari keadaan bulan Februari 2014 sebesar 507.939 orang;
3. Jumlah penganggur pada bulan Februari 2015 sebesar 16.325 orang, berkurang 4.594 orang dari keadaan bulan Agustus 2014 sebesar 20.919 orang, atau bertambah 3.621 orang dari keadaan bulan Februari 2014 sebesar 12.704 orang;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2015 mencapai 3,06 persen (dari angkatan kerja), mengalami penurunan dibandingkan TPT bulan Agustus 2014 sebesar 4,18 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan TPT bulan Februari 2014 sebesar 2,44 persen;
5. Selama setahun terakhir (bulan Februari 2014-Februari 2015), sektor yang mengalami penurunan pekerja adalah sektor lainnya, dengan penurunan jumlah pekerja sebesar 33.444 orang (30,17 persen).

6. Pada bulan Februari 2015, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 157.190 orang (30,36 persen), diikuti berusaha sendiri sejumlah 121.900 orang (23,55 persen), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 88.285 orang (17,05persen).

Secara umum, jumlah penduduk dalam satu wilayah kabupaten/kota berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja. Adapun jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pohuwato pada bulan Februari tahun 2015 mencapai 534.012 orang. Data jumlah penduduk berumur yang 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Pohuwatotahun 2015 tersaji pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pohuwato, tahun 2015

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	43.576	21.929	65.505
1. Bekerja	42.996	21.159	64.155
2. Pengangguran	580	770	1.350
II. Bukan Angkatan Kerja	8.975	29.157	38.132
1. Sekolah	4.999	4.378	9.377
2. Mengurus Rumah Tangga	1.671	23.585	25.256
3. Lainnya	2.305	1.194	3.499
Jumlah	52.551	51.086	103.637
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82,92	42,93	63,21
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,10	1,51	1,30

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2016)

Untuk jenis pekerjaan, mata pencaharian penduduk yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah disektor pertanian, dimana jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang bekerja pada sektor ini adalah sebanyak 164.637 jiwa dan yang terkecil adalah penduduk yang bekerja di sektor industri sebanyak 34.173 jiwa.

Adapun jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pohuwato, tahun 2015

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (orang)		Jumlah (orang)	Bukan Angkatan Kerja (orang)
		Bekerja	Pengangguran Terbuka		
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	144	0	144	245
2	Tidak/Belum Tamat SD	18.927	0	18.927	9.484
3	Sekolah Dasar	20.650	433	21.083	12.565
4	Sekolah Menengah Pertama	7.121	0	7.121	9.761
5	Sekolah Menengah Atas	9.061	301	9.362	4.384
6	Sekolah Menengah Kejuruan	2.096	284	2.380	1.323
7	Diploma I/II/III/Akademik	570	0	570	110
8	Universitas	5.586	332	5.918	260
Jumlah		64.155	1.350	65.505	38.132

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2016)

4.5. Aspek layanan Pendidikan

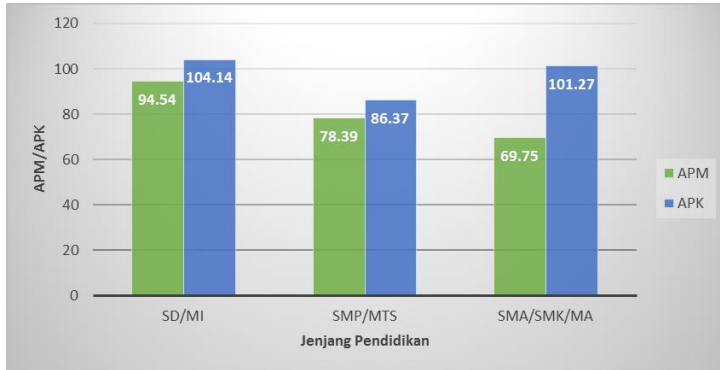
Peningkatan kapasitas manusia salah satunya melalui pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pohuwato diperlukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Pohuwato. Peningkatan sumberdaya manusia sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang pendidikan yang diikuti, diperlukan suatu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA) dengan cara membandingkan penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan total penduduk di usia pada jenjang pendidikan tersebut.

Angka ini dapat dibedakan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perbedaan yang mendasar antar APK dan APM adalah jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dalam APK tanpa melihat usia sesuai jenjang pendidikan, sedangkan dalam APM, jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang tertentu dengan batasan usia/kelompok umur sesuai jenjang sekolah.

Oleh karenanya besaran APK dan APM akan berbeda, jika perbedaan antara keduanya sangat nyata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar usia penduduk yang sedang bersekolah di level tertentu tidak mengikuti usia sesuai dengan jenjang pendidikan yang

dijalankan. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato, tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini:



Gambar 7. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato, tahun 2015. (Sumber : Badan Pusat Statistik Pohuwato, 2016)

4.6. Sarana dan Prasarana

4.6.1. Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih diartikan sebagai keluarga yang mempunyai kemudahan dalam memperoleh air bersih dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Akses terhadap air bersih tahun 2011. Bahwa dari 32.686 keluarga yang ada dan diperiksa mempunyai air bersih sebanyak 22.297 keluarga (68,2%), yang terdiri dari air ledeng sebanyak 3.586 keluarga (16,1%), SPT sebanyak 237 keluarga (1,1%), SGL sebanyak 13.612 keluarga (61,%) dan

DEPOT sebanyak 26 keluarga (0,16%) dan air kemasan 0 keluarga (0%) serta sarana lainnya berjumlah 0 (0%).

Sedangkan cakupan untuk kepemilikan sanitasi dasar meliputi, keluarga yang memiliki akses terhadap jamban 14,354 (52,4%), keluarga yang memiliki akses dan mengelola sampah dengan baik jumlahnya 14.704 (74,3%), keluarga yang memiliki akses dan mengelola limbahnya dengan aman jumlahnya 6.429 (33,9%).

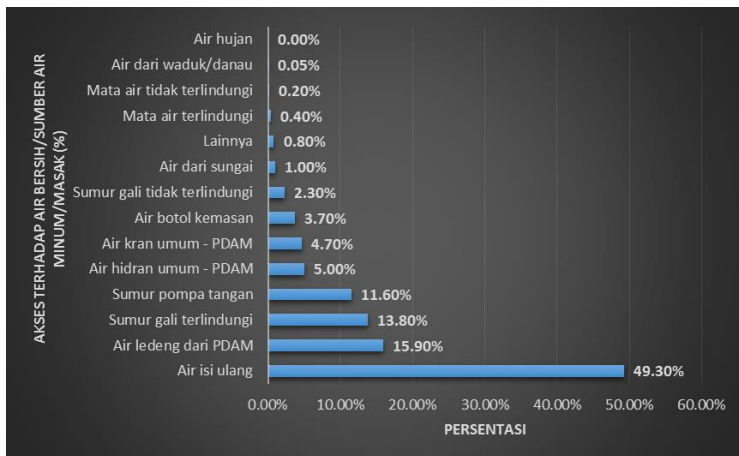
Pengelolaan air bersih di Kabupaten Pohuwato sebagian besar masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yakni Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), untuk HIPAM dan swadaya masyarakat sendiri belum terlalu besar dalam hal kesadaran mengelola komponen terkait sanitasi. Dari hasil studi *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA) oleh kelompok kerja sanitasi didapati bahwa untuk air minum sebagian besar masyarakat Kabupaten Pohuwato telah menggunakan jasa depot air isi ulang, sedangkan untuk memasak kebanyakan telah menggunakan PDAM.



Gambar 8. Peta cakupan pelayanan PDAM Pohuwato(Sumber: PDAM, 2013)

Selain itu masih berdasarkan (EHRA) atau Penilaian Resiko Kesehatan karena Lingkungan, yang mengacu pada standar *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), diketahui bahwa masih ada penduduk yang menggunakan sumber air minum dan masak yang tidak terlindungi.

Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pohuwato tahun 2015, sebesar 56,3 persen penduduk menggunakan sumber air yang tidak terlindungi, terdiri dari: sumur gali tidak terlindungi sebesar 2,3%, mata air tidak terlindungi sebesar 0,2 persen air isi ulang 49,3 persen, Air botol kemasan 3,7 persen dan lain-lain sebesar 0,8 persen (membeli air dari penjual keliling dan lain-lain).



Gambar 9. Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak (Sumber: PDAM Pohuwato, BPS Kabupaten Pohuwato tahun 2015)

Sesuai dengan Gambar 10 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Penduduk di Kabupaten Pohuwato selebihnya sudah menggunakan sumber air minum dan masak yang dinilai terlindungi antara lain sumur gali terlindungi sebesar 13,8 persen, sumur pompa tangan 11,6 persen, PDAM 18,2 persen, mata air terlindungi 0,4 persen, dan hidran umum/kran umum dari PDAM sebesar 4,7 persen.

Tabel 10. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Pohuwato

o.	Uraian	Satuan	Sistem Perpipaan	Keterangan
1	Pengelola	-	PDAM	-
2	Tingkat Pelayanan	%	65	-
3	Kapasitas Produksi	Lt/detik	104	-
4	Kapasitas Terpasang	Lt/detik	170	-
5	Jumlah Sambungan Rumah (Total)	Unit	7.889	-
6	Jumlah HU / KU	SR	204	-
7	Kehilangan Air (UFW)	%	40,24	-
8	Retribusi Tarif (Rumah Tangga)	m ³	Rp. 1.500	-
9	Jumlah Pelanggan Per Kecamatan	-	-	Lihat Peta

(Sumber: BPS Pohuwato 2015)

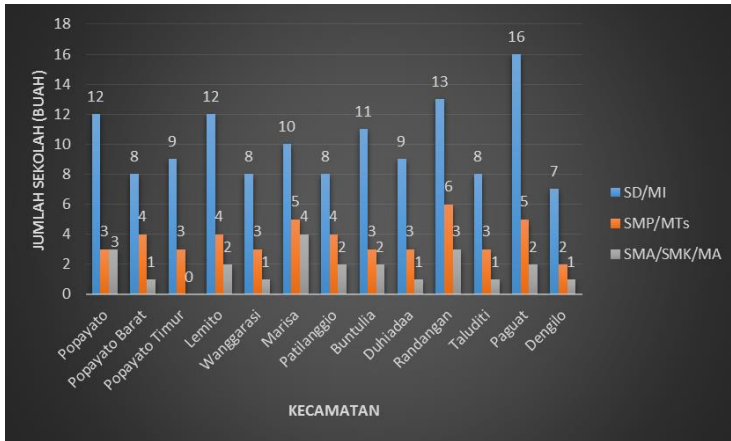
4.6.2. Sarana Pendidikan

Peningkatan kapasitas manusia salah satunya melalui pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Gorontalo diperlukan untuk mengetahui kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Gorontalo. Peningkatan

Sumber Daya Manusia sekarang ini lebih difokuskan kepada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Capaian di bidang pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan, bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato sudah memiliki sekolah dari jenjang pendidikan SD/ sederajat hingga SMA/ sederajat. Rasio murid terhadap guru dapat menunjukkan tingkat efektifitas serta mutu proses belajar mengajar dalam kelas.

Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu dan efektifitas dari proses belajar mengajar di dalam kelas cenderung rendah. Secara umum rasio murid-guru di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2014 untuk jenjang SD/MI adalah 23, tingkat SMP/MTs 13 dan tingkat SMA/SMK/MA 14. Berdasarkan rasio tersebut bisa dikatakan ketersediaan jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Pohuwato masih cukup memadai. Namun kedepannya peningkatan jumlah guru baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya tetap perlu diperhatikan.



Gambar 10. Grafik Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2014

*Ket:

Jumlah SD/MI = 131

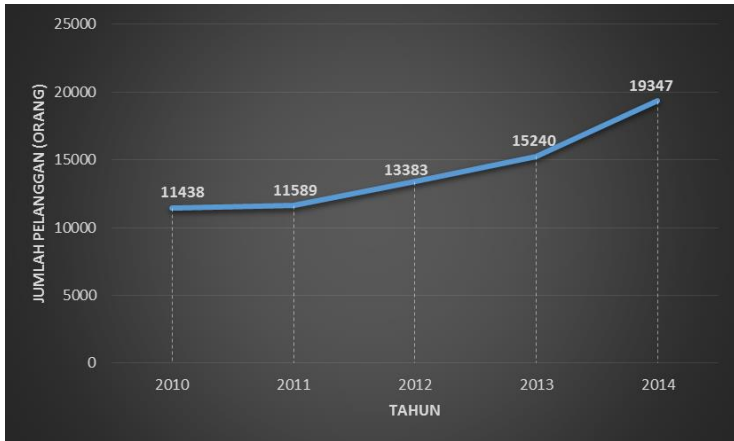
Jumlah SMP/MTs = 48

Jumlah SMA/SMK/MA = 23

(Sumber: Pohuwato Dalam Angka 2015)

4.6.3. Sarana Energi

Sebagai sumber penerangan dan energi baik pada rumah tangga maupun industri, listrik memegang peranan yang vital. Kebutuhan listrik di Kabupaten Pohuwato hampir semua dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui 7 unit distribusi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, banyaknya pelanggan PLN di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 11. Grafik Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Pohuwato, 2010-2014. (Sumber: *Pohuwato Dalam Angka, 2015*)

Berdasarkan Gambar 12 di atas, maka diketahui banyaknya pelanggan PLN pada tahun 2012 yang mengalami kenaikan sebanyak 4.107 pelanggan dari 15.240 pelanggan pada tahun 2012 menjadi 19.347. Sebagian besar pelanggan listrik PLN berada di ranting Marisa. Kebutuhan air di Kabupaten Pohuwato sebagian dipenuhi oleh PDAM Tirta Maleo. Pada tahun 2014 PDAM Tirta Maleo menyalurkan sebanyak 1.363.983 m³ air bersih kepada 10.109 pelanggan yang terdiri dari 9.555 rumah tangga, 208 perusahaan dan 346 sosial.

Tabel 11. Banyaknya Planggaran dan Volume airyang Disalurkan Menurut KecamatanKabupaten Pohuwato Tahun 2014

No.	Kecamatan	Pelanggaran	Volume Air Disalurkan
1	Popayato	1.569	462.781.400
2	Popayato Barat	374	49.781.900
3	Popayato Timur	-	-
4	Lemito	1.051	420.487.200
5	Wanggarasi	224	62.769.800
6	Marisa	4.313	2.664.016.910
7	Patilanggio	652	177.258.400
8	Buntulia	-	-
9	Duhiadaa	-	-
10	Randangan	168	39.481.700
11	Taluditi	167	63.423.000
12	Paguat	1.591	360.984.300
13	Dengilo	-	-
T O T A L		10.109	4.300.984.610

(Sumber : Pohuwato Dalam Angka 2015)

4.6.4. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sebagai sarana penunjang transportasi darat, jalan memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat pemerintah daerah telah melakukan pembangunan jalan sepanjang 47 km jalan provinsi dan 867 km jalan kabupaten pada tahun 2014 dan 6,66 km jalan kabupaten pada tahun 2015. Dari total keseluruhan jalan negara, jalan propinsi dan kabupaten itu sebagian 451,67 km sudah dalam kondisi teraspal dan 610,61 dalam kondisi permukaan kerikil.

Namun demikian masih terdapat 4 km jalan yang permukaannya berupa tanah. Sedangkan ditinjau dari kondisi jalan, 65,61 persen jalan dalam kondisi baik, 8,83

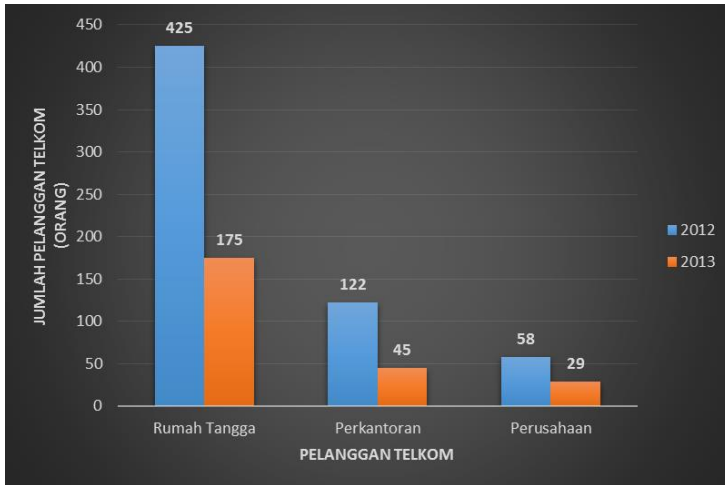
persen dalam kondisi sedang, dan 25,56 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain panjang jalan, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato pada kurun 2012-2015 juga meningkat. Peningkatan terjadi pada mobil penumpang, mobil beban dan sepeda motor.

Sementara bus dan mobil khusus tidak mengalami perubahan. Di sektor komunikasi, jumlah pelanggan Telkom di Pohuwato selama tahun 2014 sebanyak 605 pelanggan, naik 49,38 persen dari tahun sebelumnya. Sebanyak 425 pelanggan merupakan rumah tangga yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 58,82 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya rumah tangga yang beralih menggunakan telepon genggam. Sedangkan pelanggan dari kantor dan perusahaan masing-masing sebanyak 46 dan 29 pelanggan.

Tabel 12. Stastik Transpotasi Kabupaten Pohuwato tahun 2014-2015

No.	Uraian	Tahun	
		2014	2015
Jumlah kendaraan (unit) Mobil			
1	Mobil	1.161	1.318
2	Mobil bebas	1.658	1.806
3	Bus	27	28
4	Sepeda motor	28.359	30.741
5	Mobil khusus	7	7
Panjang jalan (Km)			
1	Jalan negara	125,51	125,51
2	Jalan provinsi	50,00	50,00
3	Jalan kabupaten	880,37	887,03

(Sumber : Pohuwato Dalam Angka 2016)



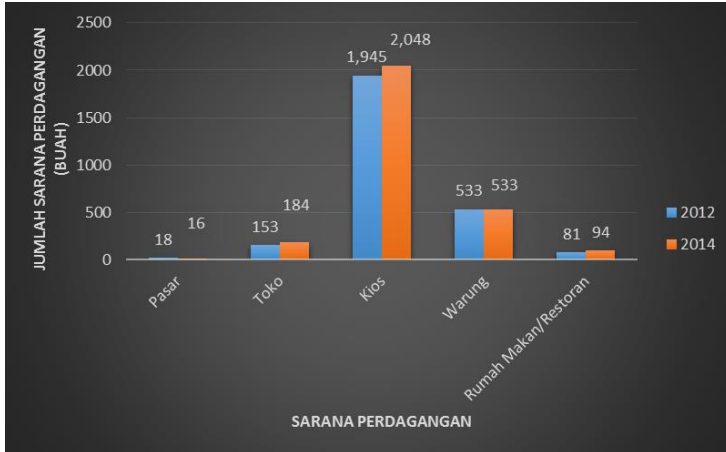
Gambar 12. Grafik Jumlah Pelanggan Telkom di Kabupaten Pohuwato, tahun 2012-2013. (Sumber: *Pohuwato Dalam Angka, 2015*)

4.6.5. Sarana Perdagangan

Aktivitas perdagangan adalah salah satu cerminan dari perkembangan kondisi ekonomi suatu wilayah. Makin aktif kegiatan perdagangan dapat menunjukkan bahwa perekonomian wilayah juga semakin bergerak maju. Selama kurun waktu lima tahun terakhir sektor perdagangan di Kabupaten Pohuwato terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,72 persen. Kontribusi sektor perdagangan juga memberikan peran terbesar ketiga dalam menyokong perekonomian pohuwato dengan nilai kontribusi pada PDRB sebesar 14,74 persen.

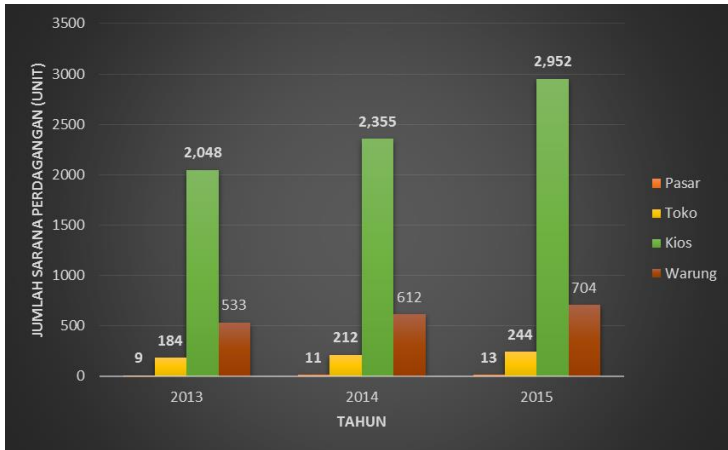
Berlangsungnya aktivitas perdagangan tidak terlepas dari dukungan ketersediaan fasilitas perdagangan. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Pohuwato memiliki 16 pasar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan kondisi bangunan permanen. Sementara itu pada tahun 2014 juga terdapat peningkatan jumlah toko, kios, warung, dan rumah makan dari tahun sebelumnya. Jumlah toko bertambah sebanyak 31 dari 153 toko pada tahun 2012 menjadi 184 toko pada tahun 2014. Sedangkan kios, warung, dan rumah makan masing-masing bertambah menjadi 2.048 kios, 533 warung dan 94 rumah makan.

Untuk menunjang kegiatan ekonominya, masyarakat Kabupaten Pohuwato menggunakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pada tahun 2015, jumlah pasar di Kabupaten Pohuwato adalah 13 pasar. Sarana perdagangan yang paling banyak di kabupaten Pohuwato yaitu kios barang harian dengan jumlah 2.952 kios pada tahun 2015.



Gambar 13. Grafik Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Pohuwato tahun 2012-2014(Sumber: *Pohuwato Dalam Angka, 2015*)

Pelaku kegiatan ekonomi tidak lepas dari para pedagang. Sebagian besar pedagang di Kabupaten Pohuwato yaitu pedagang kecil dengan jumlah 694 orang atau 50,18 persen dari total jumlah pedagang yang ada. Persentase pedagang besar dan menengah di Kabupaten Pohuwato adalah 18,58 persen dan 31,24 persen. Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Pohuwato tahun 2013-2015 tersaji pada Gambar 15 berikut ini:

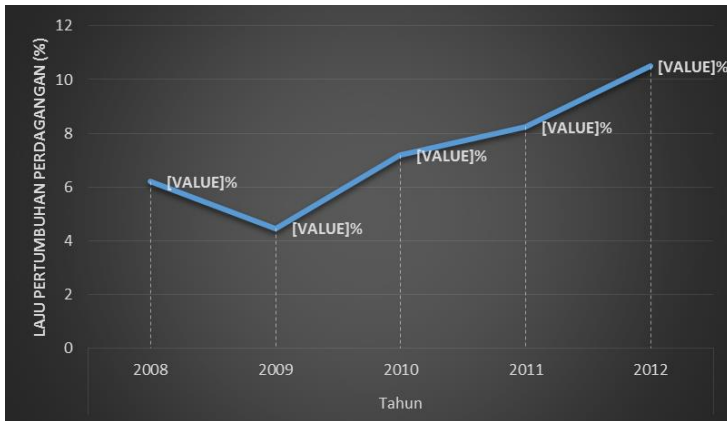


Gambar 14. Grafik Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Pohuwato, 2013-2015. (Sumber: *Pohuwato Dalam Angka, 2016*)

Dari data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten pohuwato, terutama sarana perdagangan dalam bentuk kios. Pada tahun 2013, jumlah kios mencapai 2.048 buah, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 2.355 buah kios, dan pada tahun 2015 meningkat lagi dengan jumlah 2.952 buah kios.

Adapun laju pertumbuhan perdagangan di Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 16 menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 laju pertumbuhan perdagangan di Kabupaten Pohuwato semakin meningkat. Peningkatan tersebut tentu tidak lepas dari peran serta pemerintah yang mendukung sektor perdagangan di Kabupaten Pohuwato. Laju

pertumbuhan perdagangan di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tersaji pada Gambar 15 di bawah ini:

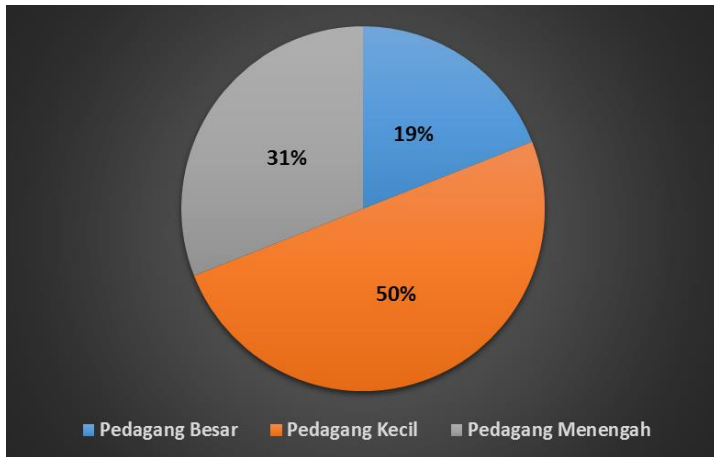


Gambar 15. Grafik Laju Pertumbuhan Perdagangan Kabupaten Pohuwato tahun 2008-2012.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan di bidang perdagangan. Di tahun 2010, laju pertumbuhan perdagangan mencapai 7,18 persen. Setelah itu di tahun 2011 mencapai 8,24% dan pada tahun 2012 jumlahnya semakin meningkat hingga mencapai 10,5 persen.

Distribusi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen (dunia usaha) ke konsumen. Salah satu perantara yang menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen yaitu kelompok pedagang besar (*whole seller*), pedagang menengah(*intermediate traders*) dan pedagang kecil atau pengecer (*retailer*). Adapun persentase jumlah pedagang

menurut kecamatan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Gambar 17 di bawah ini:



Gambar 16. Persentase Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015.

Dari data atas diperoleh bahwa pedagang kecil mendominasi jumlah pedagang di Kabupaten Pohuwato yakni sebesar 50 persen, setelah itu pedagang menengah dengan jumlah 31 persen, dan pedagang besar mencapai 19 persen.

4.6.6. Sarana Hotel dan Pariwisata

Jumlah hotel cenderung mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2014 mengalami sedikit penurunan, dari 20 hotel pada tahun 2012 menjadi 19 hotel pada tahun 2014. Penurunan disini bukan berarti terjadi gulung tikar atau menghilang. Namun dikarenakan hotel tersebut tidak aktif beroperasi selama tahun 2014, karena alasan pembangunan.

Seluruh hotel yang ada di Kabupaten Pohuwato merupakan hotel melati, sedangkan untuk hotel berbintang belum ada.

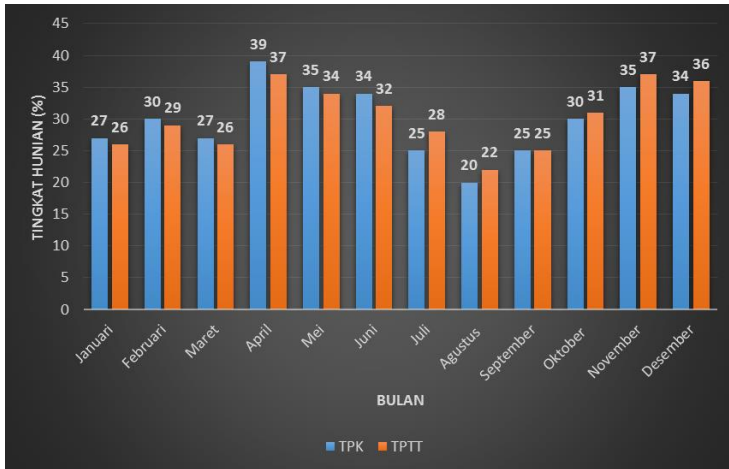
Lokasi Kecamatan Marisa yang merupakan ibukota kabupaten menjadi salah satu alasan terkonsentrasinya sebagian besar hotel dan akomodasi lainnya di wilayah kecamatan ini. Selama tahun 2014, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten Pohuwato berfluktuasi setiap bulannya. Besaran TPK sangat dipengaruhi oleh event-event seperti hari libur atau perayaan-perayaan tertentu. TPK tertinggi terjadi pada Bulan April 2014, yaitu sebesar 38.73 persen.

Artinya dari sekian banyak kamar yang dimiliki oleh hotel, sebesar 38.73 persen terisi. TPK mengalami kecenderungan menurun hingga pada titik terendah yaitu pada bulan Agustus 2014 yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri, yaitu sebesar 21,74 persen. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2012, dimana nilai TPK hanya sebesar 17,71 persen.

Tabel 13. Jumlah hotel, jumlah kamar tersedia tersedia dan Jumlah tempat tidur hotel akomodasi lainnya kabupaten pohuwato, 2009-2014.

No.	Tahun	Jumlahhotel	Jumlah Kamar Tersedia	JumlahTempatTidur
1	2009	14	173	257
2	2010	14	165	288
3	2011	16	202	312
4	2012	20	249	463
5	2014	19	280	491

(Sumber: statistik hotel dan akomodasi lainnya Kabupaten Pohuwato,2015)



Gambar 17. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT) Kabupaten Pohuwato, tahun 2014. (Sumber: *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Pohuwato, 2015*)

4.6.7. Perbankan dan Investasi

Dari segi ketersediaan fasilitasnya, kondisi perbankan di Kabupaten Pohuwato tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012. Jumlah bank yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 16 bank, terdiri atas 6 bank pemerintah, 4 bank pembangunan daerah, dan 6 bank swasta. Lembaga keuangan non bank seperti koperasi yang aktif menjalankan kegiatannya selama tahun 2014 berjumlah 113 koperasi. Koperasi tersebut terdiri atas 16 KUD, 9 KPRI, 11 KSP, 40 KSU, 13 Koperasi Tani, 6 Koperik, 1 KUP, 17 koperasi lainnya.

Tabel 14. Lembaga Keuangan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2014.

No.	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah
Lembaga Keuangan Bank		
1	Bank Pemerintah	6
2	Bank pembangunan daerah	4
3	Bank Swasta	6
Lembaga Keuangan non Bank		
1	KUD	16
2	KPRI	9
3	KSP	11
4	KSU	40
5	Koperta	13
6	Koperik	6
7	KUP	1
8	Koperasi Lainnya	17

(Sumber: Pohuwato Dalam Angka, 2015)

4.7. Pelayanan Perizinan

4.7.1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Pohuwato

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato merupakan unsur pendukung tugas bupati. BPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa investasi memiliki peran yang sangat besar dalam usaha pencapaian menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa apabila tercipta suatu investasi maka *multiplier efek* yang ditimbulkan adalah terjadinya penyerapan tenaga kerja, peningkatan jumlah uang beredar dilingkungan sekitar, meningkatnya aktivitas ekonomi

wilayah, dan akhirnya berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya urusan penanaman modal dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yang terpisah, yaitu Biro Ekonomi Sekretariat Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Akhirnya setelah menilai urgensi bahwa betapa pentingnya investasi, maka penanganan investasi disatukan pada suatu lembaga setingkat eselon II dengan membentuk Badan Investasi Daerah, yang kemudian berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP).

4.7.2. Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)

Adapun tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan pembangunan dibidang penanaman modal, khususnya dalam hal fasilitasi, koordinasi dan promosi investasi.

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, penanaman modal dan perizinan
- b) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan
- c) Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan
- d) Pemantauan dan pengawasan proses pemberian pelayanan perizinan
- e) Penyelenggaraan advokasi perizinan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

4.8. Ketersediaan Dan Potensi Lahan

Kabupaten Pohuwato mengandalkan jagung dan padi sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 hektar, bahkan tercatat masih ada seluas 19.000 hektar lahan yang belum terkelola. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 hektar lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar Untuk pengembangan antara lain: perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan.

Potensi pertanian ini mencakup pemanfaatan lahan basah dan lahan kering. Untuk lahan basah dimanfaatkan untuk sawah dan bukan sawah. Sementara itu untuk lahan kering, umumnya dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi jagung, perkebunan dan tanaman hortikultura. Adapun luas penggunaan lahan di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2013 sampai 2016 tersaji pada Tabel 15 dan Tabel 16 berikut ini:

Tabel 15. Luas Penggunaan Lahan (ha) di Kabupaten Pohowato tahun 2013-2015

No.	Penggunaan Lahan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Sawah yang Diolah	3.717	3.886	3.900
2	Sawah yang Belum Diolah	135	82	2.785
3	Tegalan/Kebun	49.224	43.124	40.803
4	Ladang/Huma	13.679	13.316	15.495
5	Penggembalaan/Padang Rumput	5.454	5.621	1.100
6	Rawa-rawa yang Tidak Ditanami	-	750	-
7	Hutan Negara, Tambak, Kolam/Tebat/Empang	76.803	147.947	223.252
8	Lahan Kering yang Sementara Tidak Diusahakan	46.220	36.241	21.073
9	Hutan Rakyat/Tanaman Kayu-Kayuan	21.773	21.784	20.851
10	Perkebunan	19.529	19.351	21.648
11	Lain-Lain	187.896	132.329	73.523
T O T A L		424.430	424.431	424.430

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohowato 2016)

Pengertian Penggunaan lahan adalah segala campuran manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya (Malingreau, 1977).

Dalam rangka pembangunan nasional dan sektoral pengelolaan sumber daya lahan dan aspek pendukungnya menempati posisi yang semakin penting. Kenyataan ini ditunjukkan dengan makin tingginya kegiatan pemerintah dan

masyarakat yang langsung berhubungan dengan fungsi lahan. Penggunaan lahan berubah menurut ruang dan waktu, hal ini disebabkan karena lahan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Bertambahnya jumlah manusia yang mendiami permukaan bumi diikuti perkembangan kegiatan usaha dan budayanya maka semakin bertambah pula tuntutan kehidupan yang dikehendaki untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan persediaan lahan yang cukup untuk menopang kehidupan manusia di atasnya, maka diperlukan usaha-usaha pengelolaan penggunaan lahan.

Tabel 16. Luas Penggunaan Lahan (Ha) Di Kabupaten Puhuwato 2016

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
1	Popayato	0	6.701	2.392
2	Popayato Barat	205	53.500	4.119
3	Popayato Timur	0	70.894	1.480
4	Lemito	0	33.136	28.814
5	Wanggarasi	11	14.754	4.043
6	Marisa	0	2.384	1.081
7	Patilanggio	531	20.892	8.457
8	Buntulia	305	37.128	131
9	Duhiadaa	1.464	1.609	880
10	Randangan	349	15.101	17.740
11	Taluditi	554	14.194	1.249
12	Paguat	215	54.253	1.625
13	Dengilo	425	21.878	1.936
TOTAL		4.059	346.425	73.946

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Puhuwato, tahun 2016)

4.8.1. Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kacang kedelai, kacang hijau. Luas panen dan produksi tanaman pangan Kabupaten Pohuwato menurut kecamatan (hektar) tahun 2015 tersaji dalam Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Luas Panen Dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan (Hektar) 2015.

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Jagung		Kedelai	
		Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
1	Popayato	0,0	0,0	3.901,0	21.904,1	0,0	0,0
2	Popayato Barat	368,0	2.038,0	5.654,0	33.217,3	30,0	44,8
3	Popayato Timur	0,0	0,0	3.965,0	25.915,2	0,0	0,0
4	Lemito	0,0	0,0	3.650,0	19.801,3	0,0	0,0
5	Wanggarasi	0,0	0,0	5.083,0	29.064,6	70,0	106,6
6	Marisa	0,0	0,0	2.873,0	16.812,8	0,0	0,0
7	Patilanggio	855,0	5.020,6	7.329,0	52.827,4	0,0	0,0
8	Buntulia	591,0	4.129,3	2.502,0	14.711,8	0,0	0,0
9	Duhiadaa	3.130,0	21.071,2	257,0	1.315,8	0,0	0,0
10	Randangan	122,0	680,3	8.848,0	64.209,9	261,0	418,1
11	Taluditi	1.051,0	6.168,3	5.200,0	37.278,8	880,0	1.431,8
12	Paguat	430,0	2.626,9	4.228,0	27.608,8	0,0	0,0
13	Dengilo	668,0	4.115,5	3.859,0	25.785,8	105,0	158,4
T O T A L		7.215,0	45.850,0	57.349,0	370.453,7	1.346,0	2.159,7

(Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2015)

Padi

Padi merupakan tanaman pangan pokok terluas kedua setelah jagung. Selain itu, sektor pertanian khususnya komoditas padi memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang mana juga diharapkan dapat menjadi

salah satu komoditas andalan penyumbang devisa negara dari sektor nonmigas. Pada tahun 2015 luas panen padi mencapai 7.215 hektar. Sedangkan produksi padi di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2015 berada pada angka 45.850 ton. Adapun jumlah produksi padi di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2011 sampai 2015 tersaji pada Gambar 19 berikut ini:



Gambar 18. Produksi Padi (Ton) di Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 – 2015. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2015)

Produksi padi dan kebutuhan akan beras merupakan hal mutlak yang harus selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan untuk mencegah permintaan akan beras yang lebih besar daripada produksi padi para petani. Karena jika terjadi demikian maka kesejahteraan masyarakat akan terhambat akibat kekurangan bahan pangan pokok. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah-masalah

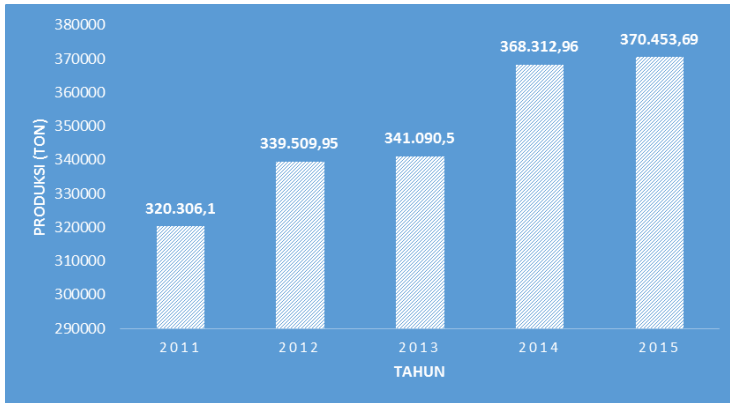
di bidang lainnya di badan pemerintahan seperti di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)

Fasilitasi bantuan sarana produksi (saprodi), tanamjajar legowo, pertemuan kelompok pada seluruh areal program GP-PTT sebagai instrument stimulant disertai dengan dukungan pembinaan, pengawalan dan pemantauan oleh berbagai pihak. Luas GP-PTT padi provinsi Gorontalo tahun 2015 sebesar 8.500 hektar, untuk Kabupaten Pohuwato sendiri memperoleh alokasi luas GP-PTT sebesar 2.000 hektar.

Jagung

Kabupaten Pohuwato memiliki areal ladang jagung di sepanjang jalan trans-Sulawesi yang menjadi modal perekonomian dan bahkan menjadikan kabupaten Pohuwato sebagai penghasil jagung pipil dalam skala provinsi. Sekitar 40 persen jagung dari Provinsi Gorontalo disumbangkan oleh kabupaten Pohuwato. Luas panen jagung untuk tahun 2015 meningkat sebesar dari 68.896 hektar menjadi 69.592 hektar.



Gambar 19. Grafik Produksi Jagung (Ton) Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2015 (Sumber: BPS Pohuwato, Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2016).

Jagung diperdagangkan di dalam negeri dalam bentuk perdagangan antar pulau, juga diekspor. Volume perdagangan jagung antar pulau lebih banyak dari volume ekspor. Hal ini karena harga jagung dalam negeri lebih tinggi dari harga jagung di pasar dunia. Harga jagung rata-rata dalam negeri di tingkat produsen tahun 2012 sebesar 3.106 rupiah/kg, di tingkat konsumen 5.501 rupiah/kg dan harga jagung di pasar dunia 2.766 rupiah/kg. Harga jagung di Provinsi Gorontalo berkisar antara 2.800 rupiah-3000 rupiah per kg pipilan kering (harga tanggal 02 Juni 2014) untuk kadar air 17% (Sumber: Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2015).

Perusahaan-perusahaan yang menampung dan membeli jagung dari petani yaitu: UD Kemiri Putih, PTHarim (Korea), Mitra Agro Marketing, Manna Utara

Sejahtera, Isimu Sejati Makmur Utama, CV Utami dan Mitra Mandiri Agri Makmur.Usahatani jagung menghasilkan pendapatan bagi petani dalam waktu yang relatif singkat, 3 bulan, dengan 2-3 kali tanam setiap tahun. Sedangkan luas GP-PTT Jagung tahun 2015 untuk daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebesar1.000 hektar.

Kedelai

Kedelai merupakan tanaman pangan pokok sebagai sumber protein dan sebagai makanan fungsional. Konsumsi kedelai Indonesia priode 2010-2013 meningkat rata-rata 13,7 persen per tahun dari 1.830 ton juta menjadi 30.183 juta ton. Akibatnya, selama periode tersebut kesenjangan produksi dan konsumsi semakin besar.

Produksi kedelai tahun 2015 sebesar 2.159,7 ton biji kering ha. Produksi kedelai di Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan setelah sebelumnya di tahun 2014 sebesar 3.020,70 ton. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya luas lahan panen kedelai dari 1.954 ha menjadi 1.346,0 hektar. Dalam mensukseskan program pertanian di Kabupaten Pohuwato juga dikembangkan pengembangan pertanian terpadu yang melibatkan berbagai dinas yang terkait seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Dukungan SKPD Terkait Yang Diharapkan Untuk Pengembangan Pertanian Terpadu

No	Jenis Kegiatan	SKPD Terkait di Kabupaten
1	Jalan usaha tani, irigasi lahan kering, perbaikan saluran dan irigasi	Dinas PU Kimpraswil
2	Pengembangan komodits dan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis Kegiatan	SKPD Terkait di Kabupaten
	pendukung kegiatan pertanian teririgasi	Pertanian Kabupaten Pohuwato
3	Unit pelayanan saprodi, perkoperasian, lembaga keuangan desa, KUR	Dinas Koperindag Kabupaten Pohuwato
4	Pengelolaan dan pemasaran hasil serta industry ruah tagga dan pengembangan UMKM	Dinas Lingkungan Hidup Pertanian Kabupaten Pohuwato Dan Dinas Koperindag
5	Pemanfaatan limbah tanaman untuk pakan ternak, pengembangan biogas dan pupuk organic	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
6	Pengembangan perikanan	Dinas Kelautan-Perikanan
7	Agro/ekowisata	Dinas Pariwisata
8	Pehijauan/agro forestry	Dinas Kehutanan
9	Pengembangan sarana prasarana pedesaan	BPMD-PDT
10	Pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan wirausaha baru	Dinas Nakertrans

4.8.2. Pengembangan Komoditas

Salah satu sektor yang unggul di Kabupaten Pohuwato adalah sektor pertanian dengan sub sektor tanaman pangan. Berdasarkan hasil analisis, jenis komoditas unggulan sector pertanian tanaman pangan yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut untuk dalam sektor pertanian adalah komoditas padi, jagung, ubi kayu dan kedelai.

Agar komoditas unggulan memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian wilayah, maka komoditas unggulan kemudian diolah agar memiliki nilai tambah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas adalah faktor produksi

(kapasitas produksi); faktor sumber daya manusia (jumlah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan upah tenaga kerja); faktor produk olahan (kualitas produk olahan, harga jual produk olahan dan manajemen pengolahan), faktor bahan baku (kuantitas bahan baku, kualitas bahan baku dan harga bahan baku); dan faktor pasar (manajemen pemasaran).

Arahan pengembangan komoditas unggulan pertaniannya yaitu mengembangkan kegiatan penanganan primer (pasca panen) yang ditujukan sebagai penyediaan bahan baku yang berkualitas untuk kegiatan pengolahan selanjutnya, dan kegiatan penanganan sekunder (pengolahan) di dalam kawasan komoditas basis padi, jagung, ubi kayu, dan kacang kedelai.

4.8.3. Penentuan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor untuk meningkatkan nilai tambah adalah Faktor Produksi, Kapasitas Produksi, Faktor Teknologi, Penggunaan Teknologi, Faktor Sumber Daya Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Kualitas Tenaga Kerja, Upah Tenaga Kerja, Faktor Produk Olahan, Kualitas Produk Olahan, Manajemen Pengolahan, Harga Jual Produk Olahan, Bahan Baku, Kuantitas Bahan Baku, Kualitas Bahan Baku, Harga Bahan Baku, Pemasaran, Manajemen Pemasaran.

4.9. Arahan Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan melalui Pendekatan Agribisnis di Kabupaten Pohuwato

4.9.1. Komoditas Padi

- a. Arahan pengembangan kegiatan penanganan primer komoditas padi adalah dengan pengadaan alat & mesin pemanenan, perontokan dan pengeringan;

mengoptimalkan penggunaan gudang dan RMU di Kabupaten Pohuwato karena memiliki produksi padi yang cukup tinggi.

- b. Arahan pengembangan kegiatan penanganan sekunder komoditas padi adalah mengembangkan industri pengolahan beras, panganan, dedak dan sekam.
- c. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengolahan tersebut adalah:
 1. Teknologi : Perbaiki mutu beras dan penerapan sistem manajemen mutu pada penggilingan padi, pengadaan alat penepung yang sesuai dengan bahan baku beras; perbaiki sistem penggilingan gabah;
 2. Sumber Daya Manusia : Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat seperti melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan secara terprogram mengenai pengembangan dan pengolahan industri pengolahan beras, panganan, dedak dan sekam;
 3. Produk Olahan : Memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang bergerak dibidang pengolahan produk seperti cara pemilihan dan pengolahan bahan baku, proses pembuatan hingga cara pengemasan produk yang baik dan menarik agar bisa dipasarkan secara lebih luas;
 4. Bahan Baku: Peningkatan kualitas komoditas padi sebagai bahan baku produk olahan pangan dapat dilakukan melalui pembudidayaan bibit dengan varietas unggul;

5. Pemasaran: Perluasan jaringan pasar dengan menggunakan sistem informasi untuk memasarkan hasil produk olahan berupa beras, panganan, dedak dan sekam; melakukan program kemitraan antara kelompok tani dengan swasta untuk mempermudah aliran pemasaran.

4.9.2. Komoditas Ubi Kayu

- a. Arahan pengembangan kegiatan penanganan primer komoditas ubi kayu adalah dengan memperhatikan umur panen, peningkatan kualitas sarana pengupasan ubi kayu, pengadaan fasilitas pencucian dan gudang penyimpanan ubi kayu di Kabupaten Pohuwato karena memiliki produksi ubi kayu yang cukup tinggi.
- b. Arahan pengembangan kegiatan penanganan sekunder komoditas ubi kayu adalah mengembangkan industri pengolahan pakan ternak, tape, gaplek dan sawit.
- c. Adapun faktor–faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengolahan tersebut adalah:
 1. Sumber Daya Manusia: Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat seperti melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan secara terprogram mengenai pengembangan dan pengolahan industri pakan ternak, tape dan gaplek;
 2. Produk Olahan: Memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang bergerak dibidang pengolahan produk seperti cara pemilihan dan pengolahan bahan baku, proses pembuatan hingga cara

pengemasan produk yang baik dan menarik agar bisa dipasarkan secara lebih luas;

3. Bahan Baku: Peningkatan kualitas komoditas ubi kayu sebagai bahan baku produk olahan pangan dapat dilakukan melalui pembudidayaan bibit dengan varietas unggul misalnya singkong gajah di Kabupaten Pohuwato;
4. Pemasaran: Perluasan jaringan pasar dengan menggunakan sistem informasi untuk memasarkan hasil produk olahan berupa pakan ternak, tape dan gaplek, serta melakukan program kemitraan antara kelompok tani dengan swasta untuk mempermudah aliran pemasaran.

4.9.3. Komoditas Kacang Kedelai

- a) Arahan pengembangan kegiatan penanganan primer komoditas kacang kedelai adalah pengadaan alat & mesin pengeringan, pembijian, pembersih; pengadaan gudang penyimpanan serta peningkatan kualitas wadah penyimpanan;
- b) Arahan pengembangan kegiatan penanganan sekunder komoditas kacang kedelai adalah mengembangkan industri pengolahan tahu, tempe, susu dan bungkil.
- c) Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengolahan tersebut adalah :
 1. Sumber Daya Manusia: Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat seperti melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan secara terprogram mengenai pengembangan dan

- pengolahan industri tahu, tempe, susu dan bungkil di masing – masing Kabupaten/Kota;
2. Produk Olahan: Memberikan pelatihan terhadap masyarakat yang bergerak dibidang pengolahan.

4.9.4. Hortikultura

Peran subsektor hortikultura di dalam perekonomian bisa lebih makin diharapkan. Hal ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2014 tentang pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura 12 April lalu. PP ini menegaskan, pemerintah atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada usaha hortikultura yang merupakan:

- a. Usaha hortikultura mikro dan kecil;
- b. Usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
- c. Usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;
- d. Usaha budidaya organik (menggunakan bahan alami, menjaga keseimbangan lingkungan dan siklus lainnya);
- e. Usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan (memenuhi kriteria baru, aplikatif, memberi nilai tambah, bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai sosial, budaya dan lingkungan).

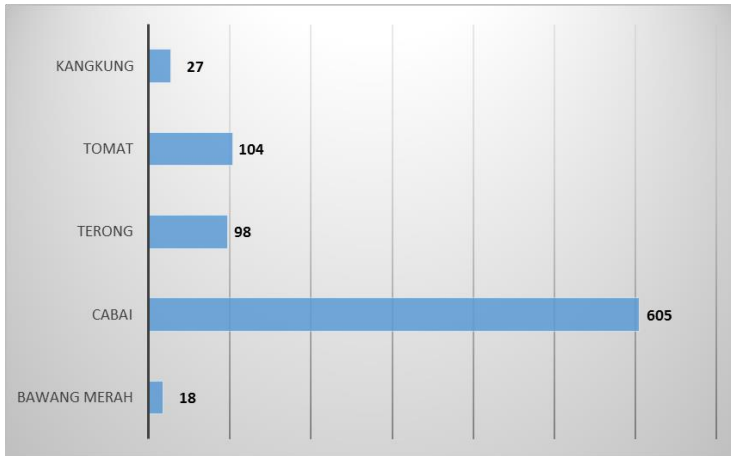
Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, kangkung, cabai besar, cabai rawit, sawi, buncis, petsai, terong, dan tomat) dan buah-buahan (durian, manga, nangka, nenas, papaya, pisang dan rambutan).

4.9.5. Sayur-Sayuran

Sayuran merupakan komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Produksi sayuran Indonesia meningkat setiap tahun dan konsumsinya tercatat 44 kilogram per kapita per tahun (Adiyoga, 1999). Laju pertumbuhan produksi sayuran di Indonesia berkisar antara 7,7-24,2 persen per tahun. Beberapa jenis sayuran, seperti bawang merah, cabai rawit, petsai/sawi, dan mentimun peningkatan produksinya merupakan dampak dari penerapan teknologi budidaya (Suwandi, 2009).

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah penghasil cabai rawit di provinsi Gorontalo. Areal panen cabai rawit di tahun 2015 seluas 605 hektardengan produksi 1.889 ton. Produksi cabai diperdagangkan antar pulau ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Dan Jawa. Daerah Kabupaten Pohuwato masuk dalam sentra produksi cabai di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Pohuwato memiliki varietas unggul lokal yaitu cabai rawit varietas 'Malita FM' yang mengandung kalori 75,54 kkal, protein 6, 16%, lemak 2,06%, karbohidrat 8,09%, kalsium 0,04%, fosfor 1,96 ppm, besi 0,006%, vitamin C 67,92 mg/100 g, dan air 78,58%. Total luas panen sayur-sayuran di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Gambar 21 di bawah ini:



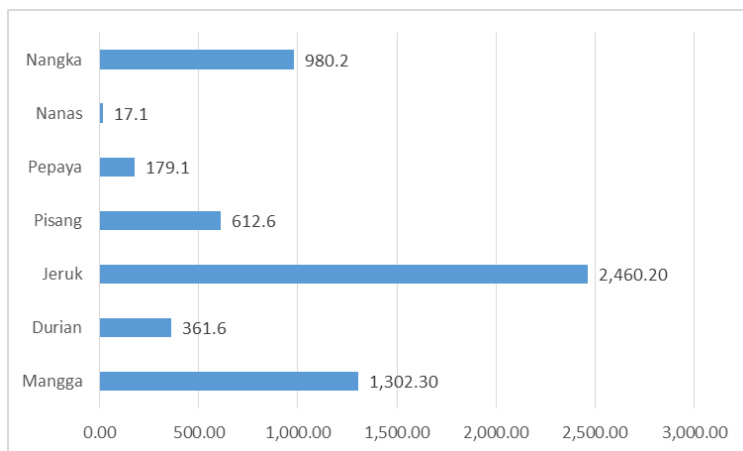
Gambar 20. Grafik Luas Panen (Ha) Sayur-Sayuran di Kabupaten Pohuwato 2015 (*Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2016*)

Cabai unggul lokal Malita FM ini telah dilepas oleh menteri pertanian sebagai cabai unggul nasional melalui SK Mentan No. 439/Kpts/SR.120/4/2008. Keunggulan Malita FM adaptasinya yang cukup luas pada ketinggian 50-1500 meter di atas permukaan laut, toleran terhadap curah hujan dan suhu tinggi, tingkat produksinya 15 ton per ha dan tahan simpan, tahan hama penyakit memiliki kekhasan untuk bumbu masak yakni tajam rasanya dan menyengat. Komoditi utama hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Pohuwato yaitu:

- a) Buah-buahan : Jeruk, mangga, nangka dan pisang
- b) Sayuran : cabai, tomat, kangkung, terong dan bawang merah

4.9.6. Buah-Buahan

Buah-buahan merupakan bahan pangan sumber vitamin dari jenis tanaman hortikultura. Adapun produksi buah-buahan terbesar di Kabupaten Pohuwato adalah jeruk dengan jumlah produksi di tahun 2015 sebesar 2.460,2 ton yang sebagian besar berasal dari kecamatan Randangan. Sedangkan untuk jenis buah-buahan lainnya adalah mangga, durian, pisang, pepaya, nanas dan nangka. Adapun total produksi buah-buahan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Gambar 22 berikut ini:



Gambar 21. Total Produksi (ton) Buah-Buahan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015. (Sumber: Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2015)

Umumnya masyarakat lebih menyukai buah-buahan dalam bentuk segar dan dihidangkan di meja makan sebagai hidangan penutup atau lazim juga disebut sebagai makanan

pencuci mulut daripada buah yang sudah diolah menjadi bentuk lain, seperti contoh konsumen lebih menyukai mangga dalam bentuk segar dibandingkan dengan manisan serta buah nanas dalam keadaan segar daripada diolah menjadi sirup.

4.10. Peluang Investasi

Adapun peluang investasi bidang pertanian yang dimiliki Kabupaten Pohuwato, meliputi :

1. Usaha Jasa Hasil Pertanian, meliputi :
 - a) Lokasi : semua kecamatan di Kabupaten Pohuwato
 - b) Jenis : semua jenis komoditi pertanian
2. Peluang Investasi Di Bidang Pertanian Budidaya, meliputi :
 - a) Pengembangan komoditi jagung yaitu Kecamatan Randangan,
 - b) Pengembangan komoditi padi sawah
3. Usaha Pembibitan, meliputi :
 - a) Tanaman hias/bunga dan Sayur-sayuran berupa : tomat, kubis, cabai, kol, kentang, wortel, bawang di kecamatan Randangan, Popayato, Paguat, dan Patilanggio
 - b) Industri Pengolahan Hasil Pertanian, meliputi : Industri pengolahan buah terpadu (pengalengan buah) dan industri makanan dan minuman (sari buah)
 - (1) Kecamatan Randangan untuk buah pengolahan buah jeruk
 - (2) Kecamatan Popayato Timur dan Patilanggio untuk pengolahan buah Mangga

- (3) Kecamatan Paguat dan Randangan untuk pengelolaan buah Nangka.
4. Industri pengolahan tepung tapioka di Kecamatan Dengilo, Taluditi dan Buntulia (sebagai penghasil ubi kayu terbesar di Kabupaten Pohuwato)
5. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi di Kecamatan Duhiada dan Taluditi. Sedangkan untuk pakan ternak dari limbah jagung hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato.
6. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan di Kecamatan Taluditi dan Duhiada.
7. Pengembangan Industri Tepung Beras di kecamatan Duhiada.
8. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian di semua kecamatan, khususnya di kecamatan dengan produktifitas padi terbesar yaitu di Kecamatan Duhiada dan Taluditi.
9. Pengembangan lahan sawah; dan Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung di semua kecamatan.

4.11. Sumber Daya Perkebunan

Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau sub tropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman keras/industri seperti kakao, kelapa, dan kopi, atau tanaman hortikultura seperti pisang, atau anggrek.

Perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara

monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Penciri lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli. Adapun luas areal panen dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tersaji pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Luas Areal Panen Dan Produksi Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2015

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (Hektar)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	16.821,2	27.936, 12
2	Kakao	5.689	7.397
3	Cengkeh	22,50	2,25
4	Kopi	68, 14	7,26
5	Jambu Mete	374,00	127,85

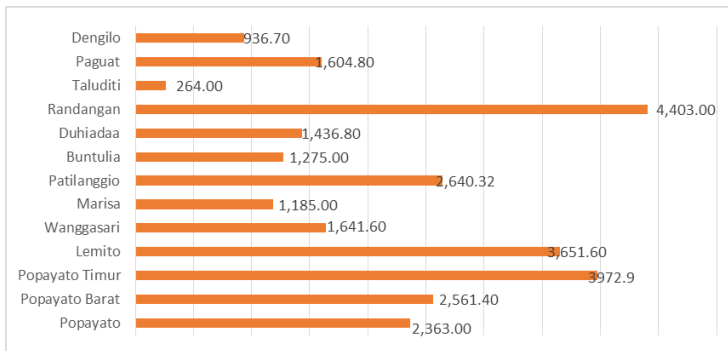
(Sumber: Kabupaten Pohuwato Dalam Angka, 2016)

Pada dasarnya, pengaruh iklim, letak geografis, tingkat kemiringan lahan, tekstur dan jenis tanah daerah Kabupaten Pohuwato sangat cocok untuk pengembangan sektor perkebunan. Namun karena alasan yang sama pula, tidak semua kecamatan cocok untuk semua komoditi perkebunan. Oleh karenanya sektor perkebunan ini dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi disebabkan oleh pola perkebunan tradisional dan tidak menggunakan teknologi tinggi,

4.11.1. Potensi Kelapa

Komoditi kelapa menjadi unggulan di Kabupaten Pohuwato Produksi kelapa di Kabupaten Pohuwato mencapai 27.936,12ton di tahun 2015. Kelapa

memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Buah kelapa diolah menjadi kopra, minyak kelapa dan dikonsumsi segar dalam bentuk santan dan kelapa muda. Pengolahan minyak kelapa dilakukan dalam skala rumah tangga yang menghasilkan minyak klentik. Pengolahan skala besar dilakukan oleh PT. Multi Nabati Sulawesi di Kabupaten Pohuwato.



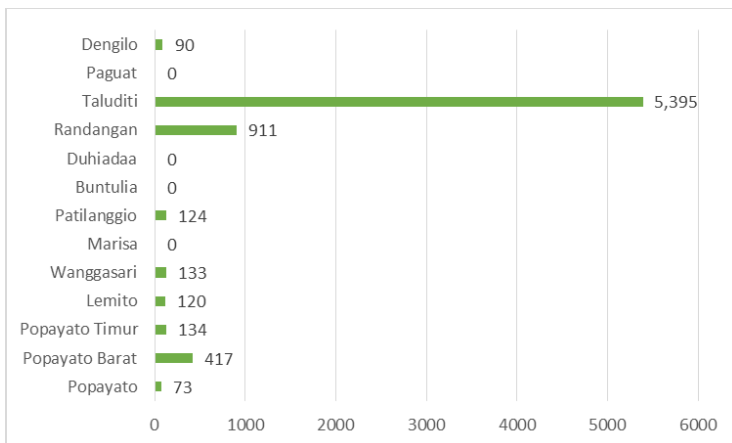
Gambar 22. Grafik Produksi Kelapa (ton/ha/tahun) Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan Tahun 2015. (Sumber: BPS Pohuwato, 2016).

4.11.2. Potensi Kakao

Kakao adalah tanaman perkebunan terluas setelah kelapa. Luas areal kakao tahun 2015 sebesar 5.689ha dengan jumlah produksi 7.397 ton. Kabupaten Pohuwato juga merupakan daerah sentra pengembangan kakao setelah Kabupaten Boalemo.

Masalah utama yang dihadapi dalam usaha pengembangan komoditi kakao yaitu: (1) produktivitas kakao yang rendah yaitu rata-rata 0,9-1,1 ton/ha/tahun sementara

potensi produksi minimal 1,5 ton/ha/tahun; (2) pengolahan biji kakao dengan teknik fermentasi belum diterapkan secara luas karena harga biji fermentasi dan biji tanpa fermentasi sama; dan (3) lahan pengembangan kakao yang tersedia adalah lahan marginal.



Gambar 23. Grafik Produksi Kakao (ton/ha/tahun) Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan Tahun 2015

Rencana program dan kegiatan di bidang perkebunan

Program dan kegiatan di bidang perkebunan mengacu pada Rencana Strategi Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu program dan kegiatan perkebunan lebih diarahkan pada 2 (dua) program utama, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim;
 - b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;
 - c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan;
 - d. Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan;
 - e. Dukungan perlindungan perkebunan;
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya oleh Direktorat Jenderal perkebunan.

Peluang investasi

Adapun yang menjadi peluang investasi bidang perkebunan di Kabupaten Pohuwato adalah:

1. Usaha Perdagangan dan Hasil Perkebunan, meliputi :
Lokasi : seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato
Jenis : semua jenis hasil perkebunan terutama komoditi unggulan
2. Usaha Budidaya, meliputi :
Kelapa dan kakao di Marisa dan Dengilo mengingat produktifitas kelapa masih rendah di dua kecamatan tersebut.
3. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, meliputi :
 - a) Industri pengolahan minyak goreng di semua kecamatan;

- b) Industri pengolahan minyak atsiri berupa nilam, serih wangi, pala dan lain-lain beserta turunannya;
- c) Industri pengolahan buah kelapa (menjadi nata de coco) di Kecamatan Randangan, Popayato Timur, dan Lemito agar lebih dekat dengan bahan baku utama. Mengingat ketiga kecamatan tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar di Kabupaten Pohuwato.

4.12. Sumber Daya Peternakan

Pengembangan peternakan merupakan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, mengingat sub sektor ini bisa diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian. Populasi hewan ternak terbesar adalah sapi potong dan kambing. Pada tahun 2015, jumlah sapi potong mencapai angka 28.265 ekor sedangkan kambing mencapai angka 12.105 ekor. Sedangkan Populasi unggas yang terbesar adalah ayam kampung dengan jumlah 210.798 ekor.

Tabel 20. Rekapitulasi Populasi Per Jenis Ternak Kabupaten Pohuwato Tahun 2015.

No.	Jenis Ternak	Jantan (ekor)			Betina (ekor)			Total
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa	
1	Kerbau	0			0			0
2	Kuda	17			14			31
3	Sapi Potong	2.885	3.088	3.526	3.235	3.939	12.094	28.767
4	Sapi Perah	0	0	0	0	2	0	2
5	Babi	6.152						6.152
6	Domba	0						0
7	Kambing	12.311						12.311
8	Kelinci	269						269
9	Ayam Buras	213.741						213.741

No.	Jenis Ternak	Jantan (ekor)			Betina (ekor)			Total
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa	
10	Ayam Ras Pedaging	5.225						5.225
11	Ayam Ras Petelur	11.252						11.252
12	Merpati	768						768
13	Burung Puyuh	6.788						6.788
14	Itik	9.123						9.123
15	Itik Man Ila	5.208						5.208
16	Anjing	7.198						7.198

(Sumber : Data Kementerian Peternakan, 2016)

Rencana Program dan Kegiatan Bidang Peternakan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, meluncurkan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Kegiatan yang dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- 2) Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- 3) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan strategis;
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
- 5) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
- 6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Peternakan.

Program Pemerintah Kabupaten Pohuwato Di Bidang Peternakan

Program Pemerintah Kabupaten Pohuwato di bidang peternakan adalah: Program Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktifitas Hasil Peternakan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Penerapan Teknologi Peternakan, dengan kegiatan utamanya:

- 1) Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- 2) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat;
- 3) Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, melalui penyediaan vaksin dan obat-obatan ternak; dan
- 4) Pengembangan kawasan peternakan terpadu dan terintegrasi dengan program pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Peluang Investasi

- 1) Pembangunan Industri makanan (Pengalengan Daging Sapi, pembuatan abon sapi) di kecamatan Randangan, Taluditi dan Paguat sebagai penghasil sapi potong terbesar di Kabupaten Pohuwato
- 2) Penggemukan sapi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato
- 3) Pengembangan ternak ayam (petelur dan pedaging); di semua kecamatan
- 4) Pengembangan Industri biogas (limbah kotoran hewan) di Kecamatan Taluditi dan Randangan.

4.13. Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Luas laut Indonesia dua pertiga dari daratannya. Total luas laut Indonesia adalah 3,544juta km² (Perikanan dan kelautan dalam angka,2010). Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua didunia setelah Kanada dengan panjang 104.000 km (Bakokorsunal, 2006). Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Kemendagri, 2008). Maka, dengan gambaran sumberdaya alam yang melimpah di laut dan pesisir sudah selayaknya pembangunan Indonesia berorientasi pada maritim.

Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di Kabupaten Pohuwato mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain: Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Sedangkan di Kabupaten Pohuwato Produksi perikanan pada tahun 2015 sebesar 32.245,63 ton terdiri dari perikanan tangkap 14.363,97 ton dan perikanan budidaya 17.881,66 ton.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi sebagai usaha pengembangan perikanan. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya.

Tabel 21. Potensi Sumber Daya Kelautan Kabupaten Kelautan
2015

No.	Lokasi (Kecamatan)	POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN			
		Ekosistem Mangrove (Ha) *	Ekosistem Terumbu Karang (Ha) **)	Ekosistem Lamun (Ha) ***)	Pulau- Pulau Kecil
1	Paguat	606,88	1.000,89	380,9 0	3 Pulau
2	Dengilo				
3	Buntulia				
4	Marisa	518,59	335,04	90,60	3 Pulau
5	Duhiadaa	1.634,20			-
6	Patilanggio	1.052,86	-	-	-
7	Randangan	4.508,31	-	-	-
8	Taluditi				
9	Wanggarasi	3.120,38	2.685,27	444,1 0	26 Pulau
10	Lemito	1.464,04			
11	Popayato Timur	716,02	1.235,84	49,37	17 Pulau
12	Popayato	903,78			
13	Popayato Barat	1.075,62			
TOTAL		15.600,68	5.257,04	964,9 7	49 Pulau

Keterangan:

*) = Sumber Data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo, 2011

** = Sumber Data Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut, Bakosurtanal, 2008

)

** = Sumber Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, 2015

*)

Wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki 49 pulau-pulau kecil, panjang garis pantai 86 mil atau 164 Km, luas perairan teritorial kurang lebih 3.292,71 Km², luas ekosistem mangrove 9.083 Hektar, luas kawasan terumbu karang 2.747,81 Hektar dan luas padang lamun 975,92 Hektar. Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki adalah seperti adanya Illegal Fishing, harga Ikan yang rendah, dan rendahnya mutu hasil perikanan.

Illegal Fishing merupakan masalah laten yang dihadapi bangsa ini. Penyebab Illegal fishing sangat kompleks mulai dari luas perairan Indonesia yang besar, keamanan yang lemah dan nelayan kecil yang tak mampu menjangkau sumberdaya ikan di laut bebas. Luas perairan yang besar ditambah adanya pengamanan yang lemah dari pemerintah menjadi jalan masuk terjadinya illegal fishing.

Tabel 22. Jumlah Produksi Perikanan Laut Dan Darat (ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Perikanan						
		Perikanan Laut/Tan gkap	Perikanan Budidaya					
			Air Payau			Air Tawar	Air Laut	
			Band eng	Udang Windu	Udang Vaname	Ikan Nila	Rumput Laut	Kera pu
1	Buntulia	-	-	-	-	-	-	-
2	Dengilo	-	-	-	-	-	-	-
3	Duhiadaa	1.044,11	88,22	0	47,25	5,1	-	-
4	Lemito	1.239,93	46,1	0	31,25		13.136	
5	Marisa	2.965,20	-	-	-	0,84	-	-
6	Paguat	4.197,54	43,92	0.1	35,17	9,97	-	-
7	Patilangi o	568,20	65,75	0.4	5,1	1,29	-	-
8	Popayato	2.356,73	590,8		29,2		640	2,72
9	Popayato Barat	-	-	-	-	-	-	-
10	Popayato Timur	-	-	-	-	-	-	-
11	Randangan	1.163,43	2.066,65	9.31	52,5	1,97	-	-
12	Taluditi	828,83	972,05	-	-	-	-	-

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2016)

Tabel 23.Potensi Perikanan Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 – 2014

No.	Kecamatan	Potensi				Eksisting					
		KJA (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Mutiara (Ha)	Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	KJA (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Mutiara (Ha)	Tambak (Ha)	Kolam (Ha)
1	Pagaut	100.00	1.500.00	-	350.00	50.00	1.00	19.00	-	115.14	11.70
2	Dengilo	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	21.30
3	Marisa	150.00	250.00	-	50.00	5.00	5.00	4.00	-	38.00	0.63
4	Duhiadaa	-	-	-	250.00	100.00	-	-	-	197.00	18.60
5	Buntulia	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	5.39
6	Patilanggjo	-	-	-	500.00	50.00	-	-	-	420.00	4.00
7	Randangan	-	-	-	7,200.00	200.00	-	-	-	5,308.00	37.10
8	Taluditi	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	15.62
9	Wanggarasi	200.00	1.500.00	-	1,000.00	5.00	1.00	2.03	-	408.00	-
10	Lemito	500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	5.00	2.00	53.22	80.00	621.69	1.60
11	Popayato Timur	50.00	500.00	-	100.00	1.00	2.00	14.90	-	52.00	-
12	Popayato	500.00	1,000.00	-	500.00	50.00	8.54	7.21	-	252.81	-
13	Popayato Barat	250.00	1,000.00	-	400.00	5.00	1.00	46.21	-	267.00	4.00
	Jumlah	1,750.00	9,250.00	1,000.00	11,350.00	846	20.54	146.57	80.00	7,679.64	119.94
	Budidaya Laut		12,000					247.11			
	Budidaya Air Payau				11,350	846				7,679.64	
	Budidaya Air Tawar										119.94
	Total			24,196					8,047		

(Sumber : BPS Tahun 2014 *) DPPKP Tahun 2014 (Angka sementara)

Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) pada tahun 2012 telah dilaksanakan di 6 desa pesisir yang tersebar di sepanjang teluk tomini dan laut Sulawesi yang salah satunya berada di desa lemito kabupaten pohuwato. Sedangkan pada tahun 2013 dialokasikan di 10 desa pesisir desa bumbulan dan wonggasari.

Harapan program PDNT Sampai pada tahun 2017 Desa Nelayan yang Menjadi Desa Tangguh adalah : 77 Desa Nelayan atau 48,7 % dari Total 158 Desa Nelayan/Pesisir.

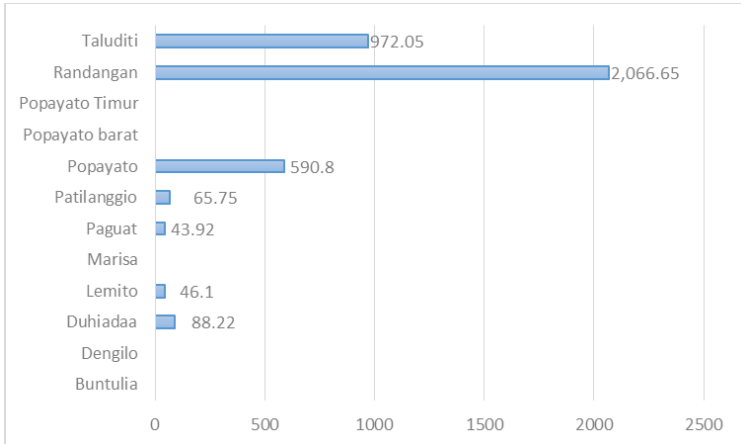
4.13.1. Dukungan Sarana Dan Prasarana

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, memberi kesempatan nelayan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dimana, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi dukungan sarana maupun prasarana, kapal Inka Mina dengan ukuran 30 Grosstone keatas.

Besarnya hasil tangkapan serta pendapatan untuk setiap kapal di setiap daerah berbeda, bahkan beberapa diantaranya menunjukkan nilai yang fantastis. Selain itu nelayan mendapat berbagai keuntungan lainnya seperti yang telah dirasakan oleh nelayan di Kota Gorontalo yang kini dapat menghasilkan tuna dengan kualitas ekspor yang semula hanya Grade C kini bisa menghasilkan tuna dengan Grade A dengan harga USD 12 per kilogram. Tuna yang dihasilkan berkualitas ekspor dan sekarang negara tujuan ekspor mereka sudah merambah ke Jepang.

4.13.2. Potensi dan Peluang Budidaya Ikan Bandeng

Ikan bandeng merupakan salah satu jenis sumber daya perikanan budidaya pada air payau. Di tahun 2015 produksi bandeng terbesar terletak di Kecamatan Randangan sebesar 2.066,65 ton ikan bandeng.



Gambar 24. Grafik Produksi Ikan Bandeng (ton) Per Kecamatan di Kabupaten Pohuwato 2015. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pohuwato 2016)

4.13.3. Potensi Dan Peluang Investasi Garam Baku

Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia. Kebutuhan garam nasional tahun 2012 melebihi 1,8 juta ton dan diprediksi menembus angka 3,5 juta ton hingga akhir tahun 2014. Catatan terakhir tahun 2015 yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dimana jumlah

kebutuhan garam industri sebesar 1,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam dalam negeri mencapai 2,1 juta ton.

Kebutuhan garam nasional dialokasikan untuk garam konsumsi, yakni garam konsumsi rumah tangga dan industri pengasinan ikan, garam industri aneka pangan, garam industri untuk industri chlor alkali plant (CAP) dan farmasi, serta industri non CAP seperti industri perminyakan, kulit, tekstil, dan sabun. Dengan masih tingginya volume garam impor untuk kebutuhan nasional, menandakan masih terbukanya peluang investasi untuk industri garam termasuk di daerah Kabupaten Pohuwato yang memproduksi garam berkisar \pm 1.134,52 ton/tahun.

Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Desa Siduwonge Kecamatan Randangan merupakan salah satu penghasil garam dari sejak tahun 1981, walaupun belum membumi secara nasional namun sudah memberikan kontribusi terhadap produksi garam nasional melalui Program Nasional KKP Pengembangan Usaha Garam Rakyat.

Luas wilayah penggaram di Desa Siduwonge \pm 350 ha, sedangkan wilayah potensial yang digunakan dalam berusaha garam \pm 83,8 ha. Jumlah petambak yang aktif sebanyak 75 orang yang terbagi dalam 7 kelompok yakni: Kugar Surya Mootilango, Kugar Karya Baru, Kugar Bintang Poliyama, Kugar Fajar Anugerah, Kugar Pelangi, Kugar Beringin, dan Kugar Mootinelo.

Tabel 24. Hasil Produksi KUGAR / NON PUGAR Desa Siduwonge Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Bulan Agustus tahun 2016

No.	Nama Kelompok	Hasil (Kg)												Total (Kg)	Stok (Kg)												
		1		2		3		4		5		6				7		8		9		10		11		12	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	Surya Mootilango	16.500	39.820	44.165	12.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.585	3.300
2	Karya Baru	62.480	2.200	20.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.510	6.490	-	-	-	-	-	-	-	96.580	9.350
3	Bintang Poliyama	13.750	2.200	9.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	30.910	5.500
4	Fajar Anugerah	22.000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.750	-
5	Mootinelo																									-	-
6	Beringin																									-	-
7	Pelangi																									-	-
8	Non Pugar																									-	-
Total		114.730	44.970	74.525	12.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510	22.440	0	0	0	0	0	0	0	0	273.825	18.150

(Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato 2016)

4.13.4. Garam Baku

1. Gudang penampungan garam;
2. Alat dan Bahan penunjang produksi (Pipa, Mesin, Pompa, Boumeter, Waring, Gerobak Dorong);
3. Alat Pematat;
4. Mesin penyambung Geoisolator;
5. Geoisolator;
6. Roda Tiga (Viar)

Motode Pengelolaan Garam Baku

1. Metode Tradisional
Merupakan metode pengelolaan usaha garam yang sangat sederhana dengan menggunakan alat dan perlengkapan yang masih manual pembuatan pematang penampungan air muda, penampung penjemuran air, penampungan air tua dan petak/meja kristalisasi garam.
2. Metode Teknologi Geoisolator
Merupakan metode pengelolaan usaha garam cukup modern/canggih dengan menggunakan mesin pemadatan petak/meja kristalisasi garam dan sudah menggunakan geoisolator yang dialaskan pada meja pengkristalisasi garam dan hasilnya sangat bersih.

Peluang Investasi

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Pohuwato yang tersebar diseluruh daerah sangat membuka peluang bagi siap saja untuk berinvestasi. Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebut membutuhkan investasi dalam program :

1. Pengembangan serta Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kecamatan Paguat, Popayato, Popayato Barat dan Marisa;
2. Pengembangan Budidaya Pertambakan di kecamatan Popayato Timur, Patilanggio;
3. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Bandeng di Kecamatan Randangan, Taluditi dan Popayato;
4. Pengembangan Industri Pakan Ikan dengan kebutuhan untuk ikan air payau di Kecamatan Randangan, Taluditi, dan Popayato;
5. Pengembangan industri pengolahan garam dengan metode Geoisolator di Kecamatan Randangan

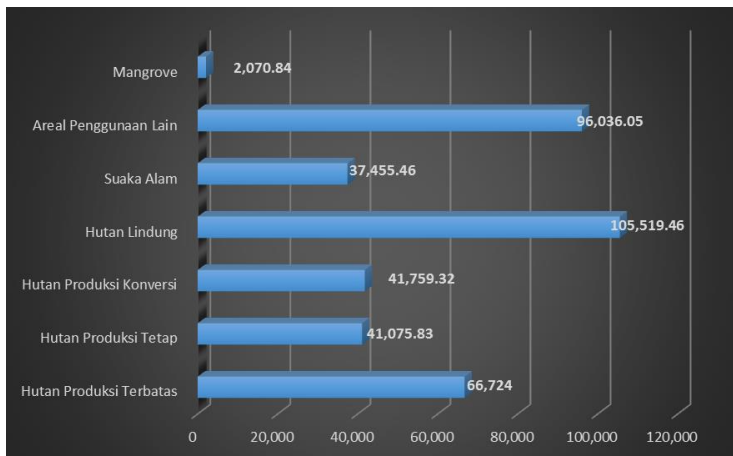
4.14. Sumber Daya Kehutanan

Hutan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta tumbuhan dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan adalah salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.

Berdasarkan tujuan pengelolaannya, hutan dibedakan menjadi:

1. Hutan produksi, yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu;
2. Hutan lindung, dikelola untuk mengelola tanah dan air;
3. Hutan suaka alam, dikelola untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati atau keindahan alam;
4. Hutan konversi, yakni hutan yang dicadangkan untuk penggunaan lain, dapat dikonversi untuk pengelolaan non kehutanan.



Gambar 25. Grafik Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pohuwato)

Sektor kehutanan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2009 telah terjadi alih fungsi hutan berdasarkan SK No 417/Menhut-II/2009 Tentang perubahan kawasan hutan dan SK No 433/Menhut-II/2009 Tentang Penunjukan kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato. Luas hutan Kabupaten Pohuwato sebesar 372.417,6 hektar.

Tabel 25. Fungsi Hutan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2015

No.	Kecamatan	FUNGSI HUTAN (HA)									
		HPT	HP	HPK	HL	SA/KPA	APL	MANGROVE			
1	Paguat	127.08	391.32	1,176.19	362.2	1,462.08	3,300.73	606.8			
2	Taluditi	26,301.65	692.14	1384.26	31,838.84	1,384.29	7,613.63	0			
3	Patilanggio	7,435.44	0	317.59	11,219.85	7,952.62	7,630.72	0			
4	Buntulia	1,050.34	0	502.28	16,073.22	11,552.63	11,050.34	0			
5	Wanggasari	12,737.07	2,460.76	0	18,473.42	1,513.93	11,938.64	0			
6	Marisa	0	0	159	0	589	885	0			
7	Popayato Timur	3,832.90	6,781.30	10,319.37	4,422.58	0	4,127.74	0			
8	Lemito	2,873.58	13,358.84	345.04	11,516.55	0	22,058.85	1,464.04			
9	Randangan	0	990.02	2,207.63	2,015.84	1,618.48	12,064.17	0			
10	Popayato	734.44	1,023.04	0	3,532.61	0	7,363.27	0			
11	Popayato Barat	7,959.75	2,894.45	23,879.26	31,839.02	0	5,799.91	0			
12	Duhiadaa	0	0	0	557.19	0	2,999.96	0			
13	Denglio	3,671.75	12,483.96	1,468.70	5,507.63	11,382.43	2,203.05	0			
TOTAL		66,724	41,075.83	41,759.32	105,519.93	37,455.46	96,036.05	2,070.84			

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pohuwato 2016)

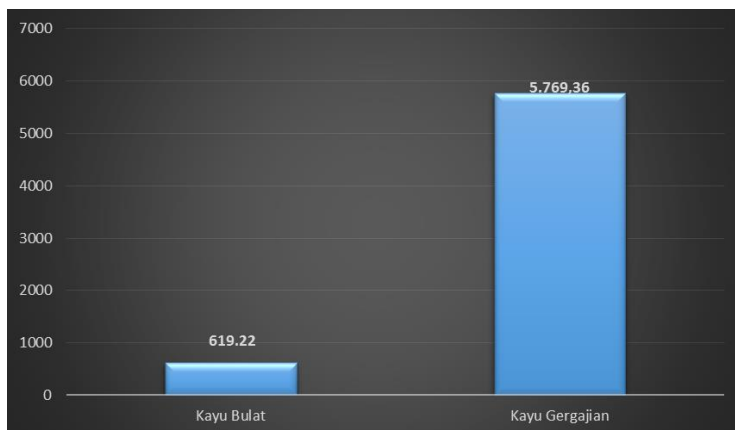
4.14.1. Aspek Sumberdaya Hutan

Potensi Hutan

Rata-rata potensi tegakan kayu untuk semua jenis di provinsi Gorontalo termasuk di Kabupaten Pohuwato berdasarkan hasil Re-Enumerasi PSP tahun 1996-2009 yaitu, jumlah pohon dengan diameter > 20 cm sebanyak 112,40 pohon/ha dengan volume 180,20 m³/ha, diameter > 50 cm sebanyak 21 pohon/ha dengan volume 111,40 m³/ha, dan diameter > 60 cm sebanyak 11,80 pohon/ha volumenya mencapai 88 m³/ha.

Produksi Kayu

Produksi kayu bulat di Kabupaten Pohuwato berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Pemanfaatan Kayu dan Pemilik atau pedagang hasil hutan kayu bulat dan asal usul yang sah. Produksi kayu bulat pada tahun 2015 sebesar 619,22 m³ sedangkan produksi kayu gergajian sebesar 5.769,3657 m³.



Gambar 26. Grafik Produksi Kayu (m³) Di Kabupaten Pohuwato 2015(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato)

4.14.2. Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan di Kabupaten Pohuwato terdiri dari rotan, damar dan kemiri. Total produksi rotan sebesar 27.174.000 ton/ha. Sedangkan total produksi damar yaitu 3.000 kg/ha. Sedangkan kemiri sebesar 200 kg/ha. Industri pengolahan rotan masih terus berkembang dengan produk-produk utama yaitu furniture dan produk-produk kerajinan. Produk industri rotan dipasarkan Manado, Makasar, Palu, Jayapura serta ke Australia dan Italia.

Masalah utama yang dihadapi industri rotan yaitu kekurangan bahan baku. Rotan diambil dari hutan yang semakin lama semakin jauh ke dalam hutan karena tidak ada upaya penanaman kembali dan rehabilitasi. Masalah lainnya yaitu kualitas produk yang dihasilkan meliputi kualitas

pengolahan bahan baku, rancangan produk dan variasi produk rotan belum sesuai permintaan terutama permintaan luar negeri.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Pohuwato sebesar 4.540 ha dan luasnya tetap 4.540 walau setelah luas RTRW Kabupaten Pohuwato.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Capaian Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar 1.000 ha.

Hutan Kritis

Di Kabupaten Pohuwato, hutan yang masih baik seluas 2.987,14 hektare, hutan potensi kritis 167,172,13 ha, agak kritis 237.706,34 ha, hutan kritis 17,161,98 dan sangat kritis 8.990,21 ha. Artinya, kawasan yang rusak bahkan yang parah jauh lebih besar dari yang masih terjaga kelestariannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yaitu penanaman kembali lahan rusak dan pembuatan dam penahan longsor.

4.14.3. Pemantapan Tata Kelola Kehutanan Dan Lingkungan Hidup

Tujuan Agenda ini adalah untuk mendukung RPJMN Tahun 2014-2019 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Wilayah Kabupaten Pohuwato yang sekitar 70 persen adalah kawasan hutan, sehingga hal ini cukup menjanjikan apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan.

Namun yang terjadi hingga saat ini, karena lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan belum termanfaatkan potensi hutan secara maksimal, maka tingkat perambahan dan pengrusakan hutan, utamanya mangrove masih terjadi.

Sementara itu dari aspek lingkungan hidup, permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan hijau. Selain itu pengelolaan sumber daya alam yang jauh dari ramah lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan bencana alam. Oleh sebab itu kebijakan strategis yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan, pemulihan dan pemanfaatan hutan
2. Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam percepatan rehabilitasi hutan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
3. Mengembangkan agroforestri dan ekowisata melalui program restorasi ekosistem
4. Memperketat pengawasan para investor dalam pengelolaan sumber daya alam
5. Peremajaan tanaman penghijauan kota dengan tanaman-tanaman has daerah menuju kota hijau dan nyaman.
6. Menambah dan Memperindah kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota untuk ruang publik agar lebih nyaman dan indah serta bersih.
7. Memastikan seluruh pembangunan pemerintah maupun swasta memiliki izin lingkungan.

Peluang Investasi

Adapun yang menjadi peluang investasi bidang kehutanan di Kabupaten Pohuwato adalah :

1. Usaha jasa perdagangan hasil hutan seperti damar, kemiri, dan rotan;
2. Budidaya hutan berupa Agrosilviculture;
3. Budidaya tanaman rotan dengan memanfaatkan reboisasi hutan lahan kritis. Selain untuk menopang hutang yang mulai gundul, penanaman hutan dengan pohon rotan juga meminimalisir kekurangan pasokan bahan baku akan rotan untuk kepentingan pembuatan *furniture*. Untuk lokasi bisa dikembangkan di seluruh hutan yang ada di Kabupaten Pohuwato;
4. Industri pengolahan hasil kehutanan, meliputi :Furniture dari kayu dan rotan di Kecamatan Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato agar pemasaran lebih mudah dilakukan.

4.15. Pariwisata

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap daerah karena delapan alasan utama seperti berikut ini:

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi daerah;

2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya;
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi;
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi;
5. Penghasil devisa;
6. Pemicu perdagangan internasional;
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun; dan
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

4.15.1. Tujuan Pembangunan Pariwisata

Dari sisi kepentingan nasional, pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan, yakni :

1. **Penghapusan Kemiskinan** : pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata;
2. **Pembangunan Berkesinambungan**: Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya

penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama;

3. **Pelestarian Budaya:** Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu daerah;
4. **Pemenuhan Kebutuhan Hidup:** Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern;
5. **Peningkatan Ekonomi dan Industri:** Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa;
6. **Pengembangan Teknologi:** Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka.

4.15.2. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian

Pendapatan dari Nilai Tukar Valuta Asing

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi

stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

1. Penerimaan Devisa

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi dan usaha kerajinan seni souvenir dan sebagainya.

3. Pembangunan Infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

4. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Lokal

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas.

5. Potensi Pariwisata di Kabupaten Pohuwato

Pohuwato memiliki banyak sekali obyek wisata potensial antara lain obyek wisata budaya, obyek wisata alam

darat, obyek wisata alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa obyek wisata potensial sudah dikenal dan yang berpotensi sudah dikembangkan sehingga menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Pohuwato.

a. Wisata Bahari

1. Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat;
2. Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat;
3. Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat;
4. Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

b. Wisata Alam

1. Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan. Lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito;

c. Wisata Budaya

1. Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di

atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

2. Bendungan Badengo, Air Terjun Karya Baru

d. Wisata Alam Konservasi

1. Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa;

Tabel 26. Data Potensi Objek Wisata Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA	STATUS PENGEMBANGAN
1.	KECAMATAN PAGUAT	Objek Wisata Libuo	Pantai	Sedang Dikembangkan
		Cagar Alam Panua	Konservasi	
		Tanjung Bajo	Pantai	Natural
		Pasir Putih Alumbango	Pantai	Natural
		Tanjung Maleo	Pantai	Sedang Dikembangkan
2.	KECAMATAN DENGILO	Bendungan Padengo	Alam	Natural
		Air Terjun Karya Baru	Alam	Natural
3.	KECAMATAN MARISA	Pohon Cinta	Alam	Sedang Dikembangkan
		Pulau Lahe	Pantai	Natural
		Danau Delo	Alam	Natural
4.	KECAMATAN	-	-	-

NO.	KECAMATAN	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA	STATUS PENGEMBANGAN
	BUNTULIA			
5.	KECAMATAN PATILANGGIO	Danau Embung	Alam	Natural
6.	KECAMATAN RANDANGAN	-	-	-
7.	KECAMATAN DUIADAA	Objek Wisata Pantai Bulili	-	Natural
8.	KECAMATAN TALUDITI	Air Terjun Makarti Jaya	-	Natural
9.	KECAMATAN WANGGARASI	Masjid Keramat Wanggarasi	-	Natural
		Air Terjun Dudu	Alam	Natural
10.	KECAMATAN LEMITO	Air Terjun Lomuli	-	Sedang Dikembangkan
11	KECAMATAN POPAYATO TIMUR	Air Terjun Batu Serungan	Alam	Natural
		Kelapa Lima		Natural
11.	KECAMATAN POPAYATO	Desa Wisata Torosiaje		Sedang Dikembangkan
		Pantai Lalape	Pantai	Sedang Dikembangkan
12.	KECAMATAN POPAYATO BARAT	-	-	-

(Sumber : Dishubparkominfo Kab.Pohuwato, tahun 2016)

4.15.3. Refleksi terhadap Pariwisata Gorontalo

Dalam konteks pembangunan, pariwisata dihubungkan dengan konsep 4A, yakni daya tarik wisata “Attractions”, Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi diukur dari bandara “Accesable”, adanya fasilitas pendukung pariwisata “Amenities”, adanya lembaga pariwisata “Ancillary”.

Jika dilihat dari jumlah akomodasi yang telah ada, maka Kabupaten Pohuwato layak mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah, mengingat jumlah hotel yang tersedia di Kabupaten Pohuwato sudah mencapai angka 19 hotel dengan total kamar sebanyak 280 dan tempat tidur sebanyak 424 kamar.

Tabel 27. Daftar Objek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Pohuwato

No	Nama obyek	Jenis obyek	Lokasi
1	Pantai Libuo	Wisata Bahari	± 13 Km dari Pusat Kota Marisa, Kecamatan Paguat
2	Tanjung Maleo	Wisata Bahari	Desa Maleo Kecamatan Paguat
3	Tanjung Bajo	Wisata Bahari	± 20 Km Dari Pusat Kota Marisa, Desa Bumbulan Kec. Paguat
4	Pohon Cinta	Wisata Bahari	Pusat Kota Marisa, Desa Pohuwato Timur
5	Pantai Bulili	Wisata Alam	Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa
6	Pantai Lalape	Wisata Alam	± 70 Km Dari Pusat Kota Marisa,

No	Nama obyek	Jenis obyek	Lokasi
			Desa Trikora, Kecamatan Paguat
7	Danau Delo	Wisata Alam	± 15 Km Dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora, Kecamatan Popayato
8	Danau Embung	Wisata Alam	± 30 Km dari Pusat Kota Marisa, Kecamatan Patilanggio
9	Danau Telaga	Wisata Alam	Desa Telaga Kec. Popayato
10	Masjid Keramat Wanggarasi	Wisata Buatan	Kecamatan Wanggarasi
11	Desa Wisata Torosiaje ^{*)}	Wisata Budaya	Desa Torosiaje Kec. Popayato
12	Air Terjun Kelapa Lima	Wisata Alam	Kec. Popayato Timur
13	Air Terjun Makarti Jaya	Wisata Alam	Kec. Taluditi
14	Air Terjun Lomuli	Wisata Alam	Desa Lomuli Kec. Lemito
15	Air Terjun Wanggarasi	Wisata Alam	Kecamatan Wanggarasi
16	Pulau Lahe	Wisata Alam	Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa

(Sumber : Data Pohuwato Dalam Angka 2015)

Peluang Investasi

Adapun peluang investasi di bidang Pariwisata untuk Kabupaten Pohuwato yaitu:

1. Peluang investasi pada wisata bahari, meliputi:
 - a) Penyewaan kapal pariwisata bagi wisatawan asing maupun lokal untuk daerah Torosiaje;

- b) Pengadaan saluran air bersih ke daerah-daerah wisatawan seperti Torosiaje;
 - c) Usaha penyewaan alat selam untuk Kecamatan Paguat dan Marisa khususnya di pantai Lahe dan Pantai Lalape dan Tanjung Bajo yang terkenal dengan panorama bawah laut yang indah
2. Peluang investasi pada wisata Alam
 - Pembangunan *cottage* dan pondok-pondok kecil untuk istirahat pengunjung di sekitaran air terjun.
 3. Peluang investasi pada wisata budaya, meliputi :
 - a) Jasa penyediaan *tour guide* khususnya untuk kampung Torosiaje;
 - b) Pengadaan rumah pameran karya seni budaya.

DAFTAR PUSTAKA

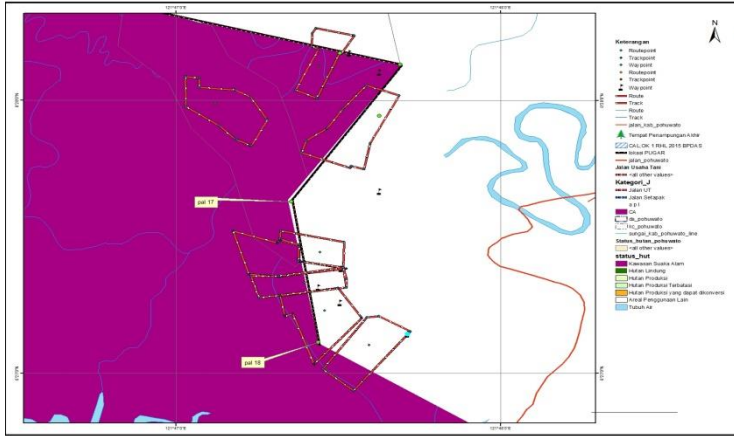
- Adiyoga, W. 1999. *Pola Pertumbuhan Produksi Beberapa Jenis Sayuran di Indonesia*. Jurnal Hortikultura 9(2): 258-265.
- Juoro, 1989. *Perkembangan Studi Ekonomi Aglomerasi dan Implikasinya Bagi Perkembangan Perkotaan di Indonesia*. Jurnal ekonomi dan keuangan Indonesia, Vol.37, No.2.
- Kartasmita, Ginanjar. 1994. *Pembangunan Infrastruktur Seminar Pembangunan Konsep Dan Implikasi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ritonga, Abdurrahman dkk. 2003. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siagian, 1994. *Pembangunan Infrastruktur Seminar Pembangunan Konsep Dan Implikasi*. Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

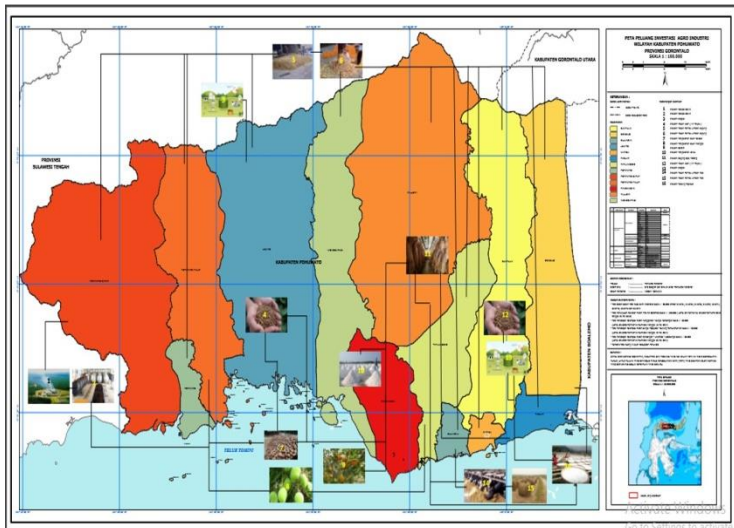
Suharto, Edi.2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta : Bandung.

Suparlan, Parsudi.2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

LAMPIRAN



Gambar 27. Peta PUGAR di Kabupaten Pohuwato (Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato Tahun 2016)



Gambar 28. Peta Agroindustri Kabupaten Pohuwato



STUDI PERSEPESSI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

5.1. Pendahuluan

Kawasan Industri adalah suatu kawasan yang di dalamnya di bangun beraneka jenis industri sehingga membentuk suatu aglomerasi ekonomi yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang. Menurut Mudrajad Kuncoro (2012) Aglomerasi Ekonomi merupakan konklustersi spasial dari aktivitas ekonomi berupa kluster industri pada suatu kawasan. Pembangunan kawasan industri bertujuan antara lain: 1. Mempercepat pengembangan ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi 2. Mempermudah pelayanan pengembangan industri terutama dalam mengakses input,

tenaga kerja, pasar produk sehingga terjadi efisiensi pengembangan industri.

Struktur perekonomian Provinsi Gorontalo hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang 29% terhadap PDRB, sektor jasa-jasa dan perdagangan 28% dan sektor Hotel dan Restoran 10%, sedangkan sumbangan sektor industri masih di bawah 5% (Gorontalo Dalam Angka, 2013). Dengan demikian maka sudah sepatutnya pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menetapkan suatu kawasan industri yang permanen, bersifat jangka panjang secara teknis juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar kawasan industri yang dibangun berdampak secara ekonomi dan sosial.

Hasil diskusi yang dilaksanakan oleh Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo (2013) bahwa penyebab lambatnya perubahan struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah 1. Relatif kurangnya ketersediaan infrastruktur berupa listrik, jalan akses produksi, pelabuhan 2. Belum adanya lokasi industri yang representatif 3. Belum terkoordinirnya komoditas inti masyarakat dari sisi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Hal ini diperkuat oleh keluhan para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Gorontalo dalam bidang industri tapi terkendala oleh belum adanya kawasan industri yang bersifat jangka panjang sehingga investor memiliki, kepastian hukum, kepastian usaha mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga peningkatan skala usahanya. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 bahwa salah satu daerah yang direncanakan untuk pengembangan kawasan industri di

Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo Utara yang relatif mendekati Pelabuhan Anggrek.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini hendak mengidentifikasi persepsi masyarakat dan stake holder tentang rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

5.2. Tinjauan Pustaka

5.2.1. Beberapa Kajian Pustaka Yang Penting Dan Terkait Dengan Objek Penelitian

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sector-sector lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar (terms of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sector lain. Hal ini disebabkan karena sector industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang dan investor) lebih suka berkecimpung dalam bidang industri karena sektor ini memberikan margin keuntungan yang lebih menarik. Berusaha dalam bidang industri dan berniaga hasil-hasil industri juga lebih diminati karena proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia, tidak terlalu bergantung pada alam semisal musim atau keadaan cuaca (Dumairy, 1997: 227).

Dalam penentuan lokasi industri Weber dalam Sugeng Budiharsono (Perencanaan Pembangunan Wilayah, 1989:61) mengemukakan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi lokasi industri yaitu: (1). Biaya transportasi

(2) Biaya Tenaga kerja dan (3) Kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi. Biaya transportasi terkait dengan pergerakan bahan baku ke lokasi industri dan pergerakan output ke pasar atau mendekati pelabuhan. Analisis pendekatan tersebut terkait dengan jumlah dan biaya yang dikeluarkan dari sumber produksi input serta jumlah dan biaya output barang yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dari pabrik hingga naik ke atas kapal.

Dari analisis ini akan ditetapkan lokasi industri apa sebaiknya mendekati bahan baku atau mendekati pasar. Biaya tenaga kerja terkait dengan kebutuhan dan penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan pada suatu lokasi industri apa memiliki kemudahan atau tidak terutama dilihat dari fasilitas publik yang dibutuhkan tenaga kerja. Pendekatan analisis aglomerasi dan deaglomerasi terkait dengan dampak keberadaan suatu lokasi terhadap perekonomian sekitar. Aglomerasi cenderung akan terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu lokasi sehingga akan menimbulkan efek multiplier ekonomi yang cukup besar.

Pemusatan ekonomi tersebut akan diikuti oleh terkonsentrasinya penduduk pada suatu wilayah sehingga menuntut penyediaan infrastruktur dan pelayanan public yang memadai seperti pemukiman, sarana air, pendidikan, kesehatan dll. Keberadaan suatu kawasan industri akan memunculkan aglomerasi ekonomi atau terkonsentrasinya industri pada suatu kawasan sehingga akan berdampak eksternalitas ekonomi dan kecenderungan ketimpangan pendapatan. Fenomena ini dapat terlihat pada munculnya dikotomi Kawasan Barat Indonesia yang (KB) sangat maju dalam sektor industrinya dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang sangat ketinggalan dalam pengembangan industri.

Mudrajad Kuncoro (2002:120) mengemukakan bahwa aglomerasi muncul karena perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari penghematan aglomerasi, baik penghematan lokalisasi maupun urbanisasi.

(Syafrizal, 2012:155) menyatakan bahwa Konsep Kawasan (Komplek) Industri sebagai salah satu alat untuk mendorong pengembangan kegiatan industri telah cukup lama diterapkan di Indonesia yang dimulai pada waktu pendirian Kawasan Industri Pulo Gadung di Jakarta yang kemudian disusul dengan pengembangan Kawasan Industri Rungkut Surabaya, Kawasan Industri Lhok Smawe di Aceh dan Kawasan Industri Cilacap. Sasaran utama adalah untuk mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan wilayah serta sekaligus meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Karena itu, konsep ini kemudian berkembang dan menjadi penting sebagai alat dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Ide ilmiah dari pendirian sebuah kawasan industri berasal dari hasil studi Walter Isard pada tahun 1956 dalam pengembangan industrialisasi di Pulau Puerto Rico yang pada waktu itu merupakan daerah protektorat Amerika Serikat. Pembangunan kawasan industri ini yang semula lokasi penyulingan minyak kemudian berkembang menjadi suatu kawasan industri minyak yang saling terkait dengan industri lainnya sehingga membentuk suatu aglomerasi ekonomi yang cukup besar dan menjadi daya tarik cukup besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Keuntungan Aglomerasi Ekonomi menurut Syafrizal (2012:147) adalah dapat membentuk suatu pusat pertumbuhan yang dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi

para pengusaha karena di kawasan industry tersebut akan berkembang perusahaan yang saling terkait satu sama lain baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang.

5.2.2. Peran Sektor Industri Bagi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Peranan sektor industri terhadap pembangunan telah banyak diteliti oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah:

1. Simon Kuznets

Kuznet yang meneliti hubungan antara struktur ekonomi daerah terhadap perkembangan ekonomi dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sektor industri mengalami peningkatan peranan dalam perekonomian, yang berarti tingkat pertumbuhan sektor ini lebih cepat dari pertumbuhan produksi nasional. Perubahan ini juga terlihat dalam struktur tenaga kerja yang semakin besar dan akan semakin besar bila perumbuhan ekonomi meningkat.

2. Hollis B. Chenery

Penelitian Chenery menekankan pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang di antara berbagai jenis di dalam subsektor industri pengolahan dengan pendapatan per kapita. Kenyataan menunjukkan bahwa sub-sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pendapatan per kapita. Dalam skala regional perkembangan yang terjadi di sektor industri akan berdampak pada perkembangan sektor-sektor lain. Proses interaksi ini dinyatakan dalam saling hubungan (linkages) antara perindustrian, infrastruktur serta aktivitas antar sektor. Peranan sektor industri bagi pertumbuhan wilayah yaitu dari fakta industri tidak homogen dan beberapa industri mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari

lainnya. Juga terdapat daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari daerah-daerah lainnya. Karena struktur industri yang berbeda dari daerah ke daerah memunculkan kecenderungan bahwa struktur industri dan pertumbuhan wilayah terdapat hubungan kausal.

Hasil penelitian Fachrudin Zain Olilingo (2002) tentang Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Wilayah Dan Dampaknya Terhadap Distribusi Pemakaian Input Dan Ketimpangan Antar Sektor Di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa sector industri sangat berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi karena terbukti sanggup menciptakan dampak ganda (multipler) baik tipe I maupun tipe II dalam perekonomian wilayah khususnya dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Peran sector industri ini tidak lepas dari kemampuannya dalam memberikan kontribusi terhadap struktur output sektoral, permintaan akhir, volume ekspor dan kesempatan kerja yang akhirnya berdampak pada perubahan struktural.

Keterkaitan ke depan sektor industri berpengaruh negatif terhadap indeks distribusi pemakaian input yang berarti bahwa semakin tinggi keterkaitan sector industri ke depan, maka semakin rendah indeks distribusi pemakaian input yang berarti semakin timpang distribusi pemakaian input antar sector. Sebaliknya keterkaitan ke belakang berpengaruh positif terhadap indeks distribusi pemakaian input antar sector di sector industri yang berarti bahwa semakin tinggi keterkaitan industri ke belakang semakin tinggi indeks distribusi pemakaian input antar sector semakin bagus. Keterkaitan ke depan berpengaruh positif terhadap koefisien pengganda yang berarti semakin tinggi keterkaitan sector industri ke depan, makin semakin tinggi pula indeks

koefisien pengganda yang berarti semakin besar pendapatan dan kesempatan kerja yang tercipta dari suatu kegiatan investasi. Demikian pula keterkaitan ke belakang berpengaruh positif terhadap koefisien pengganda.

3. Francois Perroux

Hubungan antara pengembangan industri dengan pertumbuhan wilayah telah diungkapkan juga oleh Francois Perroux dalam Growth Pole Theory. Teori Perroux mengenai Pole De Croissance atau pole of Growth (pusat pertumbuhan) merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi dan kebijaksanaan industri daerah yang dijalankan di berbagai daerah dewasa ini. Perroux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Kemunculannya hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda, berkembang melalui saluran yang berbeda, dengan akibat akhir yang ditimbulkannya berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian.

Hakekat teori Perroux mengenai pembangunan daerah dapatlah disingkat dalam beberapa hal berikut: Pertama, dalam proses pembangunan akan muncul L 'Industrie motrice atau industri pemimpin yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah. Laba dari suatu industri merupakan fungsi dari tingkat produksi dalam industri lainnya. Dengan perkataan lain, efisiensi dan tingkat produksi dalam suatu industri bukan saja tergantung pada industri tersebut juga tergantung pada industri-industri lain yang erat hubungannya dengan industri tersebut. Hubungan yang erat di antara berbagai industri menyebabkan kalau sesuatu industri atau beberapa industri pemimpin berkembang maka penambahan

produksi tidak terbatas pada jumlah kenaikan produksi dalam industri pemimpin tetapi juga pada kenaikan jumlah produksi industri lain yang erat hubungannya dengan industri pemimpin tersebut. Kedua, apabila industri terkumpul dalam suatu daerah/kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi, karena pengelompokan industri tadi akan menciptakan konsumen-konsumen yang mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan penduduk daerah pedesaan; permintaan untuk perumahan, pengangkutan, dan jasa-jasa pemerintah akan muncul; berbagai jenis produsen dan pekerja-pekerja mahir akan berkembang; dan rangka dasar industri akan terbentuk.

Proses pertumbuhan industri yang terpusat dalam satu kawasan ini selanjutnya akan menimbulkan ketidakseimbangan di berbagai daerah lain karena perkembangan di pusat-pusat industri akan mempengaruhi perkembangan di daerah lain. Ketiga, karena secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang maka sesuatu perekonomian pada hakekatnya merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif aktif keadaannya (terdiri dari industri-industri atau daerah-daerah yang tergantung kepada kegiatan di pusat pertumbuhan) kumpulan industri yang pertama akan mempengaruhi pembangunan industri yang kedua.

Jadi, pada hakekatnya Perroux menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut lokasi kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi tidak merata terjadinya di berbagai daerah dan mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan. Keuntungan yang didapat dengan adanya suatu industri di suatu kota atau daerah antara lain adalah besarnya sumbangan

sektor industri terhadap produk domestik regional bruto daerah yang bersangkutan, sehingga seringkali keberadaan suatu industri diidentikkan dengan kemajuan suatu daerah atau kota. Friedman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh perkembangan industri yang cepat. Dengan demikian di suatu daerah yang memiliki banyak kegiatan industri akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan daerah yang memiliki sedikit kegiatan industri.

5.2.3. Kebijakan Pengembangan Sektor Industri

Kinerja ekonomi Gorontalo dalam periode 2006-2013 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 7,61%, dimana lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,90%. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut telah berdampak positif pada berbagai kinerja ekonomi dan sosial Provinsi Gorontalo seperti terjadinya penurunan angka kemiskinan tahun 2013 menjadi 17,54%, angka pengangguran turun menjadi 5,46%, Indeks Pembangunan Manusia telah mencapai 71,77. Di lingkungan Sulawesi peran ekonomi Gorontalo masih relative kecil dimana kontribusi Provinsi Gorontalo terhadap pembentukan PDRB pulau Sulawesi adalah sebesar 3,25 persen, sementara itu kontribusi ekonomi Gorontalo terhadap PDB nasional sebesar 0,15 % persen (BPS, 2013).

Kecilnya peran ekonomi Gorontalo tersebut perlu diantisipasi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan. Menurut Chennery dalam Tambunan, 2011 bahwa sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian adalah sektor industri. Sektor industri dijadikan

leading sektor sebab sektor ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sektor pertanian. Kelebihannya diantara lain memiliki nilai tambah yang besar, produksinya efisien, memiliki nilai tukar yang besar dan skala ekonominya juga tinggi.

Walaupun sektor industri menjadi prioritas dan penghela ekonomi, namun karena Indonesia adalah negara agraris, maka pengembangan sektor pertanian tetap juga menjadi penggerak ekonomi secara keseluruhan. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 1). Harus ada keseimbangan kebijakan pengembangan sektor pertanian dan industri 2). Pengembangan sektor industri sebaiknya berbasis pertanian. Terhadap dua kebijakan tersebut secara nasional sudah menjadi komitmen pemerintah seperti yang ditunjukkan baik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dimana sasaran utama pembangunan jangka panjang negara ini adalah pencapaian struktur ekonomi yang seimbang yaitu terdapatnya kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh.

Hal ini berarti bahwa antara sektor pertanian (dan kehutanan) dan sektor industri diperlukan adanya keterkaitan yang kuat baik keterkaitan kedepan maupun keterkaitan ke belakang dalam mencapai tujuan masing-masing sektor tersebut. Adanya keterkaitan ini terlihat dengan adanya perkembangan pengolahan hasil pertanian dan industri agro (agroindustri). Agroindustri adalah suatu kegiatan lintas disiplin yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian) untuk industri.

Transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya

melenyapkan nuansa agraritasnya. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi empiris Bank Dunia menunjukkan, bahwa sukses pengembangan sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa.

Keputusan Indonesia untuk membuat pertanian menjadi landasan perencanaan pembangunan negara memang tidak sejalan dengan kebijaksanaan konvensional. Pada akhir dekade enam puluhan, ketika pemerintah Orde baru meluncurkan rencana pembangunan ekonominya, sebagian besar literatur dalam bidang ekonomi mengidentikkan pembangunan dengan industrilisasi. Hal ini terlihat lebih nyata lagi misalnya dalam penamaan negara yang sudah mencapai standar hidup yang tinggi bagi penduduknya sebagai negara industri. Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang mendahulukan pertanian, tim ekonomi negara tetap punya komitmen besar terhadap industrilisasi sebagai sebuah pilar bagi strategi pembangunan ekonomi negara. Mereka juga sadar bahwa program yang keliru untuk mencapai industrilisasi secara terburu-buru bisa menjadi boomerang yang menyebabkan disalokasi ekonomi, investasi terbuang percuma, dan penghamburan kekayaan negara yang langka.

Bukti statistik dari zaman Soekarno terlalu sedikit dan masih kacau sehingga sukar untuk memperkirakan keadaan industrilisasi Indonesia pada masa tersebut. Namun demikian, bukti yang tersedia mengisyaratkan bahwa pada masa

permulaan Orde baru, Indonesia termasuk negara yang paling rendah tingkat industrilisasinya diantara negara-negara sedang berkembang yang besar.

Memandang ke belakang, akhir dekade Sembilan puluhan, saat Indonesia mulai menjadi negara industri baru (NIC, *Newly Industrialized Country*), orang bisa dengan mudah berpikir bahwa kita telah berhasil. Namun, dalam prosesnya, kita kadang-kadang membuat kesalahan yang membawa kepada jalan buntu. Ada banyak pengalaman berharga yang kita peroleh terutama pada tahun-tahun awal. Pengalaman-pengalaman ini bisa disarikan sebagai berikut :

- Proteksionisme, sukses kebijakan industri tak lepas dari terpeliharanya nilai tukar mata uang yang realistis
- Strategi ekonomi harus bersifat fleksibel dan realistis, sehingga dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi, dan bila perlu dihentikan kalau sudah kadaluwarsa.

5.2.4. Peran Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Struktur perekonomian Gorontalo didominasi oleh sektor pertanian, diikuti jasa jasa, dan perdagangan. Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih rendah. Industri pengolahan sendiri hanya berkontribusi sebesar 5 persen, sementara dukungan sektor utilitas untuk industri berkontribusi sangat kecil. Sektor jasa-jasa sebagai sektor tersier mulai mendominasi perekonomian Gorontalo sejak tahun 2008 dan terus meningkat hingga tahun 2013. Hal ini menjadi indikator perkembangan wilayah sebagai pusat pelayanan.

Sektor pertanian yang mendapatkan prioritas pengembangan di wilayah ini adalah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki pasar luas, sedangkan pola kegiatan pertanian banyak dilakukan di perdesaan dengan keterbatasan modal, penyediaan bibit unggul, pupuk, kualitas SDM yang rendah, serta kualitas produksi dan pemasaran yang rendah. Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Gorontalo, namun laju pertumbuhan sektor ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Produktivitas pertanian padi di Provinsi Gorontalo juga tinggi namun tingkat produksinya juga rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Tentang sumbangan sector-sector ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)
1	Pertanian	27,17
2	Pertambangan	1,08
3	Industri Pengolahan	8,06
4	Listrik, Gas, Air Minum	0,58
5	Konstruksi	9,33
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	15,64
7	Angkutan, Telekomunikasi	10,97
8	Keuangan	9,10
9	Jasa-jasa	18,06
JUMLAH		100.00

Sumber: BPS, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa industri pengolahan hanya mempunyai kontribusi 5.11% penyebabnya kurangnya ketersediaan bahan baku yang menjadi kendala dalam faktor produksi, sehingga berdampak pada perusahaan belum dapat memenuhi kebutuhan pembeli secara kontinyu. Selanjutnya upaya diversifikasi produk dan adanya permintaan dari luar negeri memberikan peluang untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspor di tahun 2014.

5.3. Deskripsi Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

5.3.1. Geografis, Administrasi, dan Kondisi Fisik

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah administrasi yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang disahkan melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara.

Secara geografis lebih dari 75 persen wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah pesisir, dengan panjang garis pantai mencapai 320 kilometer persegi (Km²), sekaligus merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudera Pasifik.

a. Batas Administrasi

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Pohuwato;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;

- dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara 1.777,3 kilometer persegi, meliputi 6 wilayah Kecamatan dan 56 Desa tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 11 Kecamatan dan 123 Desa, antara lain luas wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Atinggola, seluas 264,55 kilometer persegi dan Kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Ponelo Kepulauan yaitu 10,40 Km². Untuk lebih jelasnya Luas wilayah kecamatan dan jumlah desa dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Jumlah Desa
1	Atinggola	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	100,34	5,65	11
3	Tomilito	88,00	4,95	10
4	Ponelo Kepulauan	10,40	0,59	4
5	Kwandang	202,86	11,42	18
6	Anggrek	66,09	3,72	15
7	Monano	214,62	12,08	10
8	Sumalata Timur	254,92	14,35	10
9	Sumalata	249,67	14,05	12
10	Biau	85,85	4,83	10
11	Tolinggula	239,73	13,49	10
TOTAL		1,777.30	100,00	123

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagian besar adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0 - 1.800 meter diatas permukaan laut,

Keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15-40 ° (60 - 70 %). Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Kabupaten Gorontalo Utara rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki garis panjang pantai 198,00 Km² yang menjadi garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra Pasifik.

d. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara berupa sungai besar dan kecil sehingga merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari masih memanfaatkan potensi alami tersebut karena belum terjangkau oleh PDAM. Adapun jaringan perpipaan hanya terdapat di beberapa tempat yang dekat dengan sumber air sehingga sebagian besar masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur bahkan masih terdapat penduduk yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e. Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam tipe C dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.267 mm/tahun dengan temperatur udara rata-rata 32⁰ C dengan temperatur tertinggi 33,9⁰ C terjadi pada bulan Maret dan temperatur terendah 23⁰ C terjadi pada bulan Februari.

f. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara sampai tahun 2011 berjumlah 125.477 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kwandang yaitu mencapai

30.618 jiwa dengan kepadatan penduduk tertinggi, dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada Kecamatan Biau yaitu sebanyak 5.622 jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2011 sebesar 70,61 jiwa per kilometer persegi, dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Ponelo Kepulauan sebesar 551,21 jiwa per kilometer persegi dan terendah dimiliki oleh Kecamatan Sumalata Timur sebesar 28,52 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin tahun 2011 sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 125.477 jiwa, meningkat 3,00 % dibanding tahun sebelumnya. Kecamatan yang terbanyak penduduknya yaitu Kecamatan Kwandang, Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebanyak 30.618 jiwa dan Kecamatan yang terendah penduduknya yaitu Kecamatan Biau, sebanyak 5.622 jiwa.

g. Kondisi Curah Hujan

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Menurut data Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2012, oleh karena itu jumlah curah hujan dan hari hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Menurut Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka maka rata-rata curah hujan selama tahun 2011 berkisar 137,83 mm.

5.4. Persepsi masyarakat tentang Kawasan Industri

5.4.1. Landasan Penetapan Kawasan Industri

Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Sebelumnya Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000. Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.215,44 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038.585 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km². Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (Enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.735,93 km², Kabupaten Puhwato dengan luas wilayah 4.291,81 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.777,03 km².

Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, serta pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Potensi

tersebut secara umum belum maksimal diolah terutama menjadi produk industri. Tentang sebaran data potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data Potensi Unggulan Provinsi Gorontalo

NO.	URAIAN	POTENSI	
1.	Sawah	27.520 Ha	
2.	Perkebunan	360.376 Ha	
3.	Lahan kering	284.822 Ha	
4.	Kawasan Hutan	824.668 Ha	
5.	Ikan tangkap Teluk Tomini sd P. Seram	595.630 ton/thn	
6.	Ikan tangkap laut Sulawesi sd Samudara Pasifik	630.470 ton/thn	
7.	Budi daya air tawar/payau	339.268 ton/tahun	
8.	Emas	218.133.132.151,07 ton	
9.	Perak	217.463.591,87 ton	
10.	Tembaga	217.976.091.224,87	

Sumber: Fachrudin 2014 (data diolah dari beberapa sumber)

Arah pengembangan ekonomi Gorontalo ke depan adalah memaksimalkan potensi di atas untuk peningkatan produksi pada berbagai sector ekonomi selanjutnya diupayakan akan membangun sektor industri yang berbasis komoditas lokal. Dalam perencanaan jangka panjang sesuai Tata Ruang Provinsi Gorontalo yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2011 pasal 58 bahwa kawasan Industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kedua kabupaten tersebut masing-masing diapit oleh laut dan daratan dan pegunungan yang sangat potensial. Di Kabupaten Pohuwato terdapat laut teluk Tomini

sedanahkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat Laut Sulawesi yang juga sebagai kawasan strategis nasional perbatasan negara. Akses ke luar misalnya ke Jawa atau daerah lainnya dari Kabupaten Gorontalo Utara lebih cepat dibanding Kabupaten Pohuwato karena daerah tersebut merupakan daerah di pinggir laut terbuka. Oleh karena itu di Kabupaten Gorontalo Utara telah dibangun pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan ekspor. Atas dasar pertimbangan tersebut Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan melalui Perda Tata Ruang no 4 tahun 2011 sebagai daerah pengembangan kawasan industri. Kawasan industri tersebut dekat dengan pelabuhan ekspor dan memiliki aksesibilitas yang tinggi sehingga efisien dalam mendukung sektor perdagangan.

5.4.2. Pemahaman Tentang Rencana Pengembangan Kawasan Industri

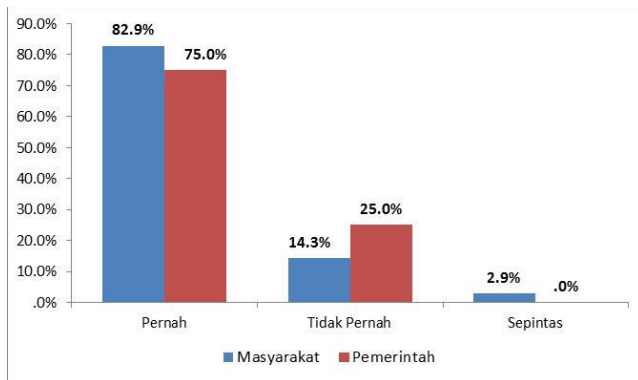
Studi persepsi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo Utara hendak mengukur sejauhmana kesiapan dan persepsi masyarakat dan stake holder dalam rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk itu telah dilakukan penelitian terhadap 50 responden yang terdiri atas 20 orang unsure pemerintah dan 30 orang masyarakat. Unsur pemerintah terdiri atas Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kecamatan Anggrek dan Pemerintah Desa Putiana, Ilangata dan Desa Popalo. Sedangkan unsure masyarakat adalah masyarakat yang terdapat pada 3 desa di atas juga dari beberapa pengusaha yang terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo Utara. Pemilihan 3 desa di atas secara purposive dengan pertimbangan ketiga tersebut

lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Anggrek. Hasil pengamatan tentang pemahaman responden terhadap rencana pengembangan kawasan industri secara umum baik masyarakat maupun unsure pemerintah sudah pernah mendengar tentang rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebanyak 82,9 % masyarakat pernah mendengar rencana tersebut sedangkan 14,3% menyatakan tidak pernah mendengar sama sekali. Dari unsure pemerintah 75% pernah mendengar sedangkan 25 % juga tidak pernah mendengar rencana tersebut. Ketika ditelusuri keabsahan jawaban mereka ternyata sebagian besar masyarakat memahami rencana keberadaan kawasan industri karena mereka menyaksikan langsung di lapangan dimana saat ini di Kecamatan Anggrek telah beroperasi beberapa gudang logistik dari beberapa pabrik yang beroperasi di Gorontalo misalnya Pabrik Gula Tolangohula yang saat ini sudah membangun pergudangan di area Pelabuhan Anggrek. Begitu pula dengan perusahaan Semen Tonasa sudah memiliki pergudangan untuk menampung barang yang didatangkan dari Makassar. Gas Elpiji juga sudah membangun tempat penampungan dan pengisian elpiji yang didatangkan dari Makassar. Selain daripada itu beberapa perusahaan yang melakukan transaksi dagang dari dan ke Gorontalo melalui Pelabuhan Anggrek juga cenderung membuar gudang untuk memperlancar sirkulasi barang dari dan ke Gorontalo. Dengan demikian kawasan industri di Kecamatan Anggrek tidaklah merupakan lokasi pabrik tapi merupakan bangunan gudang yang mendukung aktifitas pabrik. Beberapa penjelsan dari stake holder yang kami temui bahwa lokasi kawasan industri di Kabupaten Gorontalo Utara disiapkan seluas 1000 ha. Karena saat ini perusahaan Hutan

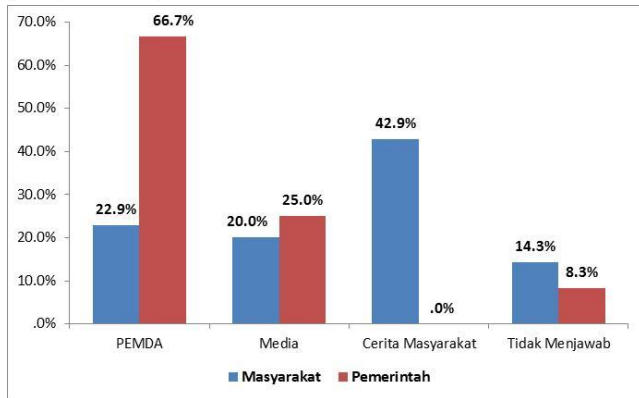
Tanaman Industri (HTI) yaitu PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestasi sudah melakukan penanaman pohon Jati Bongсор dan Saingan yang merupakan bahan baku pembuatan kertas (PULP), maka lokasi industrinya diarahkan ke Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk jelasnya tentang tanggapan responden terhadap pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada diagram berikut:

A. Rekapitulasi Hasil Analisis

1. Pernah mendengar rencana pengembangan kawasan industri di Gorontalo Utara



2. Sumber informasi mengenai rencana pengembangan industri di Gorontalo Utara

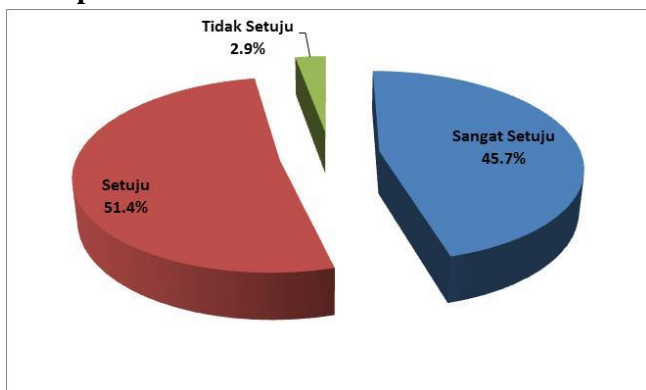


5.4.3. Kesiapan Masyarakat tentang pengembangan kawasan industri

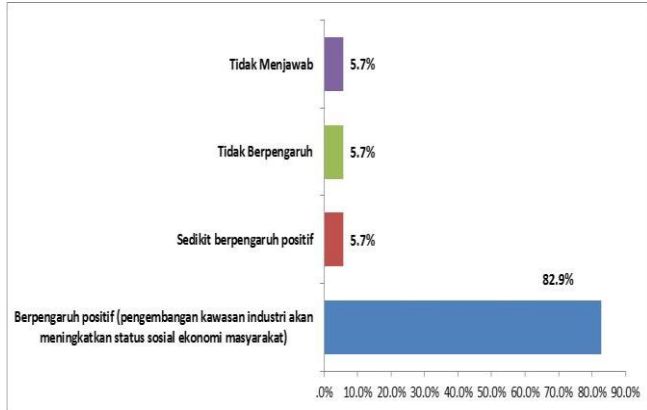
Responden di daerah penelitian baik masyarakat maupun pemerintah menyatakan setuju 51,4% dan sangat setuju 45,7% dan hanya 2,9% menyatakan tidak setuju pengembangan kawasan industri di Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara. Dari hasil wawancara lebih mendalam dengan para responden mereka sangat mengharapkan keberadaan kawasan industri akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat baik kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan, maupun kesempatan untuk hidup lebih layak dan juga bisa mengakses kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.. Sebesar 82,9 % menyatakan bahwa keberadaan kawasan industri akan berdampak pada peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana diketahui daerah ini merupakan perbukitan yang agak gersang sepanjang pantai

Laut Sulawesi bagian utara, sehingga pekerjaan masyarakat setempat adalah sebagai nelayan dan petani kebun seadanya. Untuk itu bila terbuka kawasan industri, maka akan terbuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi mereka dan secara ekonomi akan berdampak juga pada peningkatan pendapatan mereka. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:

1. Pendapat bapak/ibu tentang pengembangan kawasan industri Provinsi Gorontalo adalah di Kabupaten Gorontalo Utara



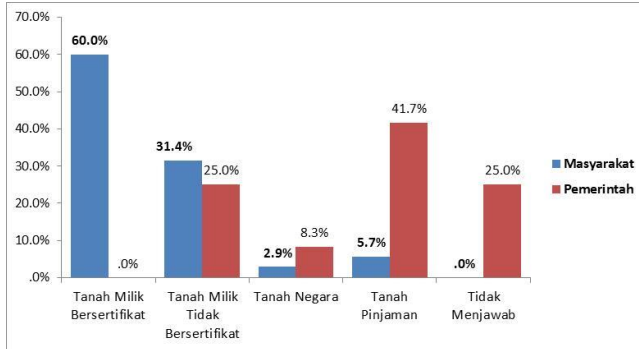
2. Pengaruh pengembangan kawasan industri terhadap status Sosial-Ekonomi masyarakat



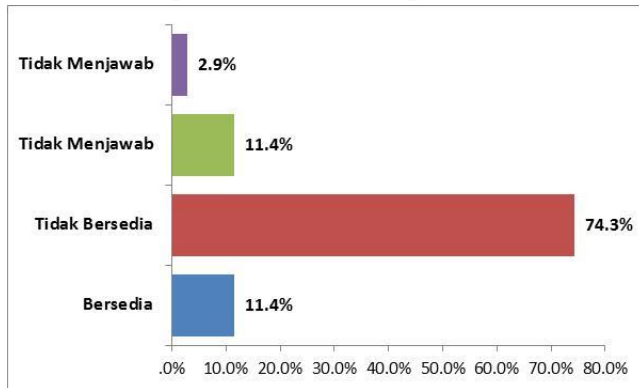
5.4.4. Kesiapan Masyarakat Untuk Di relokasi Ke Tempat Lain

Umumnya masyarakat di Kecamatan Anggrek memiliki tanah yang tidak terlalu luas yaitu sebanyak 57,4 % menyatakan kepemilikan tanahnya dibawah 1 ha, dan 25,5 % menyatakan memiliki tanah 1-2 ha. Tanah tersebut mereka akui sebagai peninggalan orang tua secara turun temurun dan statusnya sebanyak 60% menyatakan tanah milik bersertifikat dan sebanyak 31,4% menyatakan tanah milik tidak bersertifikat. Hal ini agak berbeda dengan pendapat dari pemerintah yang cenderung 41,7 5 menyatakan kepemilikan tanah di daerah setempat merupakan tanah pinjaman dan sebanyak 25% menyatakan sebagai tanah milik yang tidak bersertifikat. Ketika ditanyakan apakah mereka bersedia di relokasi ke tempat lain apabila akan dibangun kawasan industri sebanyak 74,3 % menyatkan tidak bersedia dan hanya 11,4 % menyatakan bersedia.

1. Status kepemilikan tanah yang anda tempati saat ini



2. Apabila ada pembebasan tanah bersedia jika direlokasi (dipindahkan) ke tempat lain



5.5. Kesimpulan dan Saran

5.5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Gorontalo Utara sudah sangat dibutuhkan seiring

dengan perkembangan ekonomi yang perlu ditunjang oleh sector industri yang berkelanjutan. Selain daripada itu pengembangan kawasan industri dibutuhkan sebagai implementasi dari Perda Tata Ruang Provinsi Gorontalo no. 4 tahun 2011 pasal 58 yang mengamanatkan Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan industri.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebanyak 82,9% masyarakat pernah mendengar rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan 14,3% menyatakan tidak pernah mendengar sama sekali. Para responden sebesar 97,1% menyatakan setuju pengembangan kawasan industri ditempatkan di Kabupaten Gorontalo Utara dan hanya 2,9 % yang menyatakakan tidak setuju.
3. Kepemilikan tanah 57,4% menyatakan kepemilikan tanahnya dibawah 1 ha, dan 25,5% menyatakan memiliki tanah 1-2 ha. Tentang status tanah sebanyak 60% menyatakan tanah milik bersertifikat dan sebanyak 31,4% menyatakan tanah milik tidak bersertifikat.
4. Apabila dilaksanakan pembangunan kawasan industri sebanyak 74,3 % menyatkan tidak bersedia direlokasi ke tempat lain dan hanya 11,4 % menyatakan bersedia.

5.5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disarakan:

1. Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo perlu ditindaklanjuti dengan menetapkannya dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Gorontalo sebagai implementasi dari Perda no 4 Tahun 2011 Provinsi Gorontalo tentang tata Ruang Provinsi Gorontalo.
2. Perlu perencanaan teknis pengembangan kawasan industri di Kecamatan Anggrek terutama berkaitan dengan relokasi masyarakat, Site Plan pengembangan kawasan industri, perencanaan bisnis dan kelengkapan infrastruktur kawasan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2013) Laporan Perkembangan Ekonomi Gorontalo, BI Gorontalo.
- Budiharsono, Sugeng, 1989. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori, Model Perencanaan, dan Penerapannya.
- Ibrahim, Yacob. (2009) Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta, Rineka Cipta
- Kuncoro, Mudrajad (2002). Analisis Spasial dan Regional. Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPNYogyakarta.
- (2012). Ekonomika Aglomerasi: Dinamika dan Dimensi Spasial, UPP AMP YKPNYogyakarta.
- Olilingo, Fachrudin Zain (2002). Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Wilayah Dan Dampaknya terhadap Distribusi Pemakaian Input dan

Ketimpangan Antar Sektor Di Provinsi Sulawesi Tengah, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2013

Syafrizal (2012). Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Tambunan, Tulus 1999. Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

<http://bisnisukm.com/potensi-sumber-daya-alam-di-provinsi-gorontalo.html>.